



DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH

LKIP

DJKI

TAHUN ANGGARAN

2021



## **KATA PENGANTAR**

**Ir. Razilu, M.Si., CGCAE.**

**Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.**

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,**

**P**uji dan Syukur Kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan hidayahNya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah dapat diselesaikan pada waktunya. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran

strategis Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, atas Laporan Kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya di bidang kekayaan intelektual.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai bentuk bentuk transparansi dan pertanggungjawaban atas seluruh kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Tahun Anggaran 2021 guna memberikan informasi kepada masyarakat terkait tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2021.

Laporan Kinerja ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sekaligus sebagai bahan self assessment atas kinerja DJKI Tahun 2021 yang dapat digunakan oleh internal untuk melakukan peningkatan kinerja yang berkelanjutan dari setiap unit yang ada di lingkungan DJKI. Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan akan mendatangkan masukan dan saran sebagai umpan balik untuk perbaikan secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan clean Governance.

Terima kasih kepada seluruh Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah berkontribusi mewujudkan program/penyelenggaraan pembinaan kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2021, tetapkan nyalakan semangat untuk selalu memberikan peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja yang lebih baik.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2021, serta sebagai umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja, serta dapat menjadi gambaran bagi perbaikan kinerja pada tahun berjalan maupun di tahun kerja berikutnya.

**Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Thariq,**

**Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.**

## DAFTAR ISI

Sambutan Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Daftar Isi

Daftar Tabel

Ikhtisar Eksekutif

### BAB I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi

1.4 Potensi dan permasalahan Penyelenggaraan

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

### BAB II. Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis Direktorat KI

2.2 Penetapan Kinerja

2.3 Evaluasi Internal

### BAB III. Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021

3.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

3.3 Capaian Kinerja Anggaran

3.4 Kinerja Lain (Prestasi)

### BAB IV. Penutup

Lampiran

1. Dokumen Perjanjian Kinerja

2. Penghargaan yang diterima DJKI

DAFTAR TABEL

## RINGKASAN EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

selama tahun 2021 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi. Laporan Kinerja ini adalah tahun kedua dari pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 – 2024, dimana salah satu sasaran strategisnya Kementerian Hukum dan HAM yang diturunkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah terselenggaranya penegakan Hukum di bidang Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian Hukum bagi Masyarakat. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021, juga berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sepanjang Tahun 2021 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berusaha menunjukkan perbaikan yang dituangkan dalam Laporan kinerja yang merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan, permasalahan, perbaikan, kebijakan dan keberhasilan dalam pencapaian target kinerja selama tahun 2021. Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) Indikator kinerja Utama yang dapat digambarkan mulai dari mulai dari (1) Stakeholders perspective, (2) internal perspective, (3) learning & growth, dan (4) basic values.

Harapan DJKI kedepannya dengan melihat tingginya potensi Kekayaan Intelektual di Indonesia merupakan gerbang besar menuju Indonesia maju, serta kekayaan intelektual bisa menjadi salah satu ujung tombang Bangsa Indonesia serta semakin bangga dan mencintai Kekayaan intelektual.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran/kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi tuntutan kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan.

Untuk mencapai akuntabilitas instansi Pemerintah yang baik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, dituntut selalu melakukan pembenahan dan capaian kinerja selama di tahun anggaran 2021. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kedepannya sekaligus alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja DJKI kedepannya serta diharapkan.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi serta bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip prinsip "good governance".

## **1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKI menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;

- b) pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- c) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- e) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri;
- g) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut.

DJKI mengelola/mengadministrasikan seperangkat peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual sebagai dasar hukum, yaitu:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Desain Industri
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

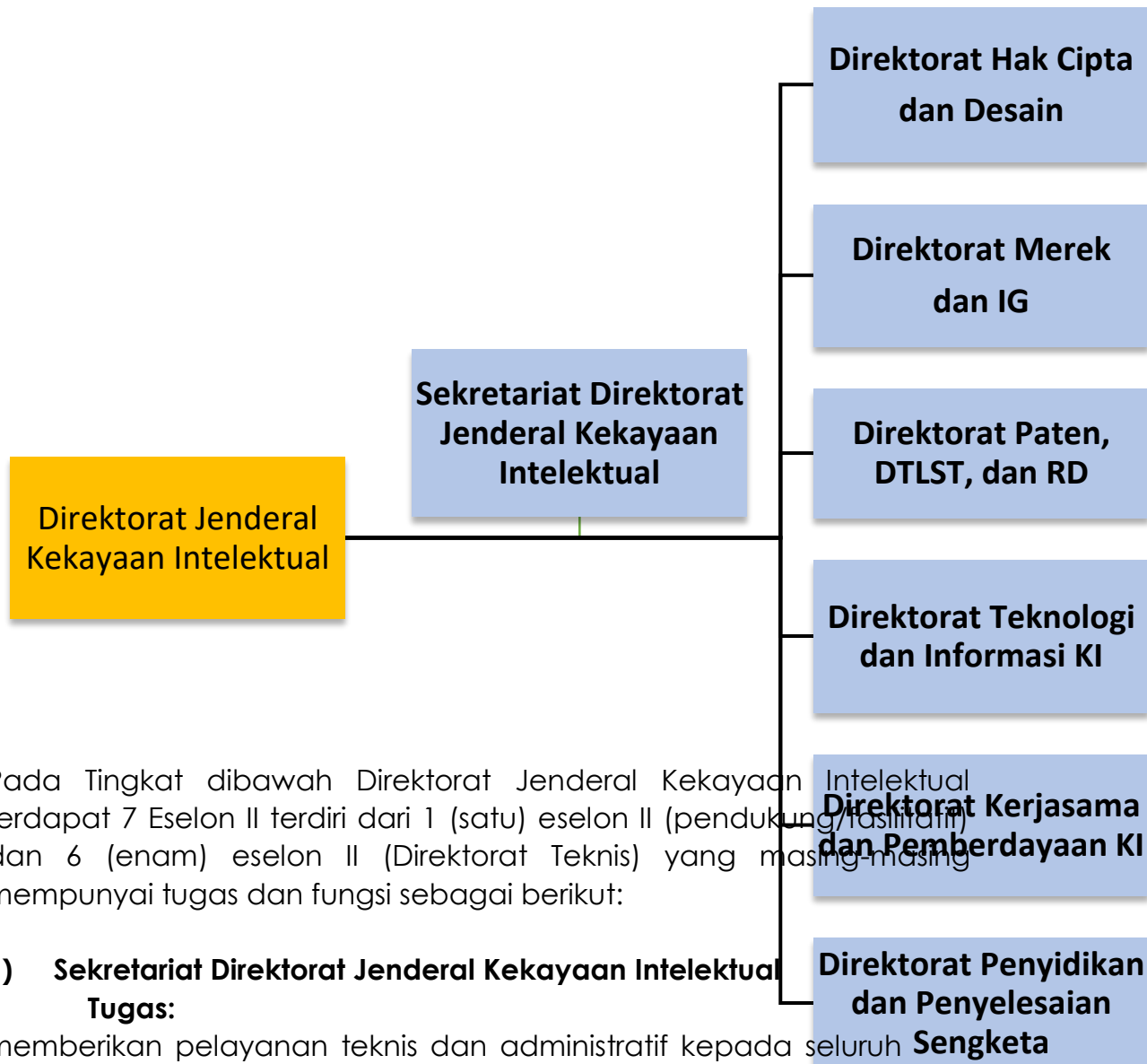
### **STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
- b. Direktorat Cipta dan Desain
- c. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

- d. Direktorat Paten, DTLST dan RD
- e. Direktorat Teknologi dan Informasi KI
- f. Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan KI
- g. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

**Gambar. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat digambarkan pada diagram dibawah ini:**



Pada Tingkat dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terdapat 7 Eselon II terdiri dari 1 (satu) eselon II (pendukung/fasilitasi) dan 6 (enam) eselon II (Direktorat Teknis) yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

**1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual**

**Tugas:**

memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

**Fungsi:**

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan;

- c. fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
- e. pembinaan dan pengelolaan urusan kepegawaian
- f. pembinaan dan pengelolaan urusan keuangan
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaan; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha; hubungan masyarakat, persuratan dan perjalanan dinas.

## **2) Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri**

### **Tugas:**

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait dan desain industri.

### **Fungsi:**

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri;
- c. pelaksanaan pemberian rekomendasi cakram optik dan pengawasan lembaga manajemen kolektif;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

## **3) Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang**

### **Tugas:**

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi dan dokumentasi, klasifikasi dan penelusuran paten,



pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang.

**Fungsi:**

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, klasifikasi, penelusuran, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, klasifikasi, penelusuran, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang;
- c. pelaksanaan fasilitasi komisi banding paten;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permohonan, publikasi dan dokumentasi, klasifikasi, penelusuran, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang; dan
- f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

**4) Direktorat Merek dan Indikasi Geografis**

**Tugas**

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis serta fasilitasi komisi banding merek

**Fungsi:**

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis;
- c. pelaksanaan fasilitasi komisi banding merek;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan dan indikasi geografis;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan dan indikasi geografis; dan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

## **5) Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual**

### **Tugas:**

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan pemberdayaan kekayaan intelektual

### **Fungsi:**

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan pemberdayaan kekayaan intelektual;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerja sama dalam negeri di bidang kekayaan intelektual;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang kekayaan intelektual;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan pemberdayaan potensi kekayaan intelektual, diseminasi dan promosi, penyiapan media diseminasi dan promosi, inventarisasi kekayaan intelektual komunal serta pengelolaan perpustakaan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

## **6) Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual**

### **Tugas:**

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, pemberian layanan bantuan call center, pelayanan data dan informasi kekayaan intelektual serta dukungan infrastruktur teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual

### **Fungsi:**

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang teknologi informasi kekayaan intelektual;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi kekayaan intelektual;
- c. pelaksanaan standarisasi dan proses kerja di bidang teknologi informasi kekayaan intelektual;
- d. pelaksanaan pengembangan portal web dan surat elektronik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
- e. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pemeliharaan database, serta pemantauan keamanan aplikasi dan data kekayaan intelektual;

- f. pelaksanaan pemberian layanan bantuan call center dan dukungan infrastruktur teknologi informasi kekayaan intelektual serta pengelolaan dan pemantauan sistem jaringan;
- g. pelaksanaan pemberian layanan data dan informasi Kekayaan Intelektual; dan;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

## **7) Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa**

### **Tugas:**

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, di bidang penyidikan, pencegahan, penyelesaian sengketa dan evaluasi tindak pidana kekayaan intelektual

### **Fungsi**

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan, pencegahan, dan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan, pencegahan, dan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual;
- c. pelaksanaan urusan administrasi penerimaan pengaduan dan penyusunan data, administrasi penyidikan, penghimpunan dan dokumentasi berkas perkara tindak pidana di bidang kekayaan intelektual;
- d. pelaksanaan koordinasi penyidikan, pemberkasan, pemantauan dan evaluasi penyidikan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan pencegahan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual serta perumusan, pelaksanaan, dan fasilitasi penyelesaian sengketa secara alternatif; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

## **1.3. SISTEMATIKA LAPORAN**

Sistematika penyajian laporan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2021 adalah sebagai berikut:

### **a) IKHTISAR EKSEKUTIF**

disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi

kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi

**b) BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis, mandate dan peran strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tahun 2021

**c) BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis dan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2021, serta pernyataan perjanjian kinerja tahun 2021. Lebih lanjut diuraikan pula mengenai pengukuran kinerja organisasi

**d) BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

▪ Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

▪ Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

▪ Capaian Kinerja Lain

Pada sub bab ini diuraikan achievement Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam upaya penyempurnaan proses bisnis maupun peningkatan layanan publik. Selain itu, juga diuraikan penghargaan yang diperoleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

**e) PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan saran dan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1. RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL 2020-2024**

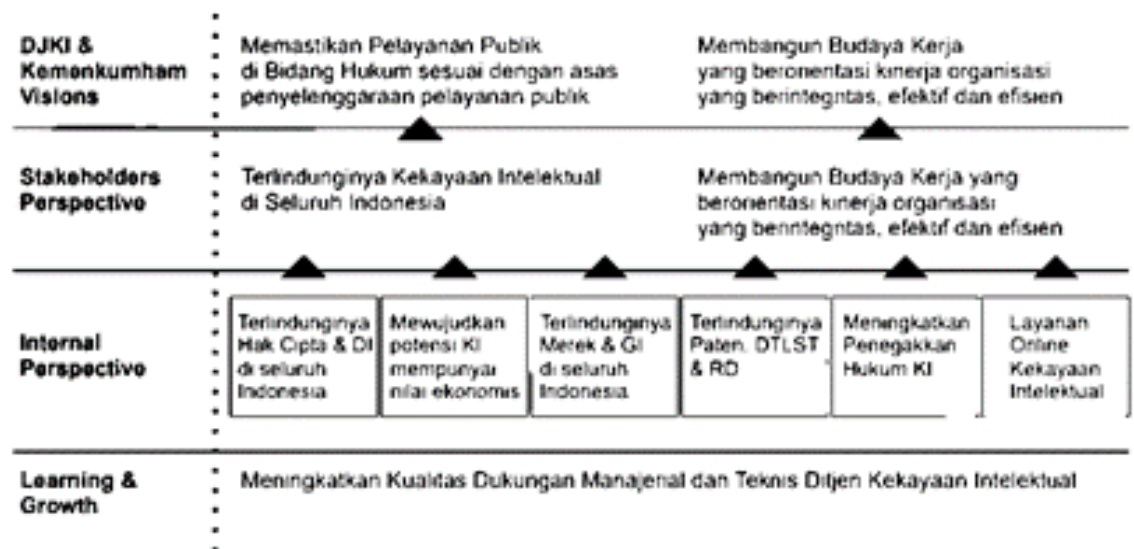
Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2020-2024 merupakan suatu perencanaan jangka

menengah yang menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk 5 tahun kedepan, yang disusun berdasarkan Renstra Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 – 2024. DJKI dalam Perencanaan mempunyai program kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terdiri dari 2 program kerja utama yaitu pelaksanaan program kerja sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 melalui visi misi Presiden yang dituangkan dalam prioritas Nasional yaitu : **1) Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan 2) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.** kedua prioritas tersebut diturunkan sebagai misi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2020-2024 yang kemudian di break down ke dalam perjanjian kinerja masing-masing unit Eselon II di lingkungan DJKI dan yang kedua pelaksanaan Program Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun ini Rencana Strategis DJKI 2020-2024 adalah **penyelenggaraan Pelayanan dan Penegakan Hak Kekayaan Intelektual yang berkualitas** dengan 2 indikator yaitu: 1) meningkatkan layanan kekayaan intelektual yang berkualitas dan 2) mendukung penanganan penegakan dan kesadaran Hukum HKI. Dalam penyusunan sasaran strategis DJKI sudah mengalami banyak perubahan dalam sasaran, sehingga sampai berakhirnya tahun 2021 masih dalam pembahasan, dimana masih banyak perubahan-perubahan dalam sasaran, sehingga penetapan rencana strategis dan perubahan dalam sasaran pun masih dalam tahap pembahasan.

Indikator sasaran pun harus disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Selain itu antara sasaran juga perlu adanya Penetapan Arah kebijakan dimana yang kita ketahui sasaran strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah **Penyelenggaraan Pelayanan dan Penegakan Hak Kekayaan Intelektual yang berkualitas**, dimana kebijakan dapat membantu untuk memastikan keselarasan antara sasaran strategis dengan program-program yang ada. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 dapat digambarkan mulai dari **basic values, internal perspective, stakeholders' perspective, dan visions.** Gambar menjelaskan lebih lanjut mengenai arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2020-2024:

**Gambar 2. Arah Kebijakan dan Strategi DJKI**



## 2.1.2 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL 2020-2024

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2020-2024 atau disebut Renstra Kementerian Hukum dan HAM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. dalam rencana strategis 2020-2024 DJKI

Dalam mewujudkan peran sasaran strategis yang sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM, DJKI mempunyai 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

- Memastikan Pelayanan Publik di bidang Hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik
- Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

Sasaran strategis penyelenggaraan Kekayaan Intelektual merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai selama lima tahun sebagai outcome/impact dari program dan kegiatan yang dilaksanakan. Sasaran strategis ini menjabarkan dengan misi mewujudkan penyelenggaraan Kekayaan Intelektual yang profesional, dalam membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja, berintegritas, efektif dan efisien.

### 2.1.2 Stakeholders Perspective (Perspektif Pemangku Kepentingan)

Sasaran strategis pada hal-hal perspektif yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan dan ekspektasi dari sisi *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Yang harus dilakukan oleh DJKI terdiri dari 2 (dua) sasaran Program, yaitu:

- 1) Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia
- 2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis Teknologi Informasi.

### **2.1.3 Internal Process Perspective (Perspektif Proses Internal)**

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses Internal yang mawadahi serangkaian aktivitas bisnis (proses bisnis) internal, dimana harus mengidentifikasi proses bisnis yang tepat supaya tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai yang harus dilakukan oleh DJKI , yang terdiri dari 6 (enam) yaitu:

- 1) Terlindunginya Hak cipta dan Desain Industri di Seluruh Indonesia dengan 2 indikator kegiatan sebagai berikut:
  - a. Presentase Penyelesaian pencatatan hak cipta
  - b. Presentase penyelesaian permohonan desain industri;
- 2) Mewujudkan potensi Kekayaan Intelektual mempunyai nilai ekonomis, dengan 2 indikator kegiatan sebagai berikut:
  - a. Peningkatan permohonan kekayaan intelektual
  - b. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI
- 3) Terlindunginya Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia, dengan 2 indikator kegiatan sebagai berikut:
  - a. Persentase merek dan indikasi geografis yang dilindungi
  - b. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Merek dan Indikasi Geografis
- 4) Terlindunginya Paten, DTLST, dan RD di seluruh Indonesia, dengan 2 indikator kegiatan sebagai berikut:
  - a. Persentase Peningkatan Paten, DTLST, dan RD yang dilindung
  - b. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Paten, DTLST, dan RD
- 5) Meningkatnya penegakan hukum KI, dengan 2 indikator kegiatan sebagai berikut:
  - a. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual;
  - b. Peningkatan penyelesaian pelanggaran KI secara optimal
- 6) Layanan Online Kekayaan Intelektual, dengan 1 indikator kegiatan sebagai berikut:

Peningkatan Layanan Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual yang Aman dan Handal.

### **2.1.4 Learning and Growth Perspective (Perspektif Pembelajaran dan Tumbuh)**

Unsur *Learning and Growth Perspective* keberadaannya untuk mendorong *perspective* lainnya dengan berbagai elemen berfokus pada pengembangan dan pembelajaran organisasi untuk menjaga *sustainability* atau keberlangsungan dan keberlanjutan organisasi. Sumber utama dari perspektif ini adalah manajemen/sistem organisasi, dan *support* atau *enabling factor* lainnya. Adapun yang harus dilakukan oleh DJKI dalam unsur ini adalah dengan melihat sasaran pada peningkatan Kualitas Dukungan Manajerial dan Teknis DJKI.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) harus memastikan setiap unit eselon II bersinergi menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal dan akuntabel. Hal ini dapat dilihat dari **Internal Process Perspective** yang merupakan proses bisnis internal yang mewadahi serangkaian aktivitas bisnis sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga menentukan dukungan sumber daya yang diperlukan setiap unit yang berupa sumber daya manusia, teknologi, manajemen/sistem organisasi, dan *support* atau *enabling factor* lainnya seperti yang tergambar pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Adapun secara detail sasaran strategis, IKU (Indikator Kinerja Utama) dan target yang diampu oleh DJKI dalam tahun 2021 dapat ditampilkan sebagai berikut.

**Tabel Indikator Kinerja Utama DJKI Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Output Program	Satuan	Target
					2021
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual		Indeks	3.3
			Persentase penyelesaian permohonan KI sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persentase	99
			Persentase peningkatan permohonan KI	Persentase	12
			Persentase penanganan aduan pelanggaran HKI	Persentase	100
			Persentase peningkatan produk KI dan Komunal yang dilindungi	Persentase	6
Membangun Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di lingkungan DJKI	Layanan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien di lingkungan DJKI		Jumlah layanan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien di lingkungan DJKI	1



			Indeks Layanan Manajemen Internal di lingkungan DJKI Kemenkumham	Indeks	76,61
--	--	--	--	--------	-------

## 2.1. Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2021

Penetapan Kinerja DJKI merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### 2.1.1. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2021

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penetapan perjanjian kinerja, merupakan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan kegiatan/program/kebijakan disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja terwujudnya rencana kerja tahunan yang dicapai berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Berikut Penetapan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia:

**Tabel (i) Sasaran Program dan Target dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2021**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
1	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seuruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perlindungan Kekayaan Intelektual	3.3
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Kekayaan Intelektual	Jumlah layanan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien di lingkungan DJKI	1

**Tabel (ii) Output Program dan Target dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2021**

NO.	OUTPUT PROGRAM	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI	TARGET
1	Penegakan dan Pelayanan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual	Persentase Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Persentase penyelesaian permohonan KI sesuai dengan peraturan yang berlaku (Jumlah penyelesaian permohonan KI yang diselesaikan dalam jangka waktu yang sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di tahun berjalan (2021) dibagi dengan jumlah permohonan KI yang masuk di tahun berjalan (2021) dikali 100%)	99%
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual	Jumlah permohonan KI yang masuk pada tahun berjalan (2021) dikurangi jumlah permohonan KI yang masuk di tahun baseline (2019) dibandingkan dengan Jumlah permohonan KI yang masuk pada tahun baseline (2019) dikali 100%	12
		Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	Persentase aduan yang ditangani	100%
		Persentase Peningkatan Produk Kekayaan Intelektual dan Komunal yang Dilindungi (Prioritas Nasional)	Penyelesaian permohonan KI pada tahun berjalan (2021) dikurangi penyelesaian permohonan KI pada tahun dasar/baseline (2019) dibagi capaian pada tahun dasar/baseline (2019) dikali 100%. *NB: khusus untuk produk KI Komunal yang dilindungi, <i>baseline</i> nya adalah tahun 2020 sebagai tahun pertama Program Prioritas Nasional untuk inventarisasi pada Pusat Data Nasional KIK.	6%
2	Layanan Manajemen Internal Kementerian Hukum dan HAM	Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Ditjen Kekayaan Intelektual	Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Ditjen Kekayaan Intelektual	76,6

**Tabel (iii) Kegiatan dan Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2021**

No.	Kegiatan	Anggaran
	<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>Rp. 254.568.954.000,00</b>
1	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	Rp. 4.541.686.000,00
2	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	Rp. 22.000.000.000,00
3	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	Rp. 6.445.914.000,00
4	Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Rp. 7.089.870.000,00
5	Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	Rp. 4.005.607.000,00
6	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	Rp. 180.000.000.000,00
7	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 30.485.877.000,00
	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 297.110.514.000,00</b>
8	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual	Rp. 297.110.514.000,00
	<b>Total</b>	<b>Rp 551.679.468.000,00</b>

**Perjanjian Kinerja pada Unit Eselon II DJKI**

Rincian indikator keluaran kegiatan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja oleh masing-masing Unit Eselon II di lingkungan DJKI pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Formulasi (Output)	Target	Anggaran
<b>Program : Pembinaan/penyelenggaraan kekayaan intelektual</b>	Terlindunginya Hak Cipta dan Desain Industri di Seluruh Indonesia	Persentase penyelesaian pencatatan Hak Cipta	Persentase pencatatan hak cipta yang telah memperoleh kepastian hukum	100%	Rp. 4.005.607.000,00
		Persentase penyelesaian permohonan Desain Industri	Persentase permohonan desain industri yang telah memperoleh kepastian hukum	100%	
		Persentase Rekomendasi pelayanan hukum di bidang hak cipta dan desain industri	Persentase penyelesaian rekomendasi hukum yang diajukan pihak lain terkait dengan Hak Cipta dan Desain Industri yang dapat berupa : - Layanan hukum bidang Cipta dan desain industri - Keberatan atas putusan	100%	

leng gara	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Formulasi (Output)	Target	Anggaran
			penolakan DI - Panggilan sidang/pemberian keterangan sebagai saksi ahli		
	Mewujudkan potensi KI yang mempunyai nilai ekonomis	Persentase peningkatan permohonan KI	Persentase kenaikan permohonan KI (baseline jumlah permohonan tahun dasar/tahun 2019)	12%	Rp. 22.000.000.000,00
		Persentase peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI	Jumlah stakeholder yang diharapkan memiliki pemahaman terkait KI sebagai hasil dari kegiatan sosialisasi dan diseminasi terkait KI yang dilakukan oleh DJKI dalam rangka pemberdayaan kekayaan intelektual = capaian jumlah stakeholder yang terdiseminasi- tersosialisasi di tahun 2021/ target stakeholder yang terdiseminasi- tersosialisasi di tahun 2021 x 100% = X% (X% x 50% = XX Stakeholder)	50%	
	Terlindungi Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia	Persentase merek dan indikasi geografis yang dilindungi	Persentase peningkatan jumlah penyelesaian merek dan indikasi geografis (dari angka <i>baseline</i> di tahun dasar/tahun 2019)	12%	Rp. 6.445.914.000,00
		Persentase penyelesaian rekomendasi pelayanan hukum di bidang Merek	Jumlah rekomendasi hukum yang diberikan kepada pihak yang meminta dibagi	100%	

leng gara	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Formulasi (Output)	Target	Anggaran
		dan Indikasi Geografis	rekomendasi hukum yang diajukan pada tahun berjalan dikali 100%		
	Terlindunginya Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang di seluruh Indonesia	Persentase peningkatan Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang di seluruh Indonesia	Jumlah dokumen permohonan Paten, DTLST, dan RD yang memperoleh kepastian hukum di tahun 2021 dibagi Jumlah dokumen permohonan Paten, DTLST, dan RD yang memperoleh kepastian hukum di tahun dasar/tahun baseline di 2019 x 100%	12%	Rp. 7.089.870.000,00
		Persentase penyelesaian rekomendasi hukum pelayanan hukum terkait Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang	Jumlah rekomendasi hukum terkait Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang yang diberikan kepada pihak yang meminta dibagi rekomendasi hukum yang diajukan pada tahun berjalan dikali 100%	100%	
	Terwujudnya penanganan dan penyelesaian sengketa HKI yang optimal	Persentase penanganan aduan pelanggaran HKI	Jumlah penanganan atas aduan pelanggaran HKI selama tahun 2021 dibagi jumlah aduan atas pelanggaran HKI yang disampaikan kepada DJKI	100%	Rp. 4.005.607.000,00
		Persentase penyelesaian sengketa HKI secara optimal	Jumlah penyelesaian sengketa HKI di tahun berjalan (SP3,P21) dibagi jumlah kasus pelanggaran HKI	60%	

leng gara	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Formulasi (Output)	Target	Anggaran
			yang masih berjalan		
	Terwujudnya sistem Manajemen Data Informasi dan Pelayanan KI yang berbasis IT yang sistematis, efektif, handal dan berkelanjutan	Peningkatan layanan Teknologi Informasi KI yang aman dan handal	Persentase pemberian layanan Teknologi Informasi KI yang aman dan handal yang meliputi seluruh kegiatan layanan system informasi, pemeliharaan, pengembangan dan pembangunan sistem teknologi informasi kekayaan intelektual di tahun 2021	99%	Rp. 180.000.000.000,00
	Terwujudnya Sekretariat DJKI yang responsive, efektif, dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi DJKI	Nilai Indeks	87	Rp. 297.110.514.000,00
Survei Kepuasan Masyarakat atas layanan DJKI		Nilai Indeks	3,02 (skala maksimum 4)		
Nilai SAKIP DJKI "Baik"		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja DJKI	77		
Nilai perencanaan anggaran DJKI berorientasi pada hasil SMART DJA		Nilai SMART DJKI	92		
Nilai IKPA DJKI		Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran	98		

#### 2.1.4 Program Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang diampu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Melalui keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-12.PR.01.03 Tahun 2020 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 yang diampu oleh masing-masing unit eselon I salah satunya Direktorat Jenderal Kekayaan yang mengampu 8 (delapan) target kinerja dengan rincian sebagai berikut :

No	Target Kinerja	Target	Data Dukung
1	Gerakan Tahun Paten Nasional	B03 : Persiapan kegiatan peningkatan pemahaman masyarakat terkait KI	Laporan Rencana kegiatan virtual meeting : 1. Target perguruan

		dengan menggunakan virtual meeting/webinar/social media dan pembentukan program-program yang berkesinambungan	tinggi, Litbang/sentra KI/instansi pendidikan sejenis 2. Rencana Narasumber 3. Timeline 4. SK TIM Kegiatan
		B06 : 1. Virtual/webinar terkait kasus paten di Indonesia patent classification 2. Virtual/webinar terkait bimbingan teknis garis besar patent drafting 3. One Day Patent Drafting (jika Pandemi Selesai)	Laporan kegiatan dan jumlah peserta/responden
		B09 : Pendampingan menuju kemandirian Paten	Laporan kegiatan dan jumlah peserta/responden
		B12 : Monitoring dan Evaluasi kegiatan virtual/webinar terkait Paten	Laporan Monitoring dan Evaluasi
2	Layanan Permohonan KI		
	Ukuran Keberhasilan 1: Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Paten sesuai Peraturan Perundang - Undangan dan Penyelesaian Backlog	B03 : 1. Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Paten 2.500 2. Jumlah Penyelesaian Backlog 300	Nota Dinas Laporan Penyelesaian Pertriwulan
		B06 : 1. Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Paten 4.500 2. Jumlah Penyelesaian Backlog 600	Nota Dinas Laporan Penyelesaian Pertriwulan
		B09 : 1. Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Paten 6.750 2. Jumlah Penyelesaian Backlog 900	Nota Dinas Laporan Penyelesaian Pertriwulan
		B12 : 1. Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Paten 9.000 2. Jumlah Penyelesaian Backlog 1.200	Nota Dinas Laporan Penyelesaian Pertriwulan
	Ukuran Keberhasilan 2: Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Merek sesuai Peraturan Perundang-Undangan	B03 : Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Merek 15.000	Nota Dinas Laporan Penyelesaian Pertriwulan
		B06 : Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Merek 20.000	Nota Dinas Laporan Penyelesaian Pertriwulan
		B09 : Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Merek 20.000	Nota Dinas Laporan Penyelesaian Pertriwulan
		B12 : Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Merek 20.000	Nota Dinas Laporan Penyelesaian Pertriwulan
	Ukuran Keberhasilan 3: Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis sesuai Peraturan Perundang-Undangan.	B03 : N/A	N/A
		B06 : Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis sebanyak 2 Indikasi Geografis	Nota Dinas Laporan Penyelesaian Pertriwulan
		B09 : Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis sebanyak 3 Indikasi Geografis	Nota Dinas Laporan Penyelesaian Pertriwulan
		B12 : Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis sebanyak 3 Indikasi Geografis	Nota Dinas Laporan Penyelesaian Pertriwulan
	Ukuran Keberhasilan 4: Jumlah Penyelesaian Permohonan	B03 : 1. Jumlah Penyelesaian Pencatatan Ciptaan 9.000 2. Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Desain Industri 850	Nota Dinas Laporan Penyelesaian Pertriwulan
		B06 : 1. Jumlah Penyelesaian	Nota Dinas Laporan Penyelesaian



	Pencatatan Ciptaan dan Permohonan Pendaftaran Desain Industri Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Pencatatan Ciptaan 9.000 2. Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Desain Industri 790	Pertriwulan
		B09 : 1. Jumlah Penyelesaian Pencatatan Ciptaan 9.000 2. Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Desain Industri 790	Nota Dinas Laporan Penyelesaian Pertriwulan
		B12 : 1. Jumlah Penyelesaian Pencatatan Ciptaan 10.720 2. Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Desain Industri 790	Nota Dinas Laporan Penyelesaian Pertriwulan
3	Ekstensifikasi kerja sama luar negeri dan dalam negeri di bidang KI untuk memaksimalkan kinerja DJKI	B03 : Pembahasan rekomendasi optimalisasi Perjanjian Kerja Sama di Bidang Kekayaan Intelektual	Laporan Pembahasan rekomendasi optimalisasi Perjanjian Kerja Sama di Bidang Kekayaan Intelektual
		B06 : Penyusunan rekomendasi optimalisasi Perjanjian Kerja Sama di Bidang Kekayaan Intelektual	Laporan rekomendasi optimalisasi Perjanjian Kerja Sama di Bidang Kekayaan Intelektual
		B09 : Pelaksanaan Implementasi Kerja sama Kekayaan Intelektual atau pembentukan kerja sama baru di bidang kekayaan intelektual	Laporan Pelaksanaan Implementasi Kerja sama Kekayaan Intelektual atau pembentukan kerja sama baru di bidang kekayaan intelektual
		B12 : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Implementasi Kerja sama Kekayaan Intelektual	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Implementasi Kerja sama Kekayaan Intelektual
4	Modernisasi sistem penyidikan dan penyelesaian sengketa KI melalui pengembangan skema pencegahan		
	Ukuran Keberhasilan 1: Terbangunnya sistem pengaduan yang handal dengan didukung fasilitas (mediasi online)	B03 : Koordinasi dengan APH dan Penyusunan Rencana Kegiatan Pencegahan berdasarkan Peta Pelanggaran KI (Lokasi, Konten Edukasi, dan Metode Pelaksanaan Kegiatan)	Laporan Koordinasi dan Rencana Kegiatan Pencegahan 2021
		B06 : pelaksanaan kegiatan Pecegahan di B06 (kota A,B,C, dll)	Laporan pencegahan pelanggaran
		B09 : pelaksanaan kegiatan Pecegahan di B09 (kota D,E,F, dll) dan Update Peta Pelanggaran KI wilayah tahun 2021	Laporan pencegahan pelanggaran KI dan Laporan Update peta pelanggaran KI
		B12 : Monitoring Evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran KI	Laporan Monitoring dan Evaluasi pencegahan pelanggaran KI tahun 2021
	Ukuran Keberhasilan 2: Terwujudnya mediator yang berkualitas	B03 : Analisa kebutuhan ASN Ditjen KI di Unit Pusat untuk memperoleh pengembangan kompetensi mediasi	Laporan analisa kebutuhan
		B06 : Pelatihan PPNS untuk pengembangan kompetensi mediasi	Laporan kegiatan pelatihan
5	Penelusuran Data Kekayaan	B03 : Hasil cleansing data yang diambil dari aplikasi IPROline sebelum	Dokumentasi Pelaksanaan Cleansing Data dari IPROline

	Intelektual (PDKl) melalui web PDKl yang <i>mobile friendly</i>	ditampilkan di PDKl	
		B06 : Dokumen hasil Cleansing data dari aplikasi Iproline yang ditampilkan di PDKl	Dokumen hasil Cleansing data dari aplikasi Iproline yang ditampilkan di PDKl
		B09 : Dokumen UAT untuk user internal DJKI yang menggunakan aplikasi PDKl	Dokumen UAT untuk user internal DJKI yang menggunakan aplikasi PDKl
		B12 : Dokumen UAT untuk user dari eksternal DJKI yang menggunakan aplikasi PDKl	Dokumen UAT untuk user dari eksternal DJKI yang menggunakan aplikasi PDKl
6	e-sertifikat memudahkan masyarakat mencetak sertifikat secara mandiri	B03 : Analisa kebutuhan aplikasi e-sertifikat	Laporan Analisa kebutuhan aplikasi e-sertifikat
		B06 : Rancangan aplikasi e-sertifikat	Laporan Rancangan aplikasi e-sertifikat
		B09 : Pelaksanaan uji testing aplikasi e-sertifikat	Laporan Pelaksanaan uji testing aplikasi e-sertifikat
		B12 : Sosialisasi aplikasi e-sertifikat	Laporan Sosialisasi aplikasi e-sertifikat
7	Pembentukan klinik-klinik konsultasi, analisis dan rekomendasi terkait KI	B03 : Rapat koordinasi pembentukan klinik KI	Laporan Rapat koordinasi pembentukan klinik KI
		B06 : Kajian pembentukan klinik KI	Draft Kajian pembentukan klinik KI
		B09 : Kajian pembentukan klinik KI	Laporan Kajian pembentukan klinik KI
		B12 : Penentuan rekomendasi <i>pilot project</i>	Laporan rekomendasi <i>pilot project grand launching</i>
8	Peningkatan kapasitas SDM DJKI di Unit Pusat dan wilayah melalui implementasi <i>Corporate University</i>		
	Ukuran keberhasilan 1: ASN Ditjen KI di Unit Pusat memperoleh pendidikan, pelatihan dan kesempatan berkantor di WIPO	B03 : Upaya mendorong ASN Ditjen KI memperoleh kesempatan berkantor di WIPO	Laporan kegiatan dalam Upaya mendorong ASN Ditjen KI memperoleh kesempatan berkantor di WIPO
		B06 : Upaya mendorong ASN Ditjen KI memperoleh kesempatan berkantor di WIPO	Laporan kegiatan dalam Upaya mendorong ASN Ditjen KI memperoleh kesempatan berkantor di WIPO
	Ukuran Keberhasilan 2: ASN Ditjen KI di Unit Pusat dan Wilayah memperoleh ToT lanjutan tentang KI tingkat lanjut	B03 : Analisa kebutuhan ASN Ditjen KI di Unit Pusat dan Wilayah untuk memperoleh pendidikan pelatihan	Laporan Analisa kebutuhan ASN Ditjen KI di Unit Pusat dan Wilayah untuk memperoleh pendidikan pelatihan
		B06 : Peningkatan kapasitas ASN Ditjen KI di Unit Pusat dan Wilayah	Laporan Workshop/Bimtek /Sosialisasi Peningkatan kapasitas ASN Ditjen KI di Unit Pusat dan Wilayah

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tahun 2021 didasarkan pada perencanaan program kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yaitu Rencana Strategis yang didokumentasikan dalam perjanjian kinerja Eselon I kemudian diturunkan melalui perjanjian kinerja Eselon II dan Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM.

**3.1.1 Capaian Sasaran Program**

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang memiliki jumlah SDM sebanyak 581 orang ASN (termasuk 1 Orang Eselon I dan 7 orang Eselon II) telah melaksanakan tugasnya dengan didasarkan atas sasaran program berupa '**Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia**' berikut indikator kinerjanya. Adapun berikut disampaikan capaian atas sasaran program DJKI pada tahun anggaran 2021.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Output Program	Formulasi Penghitungan	Satuan	Target	Capaian	Target	Target	Target
					2021	2021	2022	2023	2024
Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual		Nilai indeks kepuasan masyarakat atas layanan Kekayaan Intelektual di tahun 2021	Indeks	3.3	3.39	3.32	3.34	3.36
		Persentase penyelesaian permohonan KI sesuai dengan peraturan yang berlaku	Jumlah penyelesaian permohonan KI yang diselesaikan dalam jangka waktu yang sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di tahun berjalan (2021) dibagi dengan jumlah permohonan KI yang masuk di tahun berjalan (2021) dikali	Persentase	99%	81,64%	99%	99%	99%

			100%						
		Persentase peningkatan permohonan KI	Jumlah permohonan KI yang masuk pada tahun berjalan (2021) dikurangi jumlah permohonan KI yang masuk di tahun baseline (2019) dibandingkan dengan Jumlah permohonan KI yang masuk pada tahun baseline (2019) dikali 100%	Persentase	12%	21,45%	15%	17%	20%
		Persentase penanganan aduan pelanggaran HKI	Jumlah aduan pelanggaran HKI yang ditangani/ditindaklanjuti di tahun berjalan (2021) dibagi dengan jumlah aduan pelanggaran HKI yang masuk di tahun berjalan (2021)	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase peningkatan produk KI dan Komunal yang dilindungi	Penyelesaian permohonan KI pada tahun berjalan (2021) dikurangi penyelesaian permohonan KI pada tahun dasar/baseline (2019) dibagi capaian pada tahun	Persentase	6%	27,38%	7%	8%	9%

			dasar/baseline (2019) dikali 100%. *NB: khusus untuk produk KI Komunal yang dilindungi, <i>baseline</i> nya adalah tahun 2020 sebagai tahun pertama Program Prioritas Nasional untuk inventarisasi pada Pusat Data Nasional KIK.						
<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di lingkungan DJKI</b>	Layanan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan DJKI		Jumlah layanan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien di lingkungan DJKI	Layanan	1	1	1	1	1
		Indeks Layanan Manajemen Internal di lingkungan DJKI Kemenkumham	Nilai indeks layanan manajemen internal DJKI di tahun 2021	Indeks	76,61	76,61 (100%)			

**NB:** Adapun yang menjadi tahun dasar/tahun *baseline* adalah tahun terakhir pada periode Renstra sebelumnya (Renstra 2014-2019), dalam hal ini adalah tahun 2019 sebagai tahun dasar dari penghitungan untuk Periode Renstra Selanjutnya (Renstra 2020-2024).

#### **a. Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Kekayaan Intelektual”**

Capaian indikator kinerja ini dicapai melalui Kegiatan Survey IKM yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan KI. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan KI di tahun 2021 mencapai nilai indeks **3,39**. Angka ini melebihi dari target indeks yang ditetapkan di tahun 2021 yaitu 3,3. Angka

indeks ini juga mengalami peningkatan capaian dimana tahun sebelumnya yaitu 2020 IKM untuk layanan KI mencapai 3,28.

Capaian 2020	Capaian 2021
3,28	3,39

Hasil survei ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan dan peningkatan kualitas mutu kinerja. kegiatan IKM dilakukan melalui riset kualitatif (FGD atau in depth interview). Survei IKM dilakukan pada 8 wilayah yaitu: Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Bali, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan setiap tahunnya yang ditentukan berdasarkan range banyaknya permohonan KI dari wilayah tersebut. Survei indeks kepuasan masyarakat dilaksanakan oleh DJKI bersama dengan pihak ke-3 di luar Kementerian Hukum dan HAM yaitu dengan Konsultan Independen berskala Nasional yang biasa melakukan survey atas layanan kepuasan masyarakat dari suatu lembaga pemerintah dan non pemerintah yaitu Katadata Insight Center, berdasarkan PERMEN PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik, semua unit pelayanan instansi pemerintah baik yang langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.

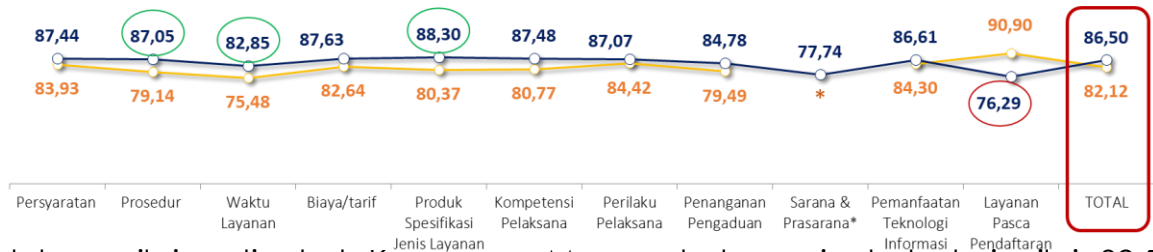
Pendekatan Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN-RB tersebut, ada 9 (sembilan) unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat. Namun untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, pada survei ini menggunakan 11 unsur kepuasan masyarakat, yakni:

- Persyaratan
- Prosedur
- Waktu Pelayanan
- Biaya/Tarif
- Produk spesifikasi jenis pelayanan
- Kompetensi Pelaksana
- Perilaku Pelaksana
- Sarana Layanan
- Penanganan pengaduan, saran dan masukan
- pemanfaatan TI
- layanan Pasca Pendaftaran KI

Survei ini menargetkan 800 responden, namun pada pelaksanaannya berhasil mendapatkan sebanyak **1.089 responden**. Sehingga dengan jumlah responden tersebut, *margin of error* yang diperoleh adalah sebesar  $\pm 2,97\%$  pada interval kepercayaan 95%. Jumlah responden terbanyak yakni Jawa

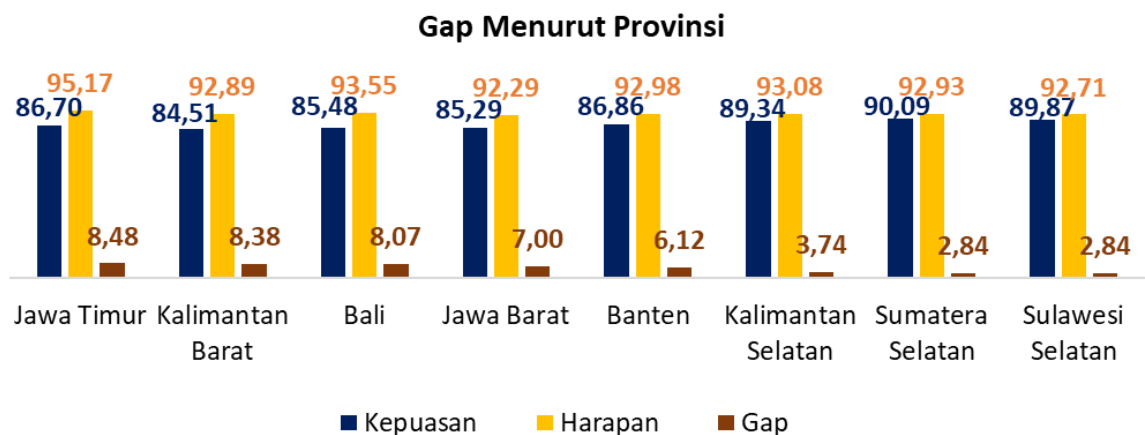
Barat dan Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan jumlah pemohon yang memang lebih banyak pada wilayah tersebut.

Hasil survei indeks kepuasan Masyarakat, pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dapat digambarkan sebagai berikut:



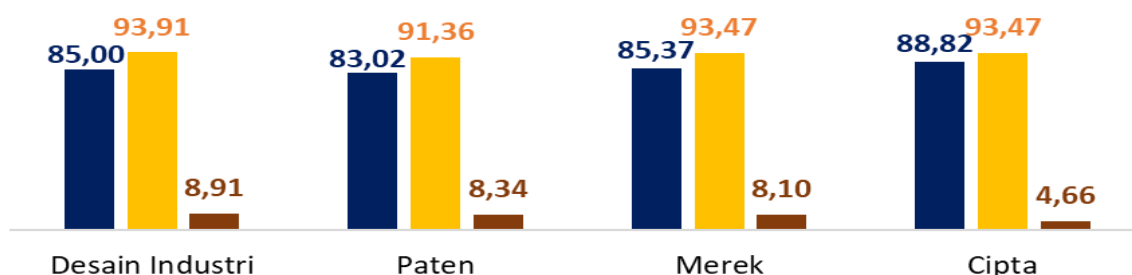
Untuk penilaian tingkat Kepuasan Masyarakat meningkat dari nilai 82,12 (ekuivalen dengan 3.28 dari skala 4) pada tahun 2020 menjadi 86,50 (ekuivalen dengan 3.39 dari skala 4) di tahun 2021.

**Peningkatan tertinggi** adalah parameter **prosedur layanan, waktu layanan** dan **produk spesifikasi jenis layanan**. Hanya indeks kepuasan parameter **layanan pasca pendaftaran KI** terlihat cukup menurun dibandingkan tahun sebelumnya selain itu survei IKM dilakukan untuk melihat antara kepuasan, harapan dan GAP (Kesenjangan Antara Persepsi dan Harapan) yang dihasilkan pada setiap pemohon layanan KI, yang dapat digambarkan sebagai berikut:



hasil analisa dari jenis permohonan, bahwa Posisi 4 teratas provinsi dengan nilai gap tertinggi adalah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bali, dan Jawa Barat, dimana permohonan di wilayah tersebut relatif lebih kritis dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap layanan permohonan KI, dibandingkan pemohon di provinsi lainnya. sedangkan menurut jenis permohonan

### Gap Menurut Jenis Permohonan



dengan melihat grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa pemohon dengan kategori Desain Industri, Paten, dan Merek memiliki nilai *gap* tertinggi yakni di atas 8,00. Sementara kategori Cipta nilai *gap*-nya cukup rendah yakni sebesar 4,66.

### Capaian Output Program

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa capaian pada indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Kekayaan Intelektual” program ini memiliki 4 (empat) output program yang terdiri dari:

#### 1) Persentase penyelesaian permohonan KI sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Jenis Layanan	Permohonan KI 2020	Penyelesaian Permohonan KI 2020	Permohonan KI 2021	Penyelesaian Permohonan KI 2021
Hak Cipta	57.814	55.678	83.078	83.810
Desain Industri	3.967	3.270	4.366	4.127
Merek & Indikasi Geografis (IG)	116.571	236.524 (236.517 Merek dan 7 IG)	96.313 (96.285 Merek, 28 IG)	155.853 (155.845 Merek, 8 IG)
Paten	10.858	12.509	12.473	14.610
total	189.210	307.981	196.230	258.400

Data permohonan dan penyelesaian permohonan KI di tahun dasar (2019) adalah sebagai berikut:

Jenis Layanan	Total Permohonan KI 2019	Total Penyelesaian Permohonan KI 2019
Hak Cipta	42.768	42.768
Desain Industri	4.361	5.313
Merek & Indikasi Geografis (IG)	101.830	137.676
Paten	12.606	18.658
total	161.565	203.319

Jenis Layanan	Permohonan KI tahun 2021	Penyelesaian Backlog tahun 2021	Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di tahun 2021
Hak Cipta	83.078	N/A (tidak ada backlog)	83.810



Desain Industri	4.366	N/A (tidak ada backlog)	4.127
Merek	96.285	95.834	60.011
Paten	12.473	2.340	12.270
<b>total</b>	<b>196.230</b>	98.174	<b>160.218</b>

Adapun jumlah penyelesaian capaian pada output program ini memiliki komponen penghitungan sebagaimana yang disajikan pada table di atas berupa:

**“Jumlah penyelesaian permohonan KI yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di tahun berjalan (2021) dibagi jumlah permohonan KI di tahun berjalan (2021) x 100%”**

$$\text{=====}$$

$$(160.218 \text{ dokumen} : 196.230 \text{ dokumen}) \times 100\% = (xxx) : 0,8164 \times 100\% =$$

$$\mathbf{81,64\%} \text{ (capaian di tahun 2021).}$$

Capaian di tahun 2021 untuk output program di atas yaitu 81,64% memang masih berada di bawah target capaian yang menetapkan sejumlah 99% penyelesaian permohonan KI yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun belum tercapainya target tersebut banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti banyaknya pemeriksa KI yang mengalami sakit akibat pandemic COVID mengingat periode selama tahun 2021 terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang sangat signifikan, sehingga menyebabkan produktivitas sedikit menurun. Namun capaian tersebut tetap harus diapresiasi mengingat secara jumlah keseluruhan proses penyelesaian permohonan KI yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengalami kenaikan jika dibanding tahun sebelumnya dan penyelesaian *backlog* (tunggakan pekerjaan) mengalami penurunan sisa *backlog*.

## 2) Persentase peningkatan permohonan KI;

Persentase peningkatan permohonan KI merupakan *progress* persentase permohonan KI di tahun berjalan (tahun pertanggungjawaban LKIP) dibandingkan jumlah permohonan KI di tahun *baseline* yaitu tahun 2019, mengingat 2019 merupakan tahun terakhir dari periode renstra sebelumnya. Sehingga di akhir periode renstra 2020-2024 dapat dilihat sejauh mana progress dari pertumbuhan permohonan KI yang diajukan kepada DJKI. Capaian pada output program ini memiliki komponen penghitungan sebagaimana yang disajikan pada table di atas berupa:

Jenis Layanan	Total Permohonan KI 2020	Total Permohonan KI 2021
Cipta	57.814	83.078
DI	3.967	4.366
Merek & IG	116.571	96.313 (96.285 Merek,

		28 IG)
Paten	10.858	12.473
total	189.210	<b>196.230</b>

<b>Jenis Layanan</b>	
<b>Total Permohonan KI 2019</b>	
Cipta	42.768
DI	4.361
Merek&IG	101.830
Paten	12.606
total	161.565

Adapun capaian pada tahun 2021 untuk output program ini adalah:  
**“Jumlah permohonan KI yang masuk pada tahun berjalan (2021) dikurang jumlah permohonan KI yang masuk pada tahun dasar/tahun baseline (2019) dibagi jumlah permohonan KI tahun dasar/baseline (tahun 2019) dikali 100%.”**

---


$$(196.230 - 161.565) : 161.565 \times 100\% = 34.655 : 161.565 = 0,2145 \times 100\% = \mathbf{21,45\%}$$

Capaian pada output program ini jauh melebihi target yang ditetapkan untuk dicapai di tahun 2021 yaitu 12%. Adapun pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 telah tercapai progress peningkatan permohonan dari tahun baseline (2019) adalah 17,11% dari target 7% yang ditetapkan pada target capaian di 2020. Sedangkan jika dilihat progress peningkatan permohonan KI yang masuk di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 terdapat peningkatan sebesar 4,34%. Adapun justifikasi dari terlampauinya target capaian kinerja dipengaruhi beberapa faktor, misalnya terkait dengan optimalisasi layanan TI pada seluruh layanan penerimaan permohonan KI (permohonan KI sudah mulai berjalan secara efektif melalui IPROline). Selain itu adanya tingkat animo masyarakat dalam mendaftarkan KI terutama dari rezim Hak Cipta yang memiliki jumlah peningkatan secara signifikan. Kiranya capaian ini juga dapat mencerminkan bahwa penyediaan layanan permohonan KI dapat dikatakan cukup dikenal dan memuaskan masyarakat pengguna layanan KI hal ini nanti dapat dilihat pada capaian yang terkait pada Indeks Kepuasan Masyarakat.

### **3) Persentase penanganan aduan pelanggaran HKI;**

Adapun jumlah penyelesaian capaian pada output program ini memiliki komponen penghitungan sebagaimana yang disajikan pada table di atas berupa:

**“Jumlah aduan pelanggaran HKI yang ditangani/ditindaklanjuti di tahun berjalan (2021) dibagi dengan jumlah aduan pelanggaran HKI yang masuk di tahun berjalan (2021)”**

---

*Pada tahun 2021 terdapat 111 (seratus sebelas) aduan pelanggaran HKI yang masuk dan ditangani atau ditindaklanjuti dan dari jumlah tersebut semuanya telah dilakukan tindak lanjut/ditangani sehingga formulasi penghitungan capaian output program di atas adalah:*

$$111:111 \times 100\% = 100\%$$

Sehingga dapat dikatakan bahwa capaian atas output program penanganan aduan pelanggaran HKI telah mencapai hasil yang optimal pada tahun 2021 yaitu 100%. Adapun jika dibanding persentase capaian di tahun sebelumnya maka pada tahun 2020 juga sama-sama mencatatkan 100% untuk tindak lanjut atau penanganan atas aduan yang disampaikan, namun secara kumulatif jumlah di tahun 2020 hanya terdapat 30 aduan pelanggaran. Sehingga capaian di tahun 2021 untuk output program di atas secara jumlah kumulatif melebihi capaian di banding tahun 2020. Capaian ini dapat terlaksana tidak terlepas dari kegiatan sosialisasi, edukasi, dan himbaun yang lebih masif terkait pencegahan pelanggaran HKI sehingga dapat meningkatkan awareness masyarakat atas perlunya perlindungan HKI dan mendorong partisipasi masyarakat untuk melaporkan dugaan atas pelanggaran HKI dalam hal terjadi dugaan atau kemungkinan terjadinya pelanggaran atas HKI kepada DJKI.

#### **4) Persentase peningkatan produk KI dan KI Komunal yang dilindungi**

Penyelesaian permohonan KI termasuk penyelesaian permohonan KI Konvensional yang dimiliki secara privat (Hak Cipta, Desain Industri, Merek, Paten) dan KI Komunal yang dimiliki atau diemban secara komunal (Indikasi Geografis, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik). Sehingga perhitungan atas capaian pada output program tersebut adalah sebagai berikut:

o Produk KI Konvensional

(Penyelesaian permohonan KI Konvensional yang dimiliki secara privat) = **258.392**

o Produk KI Komunal

(Permohonan IG yang mendapat Kepastian hukum (8) + KI Komunal yang Tervalidasi (595) = **603**

**Total produk KI dan KI Komunal yang dilindungi = 258.995**

Sedangkan khusus untuk data terkait Kekayaan Intelektual Komunal yang telah tervalidasi pada Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal di tahun 2021 mencapai 595 data yang telah tervalidasi, sedangkan di tahun 2020 tercatat data KIK sebanyak 201 yang telah tervalidasi. Jadi ada peningkatan perlindungan atas inventarisasi data KIK yang dilindungi oleh negara melalui Pusat Data Nasional KIK sebagai salah satu program prioritas nasional pembangunan yang diemban oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Sedangkan terkait dengan Indikasi Geografis (IG), walaupun IG memiliki sistem perlindungan yang hampir sama dengan sistem KI Konvensional (seperti merek) yaitu melalui pendaftaran IG, namun kepemilikan atas produk IG dimiliki secara komunal. Sehingga produk IG terdaftar juga termasuk di dalam produk KI Komunal yang dilindungi.

Jenis Layanan	Permohonan KI 2020	Penyelesaian Permohonan KI 2020	Permohonan KI 2021	Penyelesaian Permohonan KI 2021
Hak Cipta	57.814	55.678	83.078	83.810
Desain Industri	3.967	3.270	4.366	4.127
Merek & Indikasi Geografis (IG)	116.571	236.524 (236.517 Merek dan 7 IG)	96.313 (96.285 Merek, 28 IG)	155.853 (155.845 Merek, 8 IG)
Paten	10.858	12.509	12.473	14.610
total	189.210	<b>307.981 (307.974 KI Konvensional, 7 produk IG terdaftar sebagai KI Komunal)</b>	196.230	<b>258.400 (258.392 KI konvensional 8 Produk IG sebagai KI Komunal)</b>

Data permohonan dan penyelesaian permohonan KI di tahun dasar (2019) adalah sebagai berikut:

Jenis Layanan	Total Permohonan KI 2019	Total Penyelesaian Permohonan KI 2019
Hak Cipta	42.768	42.768
Desain Industri	4.361	5.313
Merek & Indikasi Geografis (IG)	101.830	137.676
Paten	12.606	18.658
total	161.565	<b>203.319 (sebagai baseline pembanding)</b>

\*Nb:Khusus untuk produk KI Komunal yang tervalidasi, *baseline* nya adalah tahun 2020 sebagai tahun pertama Program Prioritas Nasional untuk inventarisasi pada Pusat Data Nasional KIK.

Sehingga capaian pada output program pada indikator ini memiliki komponen penghitungan sebagaimana yang disajikan pada tabel di atas berupa

**“Penyelesaian permohonan KI pada tahun berjalan (2021) ditambah KIK yang terdaftar (produk IG) dan KIK tervalidasi dikurangi penyelesaian permohonan KI pada tahun dasar/baseline(2019) dibagi capaian pada tahun dasar/baseline (2019) dikali 100%”**

=====

$$(258.995 - 203.319) : 203.319 = 55.676 : 203.319 \times 100\% = 0,2738 \times 100\% =$$

**27,38%**

Persentase capaian Produk KI dan KI Komunal yang dilindungi di tahun 2021 jika dibanding di tahun 2020 maka akan tampak sebagai berikut:

Jenis Cakupan Perlindungan	Tahun 2020	Tahun 2021
Produk KI Konvensional	<b>307.974</b>	<b>258.392</b>
Produk KI Komunal (tervalidasi)	201 (KIK tervalidasi) + 7 (IG terdaftar) = <b>208</b>	595 (KIK tervalidasi) + 8 (IG terdaftar) = <b>603</b>
Total	<b>308.182</b>	<b>258.995</b>
Persentase perlindungan (dibandingkan tahun 2019 sebagai baseline)	<b>51,57%</b>	<b>27,38%</b>

Jika dibandingkan capaian dengan tahun 2020, maka capaian di tahun 2021 khususnya pada perlindungan atas KI Konvensional yang dimiliki secara privat (Hak Cipta, Desain Industri, Merek, Paten) memang mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020. Hal ini misalnya juga karena dipengaruhi faktor eksternal seperti pandemic COVID mengingat periode selama tahun 2021 terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang sangat signifikan, sehingga menyebabkan kreativitas dari kreator mengalami menurun mengingat jumlah permohonan KI yang masuk di tahun 2020 memang ada sedikit penurunan dibanding tahun 2020. Mengingat pihak yang mengajukan dari permohonan KI Konvensional memang lebih banyak dari perorangan karena sifat dari KI Konvensional adalah perlindungan bagi personal/privat.

Namun khusus terkait dengan perlindungan atas produk KI Komunal mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan capaian terkait KI Komunal banyak merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah dengan instansi terkait seperti dinas maupun dengan pihak DJKI sehingga dapat lebih banyak dilakukan pendataan inventarisasi dalam jumlah yang lebih banyak jika dilakukan hanya oleh satu pihak tertentu. Mengingat pihak yang mengajukan dari permohonan KI Komunal memang lebih banyak dari pemerintah daerah, dinas atau masyarakat pengemban dari suatu KI Komunal.

#### **b. Indikator Kinerja “Layanan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien di lingkungan DJKI”**

Memiliki indikator kinerja berupa layanan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien di lingkungan DJKI, maka formulasi penghitungan atas indikator kinerja tersebut adalah “**Jumlah layanan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien di lingkungan DJKI**” dengan target 1 layanan. Target 1 layanan tersebut memiliki unsur capaian dengan tolok ukur berupa indeks layanan manajemen internal di lingkungan DJKI. Dimana, capaian output program pada indikator tersebut adalah Indeks Layanan Manajemen Internal di lingkungan DJKI Kemenkumham dengan target 76,61 adapun persentasenya mencapai 76,61 (data SMART DJA). Sedangkan penetapan target 76,61 merupakan target *given* dari Kementerian Hukum dan HAM. Capaian dari indikator kinerja mencapai

76,61 merupakan capaian penuh (persentase 100%) dari target yang ditetapkan. Indeks Layanan Manajemen Internal sendiri terdiri dari: survey kepuasan pegawai atas layanan internal di lingkungan DJKI (layanan kepegawaian, layanan umum, layanan keuangan). Adapun beberapa bentuk kegiatan layanan internal tersebut misalnya sebagai berikut:

- Layanan Kebutuhan Kesehatan bagi Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Poliklinik DJKI
- Pemberian Masker pada bagian Unit kerja masing-masing
- pemberian hand sanitizer kepada bagian masing-masing
- pemberian vitamin untuk seluruh pegawai DJKI
- Layanan internal sistem elektronik pengajuan persetujuan perjalanan dinas bagi pegawai DJKI (e-saki)
- Layanan internal sistem elektronik pengajuan peminjaman ruangan
- Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Bangunan di DJKI Jakarta dan DJKI Tangerang
- memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pegawai DJKI dan masyarakat dalam dan sekitar gedung DJKI
- memberikan transportasi antar jemput bagi pegawai DJKI
- layanan kebersihan ruangan dan gedung DJKI
- Layanan persediaan dan keperluan Kantor (ATK, dll)
- pemeliharaan Toilet beserta kebutuhannya
- pemeliharaan Kendaraan Bermotor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
- Layanan Persediaan dan Keperluan Kantor Lainnya
- Pengadaan Pakaian Dinas Khusus bagi seluruh Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Sebenarnya mengingat target ini adalah target given yang diberikan oleh Kementerian, sehingga seharusnya terdapat keseragaman metode yang dilakukan oleh masing-masing Unit Eselon I yang seyogyanya ditetapkan metodenya oleh Kementerian. Selain itu kegiatan survey tersebut juga seharusnya difasilitasi oleh Kemenkumham (belum dipastikan siapa dari Unit Eselon I di lingkungan Kemenkumham (apakah Sekretariat Jenderal atau Badan Penelitian dan Pengembangan HAM) yang akan bertindak selaku penanggung jawab dari pelaksanaan survey internal tersebut).

### **3.2 Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Tahun 2021**

#### **A. Capaian Perjanjian Kinerja Unit Eselon I DJKI**

NO.	OUTPUT PROGRAM	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI	TARGET	Anggaran (Rp)	Capaian
1	Penegakan dan Pelayanan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual	Persentase Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Persentase penyelesaian permohonan KI sesuai dengan peraturan yang berlaku (Jumlah penyelesaian permohonan KI yang diselesaikan dalam jangka waktu yang sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di tahun berjalan (2021) dibagi dengan jumlah permohonan KI yang masuk di tahun berjalan (2021) dikali 100%)	99%	254.568.954.000	81,64%
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual	Jumlah permohonan KI yang masuk pada tahun berjalan (2021) dikurangi jumlah permohonan KI yang masuk di tahun baseline (2019) dibandingkan dengan Jumlah permohonan KI yang masuk pada tahun baseline (2019) dikali 100%	12%		21,45%
		Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	Persentase aduan yang ditangani	100%		100%
		Persentase Peningkatan Produk Kekayaan Intelektual dan Komunal yang Dilindungi	Penyelesaian permohonan KI pada tahun berjalan (2021) dikurangi penyelesaian permohonan KI pada tahun dasar/baseline (2019) dibagi capaian pada tahun dasar/baseline (2019) dikali 100%. *NB: khusus untuk produk KI Komunal yang dilindungi, baseline nya adalah tahun 2020 sebagai tahun pertama Program Prioritas Nasional untuk inventarisasi pada Pusat	6%		27,38%

			Data Nasional KIK.			
2	Layanan Manajemen Internal Kementerian Hukum dan HAM	Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Ditjen Kekayaan Intelektual	Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Ditjen Kekayaan Intelektual	76,6	297.110.514.000	75

**Penjelasan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Unit Eselon I (DJKI) 2021**

**(1) Persentase Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku**

Jumlah penyelesaian capaian pada output program ini memiliki komponen penghitungan sebagaimana yang disajikan pada tabel di atas berupa:

***“Jumlah penyelesaian permohonan KI yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di tahun berjalan (2021) dibagi jumlah permohonan KI di tahun berjalan (2021) x 100%”***

=====

$$(160.218 \text{ dokumen} : 196.230 \text{ dokumen}) \times 100\% = (xxx) : 0,8164 \times 100\% = \mathbf{81,64\%} \text{ (capaian di tahun 2021)}$$

Jenis Layanan	Permohonan KI 2020	Penyelesaian Permohonan KI 2020	Permohonan KI 2021	Penyelesaian Permohonan KI 2021
Hak Cipta	57.814	55.678	83.078	83.810
Desain Industri	3.967	3.270	4.366	4.127
Merek & Indikasi Geografis (IG)	116.571	236.524	96.313 (96.285 Merek, 28 IG)	155.853 (155.845 Merek, 8 IG)
Paten	10.858	12.509	12.473	14.610
total	189.210	307.981	196.230	258.400

Data permohonan dan penyelesaian permohonan KI di tahun dasar (2019) adalah sebagai berikut:

Jenis Layanan	Total Permohonan KI 2019	Total Penyelesaian Permohonan KI 2019
Hak Cipta	42.768	42.768
Desain Industri	4.361	5.313
Merek & Indikasi Geografis (IG)	101.830	137.676
Paten	12.606	18.658
total	161.565	203.319

Jenis Layanan	Permohonan KI tahun 2021	Penyelesaian Backlog tahun 2021	Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-
---------------	--------------------------	---------------------------------	---



			<b>undangan di tahun 2021</b>
Hak Cipta	83.078	N/A (tidak ada backlog)	83.810
Desain Industri	4.366	N/A (tidak ada backlog)	4.127
Merek	96.285	95.834	60.011
Paten	12.473	2.340	12.270
<b>total</b>	<b>196.230</b>	98.174	<b>160.218</b>

Capaian di tahun 2021 untuk output program di atas yaitu 81,64% memang masih berada di bawah target capaian yang menetapkan sejumlah 99% penyelesaian permohonan KI yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun belum tercapainya target tersebut banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti banyaknya pemeriksa KI yang mengalami sakit akibat pandemic COVID mengingat periode selama tahun 2021 terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang sangat signifikan, sehingga menyebabkan produktivitas sedikit menurun. Namun capaian tersebut tetap harus diapresiasi mengingat secara jumlah keseluruhan proses penyelesaian permohonan KI yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengalami kenaikan jika dibanding tahun sebelumnya dan penyelesaian *backlog* (tunggakan pekerjaan) mengalami penurunan sisa *backlog*.

## **(2) Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual**

Persentase peningkatan permohonan KI merupakan *progress* persentase permohonan KI di tahun berjalan (tahun pertanggungjawaban LKIP) dibandingkan jumlah permohonan KI di tahun *baseline* yaitu tahun 2019, mengingat 2019 merupakan tahun terakhir dari periode renstra sebelumnya. Sehingga di akhir periode renstra 2020-2024 dapat dilihat sejauh mana *progress* dari pertumbuhan permohonan KI yang diajukan kepada DJKI. Capaian pada output program ini memiliki komponen penghitungan sebagaimana yang disajikan pada table di atas berupa:

Jenis Layanan	Total Permohonan KI 2020	Total Permohonan KI 2021
Cipta	57.814	83.078
DI	3.967	4.366
Merek & IG	116.571	96.313 (96.285 Merek, 28 IG)
Paten	10.858	12.473
<b>total</b>	189.210	<b>196.230</b>

<b>Jenis Layanan Total Permohonan KI 2019</b>	
Cipta	42.768
DI	4.361

Merek&IG	101.830
Paten	12.606
total	161.565

Adapun capaian pada tahun 2021 untuk output program ini adalah:

**“Jumlah permohonan KI yang masuk pada tahun berjalan (2021) dikurang jumlah permohonan KI yang masuk pada tahun dasar/tahun baseline (2019) dibagi jumlah permohonan KI tahun dasar/baseline (tahun 2019) dikali 100%.”**

---


$$(196.230 - 161.565) : 161.565 \times 100\% = 34.655 : 161.565 = 0,2145 \times 100\% = \mathbf{21,45\%}$$

Capaian pada output program ini jauh melebihi target yang ditetapkan untuk dicapai di tahun 2021 yaitu 12%. Adapun pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 telah tercapai progress peningkatan permohonan dari tahun baseline (2019) adalah 17,11% dari target 7% yang ditetapkan pada target capaian di 2020. Sedangkan jika dilihat progress peningkatan permohonan KI yang masuk di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 terdapat peningkatan sebesar 4,34%. Adapun justifikasi dari terlampauinya target capaian kinerja dipengaruhi beberapa faktor, misalnya terkait dengan optimalisasi layanan TI pada seluruh layanan penerimaan permohonan KI (permohonan KI sudah mulai berjalan secara efektif melalui IPROline). Selain itu adanya tingkat animo masyarakat dalam mendaftarkan KI terutama dari rezim Hak Cipta yang memiliki jumlah peningkatan secara signifikan. Kiranya capaian ini juga dapat mencerminkan bahwa penyediaan layanan permohonan KI dapat dikatakan cukup dikenal dan memuaskan masyarakat pengguna layanan KI hal ini nanti dapat dilihat pada capaian yang terkait pada Indeks Kepuasan Masyarakat.

### **(3) Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual**

Jumlah penyelesaian capaian pada output program ini memiliki komponen penghitungan sebagaimana yang disajikan pada table di atas berupa:

**“Jumlah aduan pelanggaran HKI yang ditangani/ditindaklanjuti di tahun berjalan (2021) dibagi dengan jumlah aduan pelanggaran HKI yang masuk di tahun berjalan (2021)”**

---

Pada tahun 2021 terdapat 111 (seratus sebelas) aduan pelanggaran HKI yang masuk dan ditangani atau ditindaklanjuti dan dari jumlah tersebut semuanya telah dilakukan tindaklanjut/ditangani sehingga formulasi penghitungan capaian output program di atas adalah:

$$\mathbf{111:111 \times 100\% = 100\%}$$

Sehingga dapat dikatakan bahwa capaian atas output program penanganan aduan pelanggaran HKI telah mencapai hasil yang

optimal pada tahun 2021 yaitu 100%. Adapun jika dibanding persentase capaian di tahun sebelumnya maka pada tahun 2020 juga sama-sama mencatatkan 100% untuk tindak lanjut atau penanganan atas aduan yang disampaikan, namun secara kumulatif jumlah di tahun 2020 hanya terdapat 30 aduan pelanggaran. Sehingga capaian di tahun 2021 untuk output program di atas secara jumlah kumulatif melebihi capaian di banding tahun 2020. Capaian ini dapat terlaksana tidak terlepas dari kegiatan sosialisasi, edukasi, dan himbaun yang lebih masif terkait pencegahan pelanggaran HKI sehingga dapat meningkatkan *awareness* masyarakat atas perlunya perlindungan HKI dan mendorong partisipasi masyarakat untuk melaporkan dugaan atas pelanggaran HKI dalam hal terjadi dugaan atau kemungkinan terjadinya pelanggaran atas HKI kepada DJKI.

#### **(4) Persentase Peningkatan Produk Kekayaan Intelektual dan Komunal yang Dilindungi**

Penyelesaian permohonan KI termasuk penyelesaian permohonan KI Konvensional yang dimiliki secara privat (Hak Cipta, Desain Industri, Merek, Paten) dan KI Komunal yang dimiliki atau diemban secara komunal (Indikasi Geografis, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik). Sehingga perhitungan atas capaian pada output program tersebut adalah sebagai berikut:

o Produk KI Konvensional (Penyelesaian permohonan KI Konvensional yang dimiliki secara privat)	<b>= 258.392</b>
o Produk KI Komunal (Permohonan IG yang mendapat Kepastian hukum (8) + KI Komunal yang Tervalidasi (595))	<b>= 603</b>
	<b>_____ +</b>
<b>Total produk KI dan KI Komunal yang dilindungi</b>	<b>= 258.995</b>

Sedangkan khusus untuk data terkait Kekayaan Intelektual Komunal yang telah tervalidasi pada Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal di tahun 2021 mencapai 595 data yang telah tervalidasi, sedangkan di tahun 2020 tercatat data KIK sebanyak 201 yang telah tervalidasi. Jadi ada peningkatan perlindungan atas inventarisasi data KIK yang dilindungi oleh negara melalui Pusat Data Nasional KIK sebagai salah satu program prioritas nasional pembangunan yang diemban oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan terkait dengan Indikasi Geografis (IG), walaupun IG memiliki sistem perlindungan yang hampir sama dengan sistem KI Konvensional (seperti merek) yaitu melalui pendaftaran IG, namun kepemilikan atas produk IG dimiliki secara komunal. Sehingga produk IG terdaftar juga termasuk di dalam produk KI Komunal yang dilindungi.

Jenis Layanan	Permohonan KI 2020	Penyelesaian Permohonan KI 2020	Permohonan KI 2021	Penyelesaian Permohonan KI 2021
Hak Cipta	57.814	55.678	83.078	83.810
Desain Industri	3.967	3.270	4.366	4.127
Merek & Indikasi Geografis (IG)	116.571	236.524 (236.517 Merek dan 7 IG)	96.313 (96.285 Merek, 28 IG)	155.853 (155.845 Merek, 8 IG)
Paten	10.858	12.509	12.473	14.610
total	189.210	<b>307.981 (307.974 KI Konvensional, 7 produk IG terdaftar sebagai KI Komunal)</b>	196.230	<b>258.400 (258.392 KI konvensional 8 Produk IG sebagai KI Komunal)</b>

Data permohonan dan penyelesaian permohonan KI di tahun dasar (2019) adalah sebagai berikut:

Jenis Layanan	Total Permohonan KI 2019	Total Penyelesaian Permohonan KI 2019
Hak Cipta	42.768	42.768
Desain Industri	4.361	5.313
Merek & Indikasi Geografis (IG)	101.830	137.676
Paten	12.606	18.658
total	161.565	<b>203.319 (sebagai baseline pembandingan)</b>

\*Nb: Khusus untuk produk KI Komunal yang tervalidasi, *baseline* nya adalah tahun 2020 sebagai tahun pertama Program Prioritas Nasional untuk inventarisasi pada Pusat Data Nasional KIK.

Sehingga capaian pada output program pada indikator ini memiliki komponen penghitungan sebagaimana yang disajikan pada tabel di atas berupa

**“Penyelesaian permohonan KI pada tahun berjalan (2021) ditambah KIK yang terdaftar (produk IG) dan KIK tervalidasi dikurangi penyelesaian permohonan KI pada tahun dasar/baseline(2019) dibagi capaian pada tahun dasar/baseline (2019) dikali 100%”**

$$\frac{(258.995 - 203.319) : 203.319 = 55.676 : 203.319 \times 100\% = 0,2738 \times 100\% = 27,38\%}{}$$

Persentase capaian Produk KI dan KI Komunal yang dilindungi di tahun 2021 jika dibanding di tahun 2020 maka akan tampak sebagai berikut:

Jenis Cakupan Perlindungan	Tahun 2020	Tahun 2021
Produk KI Konvensional	<b>307.974</b>	<b>258.392</b>
Produk KI Komunal (tervalidasi)	201 (KIK tervalidasi) + 7	595 (KIK tervalidasi) + 8 (IG)

	(IG terdaftar) = <b>208</b>	terdaftar = <b>603</b>
Total	<b>308.182</b>	<b>258.995</b>
Persentase perlindungan (dibandingkan tahun 2019 sebagai baseline)	<b>51,57%</b>	<b>27,38%</b>

Jika dibandingkan capaian dengan tahun 2020, maka capaian di tahun 2021 khususnya pada perlindungan atas KI Konvensional yang dimiliki secara privat (Hak Cipta, Desain Industri, Merek, Paten) memang mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020. Hal ini misalnya juga karena dipengaruhi faktor eksternal seperti pandemic COVID mengingat periode selama tahun 2021 terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang sangat signifikan, sehingga menyebabkan kreativitas dari kreator mengalami menurun mengingat jumlah permohonan KI yang masuk di tahun 2020 memang ada sedikit penurunan dibanding tahun 2020. Mengingat pihak yang mengajukan dari permohonan KI Konvensional memang lebih banyak dari perorangan karena sifat dari KI Konvensional adalah perlindungan bagi personal/privat.

Namun khusus terkait dengan perlindungan atas produk KI Komunal mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan capaian terkait KI Komunal banyak merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah dengan instansi terkait seperti dinas maupun dengan pihak DJKI sehingga dapat lebih banyak dilakukan pendataan inventarisasi dalam jumlah yang lebih banyak jika dilakukan hanya oleh satu pihak tertentu. Mengingat pihak yang mengajukan dari permohonan KI Komunal memang lebih banyak dari pemerintah daerah, dinas atau masyarakat pengemban dari suatu KI Komunal.

#### **(5) Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Ditjen Kekayaan Intelektual**

Capaian output pada indikator tersebut adalah Indeks Layanan Manajemen Internal di lingkungan DJKI Kemenkumham dengan target 76,61 adapun persentasenya mencapai 76,61 (data SMART DJA). Sedangkan penetapan target 76,61 merupakan target *given* dari Kementerian Hukum dan HAM. Capaian dari indikator kinerja mencapai 76,61 merupakan capaian penuh (persentase 100%) dari target yang ditetapkan. Indeks Layanan Manajemen Internal sendiri terdiri dari: survey kepuasan pegawai atas layanan internal di lingkungan DJKI (layanan kepegawaian, layanan umum, layanan keuangan). Adapun beberapa bentuk kegiatan layanan internal tersebut misalnya sebagai berikut:

- Layanan Kebutuhan Kesehatan bagi Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Poliklinik DJKI
- Pemberian Masker pada bagian Unit kerja masing-masing
- pemberian hand sanitizer kepada bagian masing-masing
- pemberian vitamin untuk seluruh pegawai DJKI
- Layanan internal sistem elektronik pengajuan persetujuan perjalanan dinas bagi pegawai DJKI (e-saki)

- Layanan internal sistem elektronik pengajuan peminjaman ruangan
- Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Bangunan di DJKI Jakarta dan DJKI Tangerang
- memberikan keamanan dan nyaman bagi pegawai DJKI dan masyarakat dalam dan sekitar gedung DJKI
- memberikan transportasi antar jemput bagi pegawai DJKI
- layanan kebersihan ruangan dan gedung DJKI
- Layanan persediaan dan keperluan Kantor (ATK, dll)
- pemeliharaan Toilet beserta kebutuhannya
- pemeliharaan Kendaraan Bermotor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
- Layanan Persediaan dan Keperluan Kantor Lainnya
- Pengadaan Pakaian Dinas Khusus bagi seluruh Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Sebenarnya mengingat target ini adalah target given yang diberikan oleh Kementerian, sehingga seharusnya terdapat keseragaman metode yang dilakukan oleh masing-masing Unit Eselon I yang seyogyanya ditetapkan metodenya oleh Kementerian. Selain itu kegiatan survey tersebut juga seharusnya difasilitasi oleh Kemenkumham (belum dipastikan siapa dari Unit Eselon I di lingkungan Kemenkumham (apakah Sekretariat Jenderal atau Badan Penelitian dan Pengembangan HAM) yang akan bertindak selaku penanggung jawab dari pelaksanaan survey internal tersebut).

## B. Capaian Perjanjian Kinerja Unit Eselon II DJKI Tahun 2021

Program : Pembinaan/penyelenggaraan kekayaan intelektual	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Formulasi (Output)	Target	Anggaran	Capaian	Realisasi Anggaran
	Terlindungnya Hak Cipta dan Desain Industri di Seluruh Indonesia	Persentase penyelesaian pencatatan Hak Cipta	Persentase pencatatan hak cipta yang telah memperoleh kepastian hukum	100%	Rp. 4.005.607.000,00	100,88%	Rp. 229.846.960,00
		Persentase penyelesaian permohonan Desain Industri	Persentase permohonan desain industri yang telah memperoleh kepastian hukum	100%		95,17%	
		Persentase Rekomendasi pelayanan hukum di bidang hak cipta dan	Persentase penyelesaian rekomendasi hukum yang diajukan masyarakat	100%	134,67%	Rp. 1.069.760.213,00	
							(Total Realisasi

nyeleng garaan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Formulasi (Output)	Target	Anggaran	Capaian	Realisasi Anggaran
		desain industri	terkait dengan Hak Cipta dan Desain Industri yang dapat berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan hukum bidang Cipta dan desain industri</li> <li>- Keberatan atas putusan penolakan DI</li> <li>- Panggilan sidang/pemberian keterangan sebagai saksi ahli</li> </ul>				= Rp 1.299.607.173 = 32,44%)
Mewujudkan potensi KI yang mempunyai nilai ekonomis	Persentase peningkatan permohonan KI	Persentase kenaikan permohonan KI (baseline jumlah permohonan tahun dasar/tahun 2019)	12%		21,45%		
	Persentase peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI	Jumlah stakeholder yang diharapkan memiliki pemahaman terkait KI sebagai hasil dari kegiatan sosialisasi dan diseminasi terkait KI yang dilakukan oleh DJKI	50%	Rp. 22.000.000.000,00 (pagu awal di Perkin Es.II DJKI)	120%	Rp 13.984.301.274 (data smart DJA)  (Realisasi = 63,57%)	

nyeleng garaan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Formulasi (Output)	Target	Anggaran	Capaian	Realisasi Anggaran
			dalam rangka pemberdayaan kekayaan intelektual = capaian jumlah stakeholder yang terdiseminasi-tersosialisasi di tahun 2021/ target stakeholder yang terdiseminasi-tersosialisasi di tahun 2021 x 100% = X% (X% x 50% = XX Stakeholder)				
	Terlindungi Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia	Persentase merek dan indikasi geografis yang dilindungi	Persentase peningkatan jumlah penyelesaian merek dan indikasi geografis (dari angka <i>baseline</i> di tahun dasar/tahun 2019)	12%	Rp. 6.445.914.000,00 (Pagu awal di Perkin Es.II DJKI)	13,19%	Rp 3.849.726.555,00 (data SMART DJA)  (Realisasi = 59,72%)
		Persentase penyelesaian rekomendasi pelayanan hukum di bidang Merek dan Indikasi Geografis	Jumlah rekomendasi hukum yang diberikan kepada pihak yang meminta dibagi rekomendasi hukum yang diajukan pada tahun berjalan dikali 100%	100%		182,15%	
	Terlindungnya Paten, DTLST, dan	Persentase peningkatan Paten, DTLST,	Jumlah dokumen permohonan	12%		32,1%	Rp 5.937.590.871,00 (data SMART



nyeleng garaan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Formulasi (Output)	Target	Anggaran	Capaian	Realisasi Anggaran
	Rahasia Dagang di seluruh Indonesia	dan Rahasia Dagang di seluruh Indonesia	Paten, DTLST, dan RD yang memperoleh kepastian hukum di tahun 2021 dibagi Jumlah dokumen permohonan Paten, DTLST, dan RD yang memperoleh kepastian hukum di tahun dasar/tahun baseline di 2019 x 100%		Rp. 7.089.870.000,00		DJA)  (Realisasi = 83,75%)
		Persentase penyelesaian rekomendasi hukum pelayanan hukum terkait Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang	Jumlah rekomendasi hukum terkait Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang yang diberikan kepada pihak yang meminta dibagi rekomendasi hukum yang diajukan pada tahun berjalan dikali 100%	100%		97,5%	
	Terwujudnya penanganan dan penyelesaian sengketa HKI yang optimal	Persentase penanganan aduan pelanggaran HKI	Jumlah penanganan atas aduan pelanggaran HKI selama tahun 2021 dibagi jumlah aduan atas pelanggaran HKI yang disampaikan kepada DJKI	100%	Rp. 4.005.607.000,00	100%	Rp 1.977.431.316,00 (data SMART DJA)  (realisasi =
		Persentase penyelesaian	Jumlah penyelesaian	60%		53,58%	

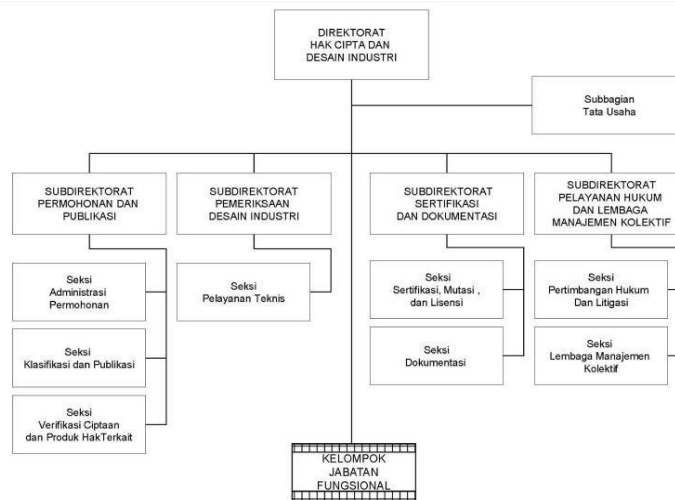
nyeleng garaan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Formulasi (Output)	Target	Anggaran	Capaian	Realisasi Anggaran
		sengketa HKI secara optimal	sengketa HKI di tahun berjalan (SP3,P21) dan mediasi selesai dibagi jumlah kasus pelanggaran HKI yang masih berjalan				49,37%)
	Terwujudnya sistem Manajemen Data Informasi dan Pelayanan KI yang berbasis IT yang sistematis, efektif, handal dan berkelanjutan	Peningkatan layanan Teknologi Informasi KI yang aman dan handal	Persentase pemberian layanan Teknologi Informasi KI yang aman dan handal yang meliputi seluruh kegiatan layanan system informasi, pemeliharaan, pengembangan dan pembangunan sistem teknologi informasi kekayaan intelektual di tahun 2021	99%	Rp. 180.000.000.000,00	99%	Rp 131.010.461.471,00 (realisasi = 72,78%)
	Terwujudnya Sekretariat DJKI yang responsive, efektif, dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi DJKI	Nilai Indeks	87	Rp. 297.110.514.000,00	95,87	Rp 267.497.045.117 (data SMART DJA)  (realisasi = 90,03%)
Survei Kepuasan Masyarakat atas layanan DJKI		Nilai Indeks	3,02 (skala maksimum 4)	3,39			
Nilai SAKIP DJKI "Baik"		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja DJKI	77	81,52			
Nilai perencanaan anggaran DJKI berorientasi		Nilai SMART DJKI	92	92,29			

nyeleng garaan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Formulasi (Output)	Target	Anggaran	Capaian	Realisasi Anggaran
		pada hasil SMART DJA					
		Nilai IKPA DJKI	Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran	98		85,22	

## Penjelasan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja 2021 Unit Eselon II DJKI

### a. Terlindunginya Hak Cipta dan Desain Industri di Seluruh Indonesia (diampu oleh Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri)

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki komposisi pegawai sebagai berikut:



Pegawai HCDI	84
Pejabat Struktural	14
Pemeriksa Desain Industri	25
Arsiparis	3
Jabatan Fungsional Umum	19
PPNP	23

Memiliki SDM sejumlah 84 pegawai, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri telah mencatatkan capaian kinerja berdasarkan sasaran kegiatan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut.

KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	ANGGARAN
Terlindunginya Hak Cipta dan Desain Industri di seluruh Indonesia	Rekomendasi Pelayanan Hukum di Bidang Hak Cipta dan Desain Industri	300 rekomendasi	404 rekomendasi (134,67%)	Pagu Rp. 1.333.743.000 Realisasi Rp. 848.437.356 (realisasi = 63,61%)

	NSPK di Bidang Hak Cipta dan Desain Industri	3 NSPK	3 NSPK (100%)	Pagu Rp. 1.994.030.000 Realisasi Rp. 1.369.998.902 (realisasi = 68,70%)
	Layanan Pencatatan Hak Cipta	37720 layanan	83810 layanan (222,19%)	Pagu Rp. 6.244.000 Realisasi Rp. 877.000 (realisasi = 14,04%)
	Layana Pendaftaran Desain Industri	3220 layanan	4127 layanan (128,16%)	Pagu Rp. 229.495.000 Realisasi Rp. 228.219.960 (realisasi = 99,44%)

Adapun capaian-capaian tersebut berimplikasi pada pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Perjanjian Kinerja Unit Eselon II DJKI yang terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu:

**(1) Persentase penyelesaian pencatatan Hak Cipta;**

Formulasi pada penghitungan capaian atas IKK di atas adalah “Persentase pencatatan hak cipta yang telah memperoleh kepastian hukum” dengan target 100%. Adapun permohonan pencatatan hak cipta yang masuk selama tahun 2021 mencapai 83.078 dengan capaian pencatatan hak cipta yang telah memperoleh kepastian hukum sebanyak 83.810. Sehingga penghitungan persentase capaian adalah:

**“Jumlah penyelesaian permohonan pencatatan hak cipta/pencatatan hak cipta yang telah memperoleh kepastian hukum di tahun berjalan (2021) dibagi jumlah permohonan pencatatan hak cipta yang masuk di tahun berjalan (2021) dikali 100%”**

=====

$$(83.810 : 83.078) \times 100\% = 1,0088 \times 100\% = \mathbf{100,88\%}$$

Jumlah persentase capaian di atas melebihi target penetapan persentase capaian yang ditetapkan untuk dicapai. Bahkan jumlah penyelesaian permohonan pencatatan hak cipta jauh melebihi dari jumlah permohonan yang masuk di tahun bersangkutan. Capaian di tahun 2021 juga mengalami peningkatan persentase capaian jika dibandingkan tahun 2020, dimana pada tahun 2020 terdapat permohonan hak cipta yang masuk sejumlah 57.184 dan penyelesaian permohonannya sebanyak 55.678 atau persentase capaiannya menyentuh angka 97,36%

Penyelesaian Permohonan Hak Cipta masuk tahun 2020	Persentase	Penyelesaian Permohonan Hak Cipta masuk tahun 2021	Persentase
55.678	97,36%	83.810	100,88%

Tren peningkatan permohonan dan penyelesaian permohonan hak cipta yang meningkat dari tahun ke tahun banyak dipengaruhi faktor optimalisasi teknolog informasi pada seluruh layanan KI online yang selalu dilakukan pengembangan dan inovasi. Terbaru adalah program POP-HC (Persetujuan Otomatis Permohonan Pencatatan Hak Cipta) sebagai salah satu program unggulan yang akan secara resmi diluncurkan di tahun 2022, POP-HC telah diuji cobakan di akhir tahun 2019 dan mendapat respon positif dari masyarakat. Mengingat sistem persetujuan secara otomatis tersebut adalah langkah yang memang dinantikan. Sebenarnya Hak Cipta merupakan salah satu rezim KI Konvensional yang paling dahulu melakukan optimalisasi TI bagi pemberian layanannya, yang dimulai di tahun 2014 melalui e-Hak Cipta yang semula menelan waktu beberapa belas hari menjadi hanya kurang lebih 2 hari dan seterusnya berlanjut dengan fitur-fitur pengembangannya menjadi 1 hari dan terbaru adalah melalui POP-HC tersebut yaitu sistem otomasi yang secara otomatis diberikan persetujuan atas pencatatan hak cipta yang diajukan permohonan pencatatannya.

Adanya jumlah peningkatan permohonan pencatatan hak cipta yang semakin banyak dari tahun ke tahun memang menjadi faktor utama dari terlampauinya target capaian tersebut. Dimana semakin tingginya

kesadaran masyarakat akan perlunya hasil karya cipta dan kreasi mereka untuk diberikan perlindungan semakin menguat sebagai hasil masifnya sosialisasi diseminasi dan edukasi yang dilakukan kepada segenap lapisan masyarakat terutama melalui platform-platform media social yang jangkauan engagement dari audiensnya jauh luas dan dari segenap kalangan. Strategi komunikasi dan humas yang dilakukan DJKI juga berarti terbilang sukses diterima masyarakat.

## (2) **Persentase penyelesaian permohonan Desain Industri;**

Formulasi pada penghitungan capaian atas IKK di atas adalah “Persentase permohonan pendaftaran desain industri yang telah Memperoleh Kepastian hukum” dengan target 100%. Adapun permohonan pendaftaran desain industri yang masuk selama tahun 2021 mencapai 4.336 permohonan dengan capaian penyelesaian permohonan pendaftaran desain industri sebanyak 4.127 dokumen permohonan yang mendapat kepastian hukum (daftar, tolak, ditarik kembali atau dianggap ditarik kembali). Sehingga penghitungan persentase capaian adalah:

***“Jumlah penyelesaian permohonan pendaftaran desain industri yang telah memperoleh kepastian hukum di tahun berjalan (2021) dibagi jumlah permohonan pencatatan pendaftaran desain industri yang masuk di tahun berjalan (2021) dikali 100%”***

$$(4.127 : 4.336) \times 100\% = 0,9517 \times 100\% = \mathbf{95,17\%}$$

Capaian pada target IKK terkait penyelesaian permohonan Desain Industri cukup signifikan diraih di tahun 2021. Sedangkan masih adanya permohonan yang masuk di tahun 2021 yang belum mendapat kepastian hukum hingga periode tahun 2021 selesai dikarenakan permohonan yang masuk tersebut masuknya pada triwulan terakhir pada tahun 2021 sehingga masih masuk dalam proses formalitas belum kepada tahap pemeriksaan substantif desain industri, maka belum mendapat kepastian hukum atas status permohonan pendaftaran desain industri tersebut.

Penyelesaian Permohonan Desain Industri masuk tahun 2020	Persentase	Penyelesaian Permohonan Desain Industri masuk tahun 2021	Persentase
3.270	82,43%	4.127	95,17%

Bahkan jika capaian pada tahun 2021 tersebut dibandingkan capaian pada tahun 2020 (dimana jumlah permohonan desain industri yang masuk mencapai 3.967 dan penyelesaiannya mencapai 3.270 atau persentase capaian penyelesaian permohonan sebesar **82,43%**), maka persentase capaian target tahun 2021 mengalami peningkatan signifikan. Terjadinya peningkatan permohonan desain industri di tahun 2021 sebagai implikasi dari tahun 2020 sebagai tahun desain industri, dimana pada tahun 2020 banyak dilakukan kegiatan sosialisasi diseminasi secara massif kepada masyarakat untuk memicu animo masyarakat untuk mendaftarkan karya desain industrinya.

### (3) **Persentase Rekomendasi pelayanan hukum di bidang hak cipta dan desain industri**

Pelayanan hukum di bidang hak cipta dan desain industri oleh Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri merupakan permohonan masyarakat terkait bidang hak cipta dan desain industri. Jumlah pelayanan hukum yang diberikan tergantung dari permintaan masyarakat yang masuk. Adapun komponen rekomendasi hukum terdiri dari: Layanan hukum bidang Cipta dan Desain Industri; Keberatan atas putusan penolakan Desain Industri; serta pemberian keterangan sebagai saksi ahli.

**Formulasi penghitungan: jumlah penyelesaian rekomendasi hukum yang diajukan oleh masyarakat terkait dengan Hak Cipta dan Desain Industri di tahun berjalan (2021) dibagi dengan jumlah permohonan rekomendasi hukum yang masuk di tahun berjalan (2021) dikali 100%**

$$404 : 300 \times 100\% = \mathbf{134,67\%}$$

Penyelesaian Permohonan Desain Industri masuk tahun 2020	Persentase	Penyelesaian Permohonan Desain Industri masuk tahun 2021	Persentase

3.270	82,43%	4.127	95,17%
-------	--------	-------	--------

Capaian pada tahun 2021 melampaui dari target yang ditetapkan. Capaian ini juga mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan tahun 2020 dimana tahun 2020 terdapat capaian sebanyak 242 rekomendasi yang dihasilkan dari target 300 rekomendasi (sekitar 80,67%). Adanya peningkatan capaian yang secara signifikan dipengaruhi oleh faktor optimalisasi penggunaan sarana pertemuan atau *meeting* secara daring sehingga untuk layanan dalam bentuk pemberian keterangan saksi ahli. Pemberian rekomendasi hukum dan sebagainya dapat terus diberikan tidak terbentur pada kehadiran secara fisik.

**b. Mewujudkan Potensi KI yang Memiliki Nilai Ekonomi (diampu oleh Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI)**

Mewujudkan Potensi KI yang Mempunyai Nilai Ekonomis merupakan sasaran kegiatan dari **Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI** yang memiliki jumlah pegawai sebanyak 36 orang (sudah termasuk 1 orang pejabat Eselon II yaitu Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI) selama tahun anggaran 2020. Adapun dari sasaran kegiatan tersebut telah tercapai capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021 dapat disampaikan sebagai berikut.

No.	Sasaran Kegiatan	Rincian Output	Target	Capaian	Anggaran (Rp.)
1	Mewujudkan potensi KI yang mempunyai nilai ekonomi	Kerja sama dibidang KI	11 kesepakatan	40 kesepakatan (363,63%)	Pagu: 5.529.021.000 Realisasi: 4.467.919.741 (realisasi = 80,81%)
		Pemberdayaan KI	2500 orang	3000 orang (120%)	Pagu: 9.116.083.000 Realisasi: 8.542.857.073 (realisasi = 93,71%)
		NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang KI)	1 NSPK	2 NSPK (200%)	Pagu: 100.000.000 Realisasi: 84.033.000 (realisasi = 84,03%)
		Pengembangan Pusat Data Nasional KIK	156 Layanan	595 data layanan (381,41%)	Pagu: 1.000.000.000 Realisasi: 889.491.460 (realisasi = 88,95%)

Adapun capaian-capaian tersebut berimplikasi pada pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Perjanjian Kinerja Unit Eselon II DJKI yang terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu:

**(1) Persentase peningkatan permohonan KI;**

Capaian pada IKK Perjanjian Kinerja Unit Eselon II DJKI ini dapat disampaikan bahwa persentase peningkatan permohonan KI merupakan *progress* persentase permohonan KI di tahun berjalan (tahun pertanggungjawaban LKIP yaitu tahun 2021) dibandingkan jumlah permohonan KI di tahun *baseline* yaitu tahun 2019, mengingat 2019 merupakan tahun terakhir dari periode renstra sebelumnya. Sehingga di akhir periode renstra 2020-2024 dapat

dilihat sejauh mana progress dari pertumbuhan permohonan KI yang diajukan kepada DJKI.

Permohonan KI tahun dasar/baseline (2019)	Permohonan KI tahun 2020	Persentase	Permohonan KI tahun 2021	Persentase
161.565	307.981	17,11%	196.230	21,45%

Adapun capaian di tahun 2021 terdapat progress peningkatan sebesar 21,45%. Capaian pada IKK Perjanjian Kinerja Unit Eselon II DJKI ini jauh melebihi target yang ditetapkan untuk dicapai di tahun 2021 yaitu 12%. Adapun pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 telah tercapai progress peningkatan permohonan dari tahun baseline (2019) adalah 17,11% dari target 7% yang ditetapkan pada target capaian di 2020.

Sedangkan jika dilihat progress peningkatan permohonan KI yang masuk di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 terdapat peningkatan sebesar 4,34%. Adapun justifikasi dari terlampauinya target capaian kinerja dipengaruhi beberapa faktor, misalnya terkait dengan optimalisasi layanan TI pada seluruh layanan penerimaan permohonan KI (permohonan KI sudah mulai berjalan secara efektif melalui IPROline).

## **(2) Persentase peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI**

Capaian pada Perjanjian Kinerja Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI yang terkait dengan IKK Peningkatan

Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI adalah sebagai hasil formulasi dari jumlah kegiatan sosialisasi dan diseminasi terkait KI yang dilakukan oleh DJKI dalam rangka pemberdayaan kekayaan intelektual yaitu:

**“capaian jumlah stakeholder yang terdiseminasi-tersosialisasi di tahun 2021 dibagi target stakeholder yang terdiseminasi-tersosialisasi di tahun 2021 dikali 100%”**

$$“(3.000 : 2.500) \times 100\% = 1,2 \times 100\% = 120\%”$$

Target Tahun 2020	Capaian Tahun 2020	Persentase capaian	Target Tahun 2021	Capaian tahun 2021	Persentase capaian
1.000	1.296	129,6%	2.500	3.000	120%

Target persentase capaian IKK di atas pada tahun 2021 adalah 50%, sedangkan capaian menyentuh 120%. Walaupun dari segi persentase terjadi sedikit penurunan progress persentase jika dibanding tahun 2020, namun secara jumlah kumulatif terjadi peningkatan capaian kurang lebih 231,48%. Terlampauinya target capaian tersebut mengindikasikan adanya peningkatan awareness masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual. Mengingat kegiatan sosialisasi dan diseminasi yang dilakukan



tidak hanya prakarsa atau inisiatif dari DJKI, tapi juga dari stakeholder termasuk masyarakat umum yang mengundang DJKI untuk memberikan sosialisasi dan diseminasi KI.

### c. Terlindunginya Merek dan Indikasi Geografis di Seluruh Indonesia (diampu oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis)

Memiliki SDM sejumlah 195 orang, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis telah mencatatkan capaian kinerja berdasarkan sasaran kegiatan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut.

No.	Sasaran Kegiatan	Rincian Output	Target	Capaian	Anggaran (Rp.)
1	Terlindunginya merek dan indikasi geografis di seluruh Indonesia	Rekomendasi pelayanan hukum di bidang merek dan indikasi geografis	510 rekomendasi kebijakan	910 rekomendasi kebijakan (178,43%)	Pagu: 2.041.952.000 Realisasi: 1.871.117.904 (realisasi = 91,63%)
		Fasilitasi banding merek	510 rekomendasi kebijakan	637 rekomendasi kebijakan (124,90%)	
		NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang sistem Merek dan Indikasi Geografis)	2 NSPK *(adanya perubahan target ,d disesuaikan dengan target pada isian SMART DJA)	2 NSPK (100%)	Pagu: 1.109.482.000 Realisasi: 844.491.585 (realisasi = 76,11%)
		Layanan Pendaftaran Merek	62.720 layanan	78.099 layanan (jumlah merek yang terdaftar) (124,52%)	Pagu: 1.498.668.000 Realisasi: 1.134.117.066 (realiasi = 75,67%)
		Layanan pendaftaran Indikasi Geografis (IG)	11 layanan	8 layanan (jumlah IG yang terdaftar) (72,72%)	

Adapun capaian-capaian tersebut berimplikasi pada pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Perjanjian Kinerja Unit Eselon II DJKI yang terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu:

(1) Persentase merek dan indikasi geografis yang dilindungi;

Capaian pada IKK dari indikator persentase merek dan Indikasi Geografis yang dilindungi merupakan hasil dari Persentase peningkatan jumlah penyelesaian merek dan indikasi geografis (dari angka *baseline* di tahun dasar/tahun 2019) dengan formulasi penghitungan sebagai berikut:

**“Jumlah Penyelesaian permohonan merek dan IG pada tahun berjalan (2021) dikurangi penyelesaian permohonan merek dan IG**

**pada tahun dasar/baseline (2019) dibagi capaian pada tahun penyelesaian permohonan merek dan IG tahun dasar/baseline (2019) dikali 100%”**

$$(155.845 - 137.676) : 137.676 = 18.169 : 137.676 = 0,1319 \times 100\% = \mathbf{13,19\%}$$

Sehingga capaian pada IKK di atas di tahun 2021 adalah sebesar 13,19%, dimana persentase capaian melebihi dari target yang ditentukan untuk dicapai di tahun 2021.

Penyelesaian Permohonan Merek&IG Tahun 2019 ( <i>baseline</i> )	Penyelesaian Permohonan Merek&IG Tahun 2021	Target Capaian 2021	Persentase capaian 2021
137.676	155.845	12%	13,19%

Terlampauinya target capaian tersebut dikarenakan adanya faktor optimalisasi teknologi informasi dalam internal sistem penyelesaian permohonan KI misal melalui IPROline yang juga dapat membantu pemeriksa KI dapat lebih meningkatkan produktivitas kinerjanya. Selain itu banyaknya angka penyelesaian atas backlog permohonan merek juga menjadi penyumbang persentase tingginya jumlah angka penyelesaian permohonan merek.

- (2) Persentase penyelesaian rekomendasi pelayanan hukum di bidang Merek dan Indikasi Geografis;

Capaian pada IKK berupa Persentase penyelesaian rekomendasi pelayanan hukum di bidang Merek dan Indikasi Geografis merupakan hasil formulasi penghitungan dari:

**“capaian jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang merek dan IG di tahun 2021 dibagi target jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang merek dan IG di tahun 2021 dikali 100%”**

$$929 : 510 \times 100\% = \mathbf{182,15\%}$$

Adapun yang termasuk pelayanan hukum di bidang merek dan IG terdiri dari beberapa pelayanan yaitu :

- Saksi Ahli = sebanyak 182 layanan;
- Gugatan Perkara Pembatalan = sebanyak 248 layanan;
- Gugatan perkara putusan KBM = 113 layanan;
- Gugatan TUN = sebanyak 32 layanan;
- Kasasi = sebanyak 224 layanan;
- Pelaksanaan pembatalan = sebanyak 19 layanan;
- Gugatan pembatalan ditolak = belum ada;
- Pendapat Hukum di bidang merek dan indikasi geografis = sebanyak 54 layanan;
- Gugatan perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) = sebanyak 12 layanan; serta
- Menyusun bahan hukum terkait Riset Mahasiswa = sebanyak

45 layanan.

Capaian pada tahun 2021 (929 rekomendasi layanan) sangat jauh melampaui target yang ditetapkan (510 layanan). Sedangkan di tahun sebelumnya yaitu tahun 2020, capaian atas IKK ini mencatatkan jumlah sebanyak 538 rekomendasi layanan.

Capaian pada IKK ini sebenarnya bisa dibilang sangat bergantung pada inisiatif dari masyarakat sehingga dalam menentukan angka pasti dari penentuan target atas IKK ini seringkali capaiannya memang jauh deviasinya dari target yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor tingginya animo masyarakat dalam mengajukan permohonan layanan hukum di bidang merek. Pandemi yang melanda tidak menyurutkan animo masyarakat untuk mengajukan layanan hukum di bidang merek dan IG.

**d. Terlindunginya Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang di Seluruh Indonesia (diampu oleh Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang**

Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang yang memiliki jumlah SDM sebanyak 161 orang (termasuk 1 Orang jabatan Eselon II yaitu Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang) memiliki sasaran kegiatan berupa 'Terlindunginya Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang di seluruh Indonesia' mencatatkan capaian kinerja dengan detail target dan capaian berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut.

No.	Sasaran Kegiatan	Rincian Output	Target	Capaian	Anggaran (Rp.)
1	Terlindunginya Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang di seluruh Indonesia	Rekomendasi pelayanan hukum di bidang Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang	240 rekomendasi kebijakan	234 rekomendasi kebijakan (97,5%)	Pagu: 97.604.000 Realisasi: 64.660.300 (realisasi= 66,25%)
		Fasilitasi banding Paten	25 rekomendasi kebijakan	20 rekomendasi kebijakan (80%)	Pagu: 976.974.000 Realisasi: 970.102.900 (realisasi = 99,30%)
		NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang sistem Merek dan Indikasi Geografis)	1 NSPK	1 NSPK (100%)	Pagu: 870.427.000 Realisasi: 805.914.000 (realisasi = 92,59%)
		Layanan Permohonan Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang	11.900 layanan	14.610 layanan (122,77%)	Pagu: 4.633.768.000 Realisasi: 4.096.913.671 (realisasi = 88,41%)

Adapun capaian-capaian tersebut berimplikasi pada pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Perjanjian Kinerja Unit Eselon II DJKI yang terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu:

- (1) Persentase peningkatan Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang di seluruh Indonesia yang dilindungi;

Capaian pada IKK dari indikator persentase peningkatan Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang yang dilindungi merupakan hasil dari Persentase peningkatan jumlah penyelesaian Paten, DTLST, dan RD yang diselesaikan di tahun berjalan (tahun 2021) dibandingkan dengan angka *baseline* di tahun dasar/tahun 2019) dengan formulasi penghitungan sebagai berikut:

**“Jumlah penyelesaian permohonan Paten, DTLST, dan RD yang sesuai peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan (2021) dikurangi dari jumlah penyelesaian permohonan Paten, DTLST, dan RD yang sesuai peraturan perundang-undangan pada tahun baseline (2019) dibagi capaian penyelesaian permohonan Paten, DTLST, dan RD yang sesuai peraturan perundang-undangan pada tahun dasar/baseline (2019) dikali 100%”**

$$\frac{(14.610-11.055) : 11.055 = 3.555 : 11.055 = 0,321 \times 100\% =$$

**32,1%**

Permohonan Paten 2019	Penyelesaian permohonan Paten 2019	Permohonan Paten 2020	Penyelesaian Permohonan Paten 2020	Permohonan Paten 2021	Penyelesaian Permohonan Paten 2021	Target capaian 2021	Progress (%) capaian dibanding tahun baseline
12.606	11.055	10.858	12.509	12.473	14.610	12%	32,1% (progress)

Pada tahun 2019 terdapat jumlah permohonan yang masuk sebanyak 12.606, di tahun 2020 terdapat penurunan yaitu hanya sekitar 10.858 permohonan Paten, dan di 2021 sedikit mengalami kenaikan namun yaitu 12.473 (namun angka ini masih berada di bawah jumlah permohonan di tahun 2019). Sehingga pada tahun 2021 ditetapkan sebagai Tahun Tematik bagi Paten yaitu Tahun Paten Nasional guna mendongkrak permohonan Paten (khususnya paten dari dalam negeri). Namun walaupun secara jumlah permohonan yang masuk sedikit mengalami penurunan, tetapi secara jumlah jika dibandingkan tahun sebelumnya (2020), maka jumlah penyelesaian permohonan Paten mengalami peningkatan.

Penyelesaian permohonan Paten 2020	Penyelesaian Permohonan Paten 2021	Progress capaian (dalam 1 tahun terakhir)

12.509	14.610	16,79%
--------	--------	--------

Dimana tahun 2021 terdapat penyelesaian sejumlah 14.610 permohonan, sedangkan di tahun 2020 mencatatkan penyelesaian hanya sekitar 12.509 permohonan (ada peningkatan persentase penyelesaian sebesar 16,79% progress peningkatan jika dibanding tahun 2020).

Terlampauinya target capaian pada tahun 2021 tersebut dikarenakan adanya faktor optimalisasi teknologi informasi dalam internal sistem penyelesaian permohonan KI misal melalui IPROline yang juga dapat membantu pemeriksa Paten dapat lebih meningkatkan produktivitas kinerjanya. Produktivitas kinerja ini juga terlebih diikat dengan komitmen kinerja dimana tingkat produktivitas kinerja para pemeriksa Paten dapat menentukan besaran tunjangan kinerja yang dibayarkan. Sistem *reward* seperti ini patut diapresiasi sehingga penyelesaian permohonan *backlog* dari permohonan Paten terbilang memiliki sisa sedikit (tinggal sisa sekitar 2.340 permohonan dari keseluruhan permohonan *backlog*) dan kemungkinan besar di tahun 2022 akan tidak terdapat lagi sisa penyelesaian *backlog* (nihil).

(2) Persentase penyelesaian rekomendasi h pelayanan hukum terkait Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang;

Capaian atas IKK berupa persentase penyelesaian rekomendasi pelayanan hukum terkait Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang merupakan hasil formulasi penghitungan dari:

**“Capaian jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang di tahun 2021 dibagi target jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang di tahun 2021 dikali 100%”**

=====

$$234: 240 \times 100\% = 97,5\%$$

Adapun persentase capaian tersebut adalah termasuk pelayanan hukum di bidang Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang terdiri dari beberapa pelayanan yaitu :

- Permintaan terkait riset akademisi = sebanyak 21 layanan;
- Tanggapan PK = sebanyak 96 layanan;
- Litigasi (pengadilan) = 0 layanan;
- Gugatan TUN = sebanyak 32 layanan;
- Permintaan saksi ahli = sebanyak 20 layanan; serta
- Pendapat hukum dan lain-lain = sebanyak 97 layanan.

Total = 234 layanan.

Capaian pada tahun 2021 (234 layanan) mengalami penurunan jika dibanding capaian di tahun 2020 yang mencapai 324 layanan. Capaian tahun 2021 mengalami sedikit penurunan dalam jumlah layanan mengingat layanan hukum tersebut sangat tergantung kepada permohonan layanan hukum yang diajukan dari masyarakat, dan

berdasarkan kondisi pandemi global COVID-19 yang hampir sepanjang tahun 2021 hingga saat ini masih berlangsung maka sedikit banyak juga berimbas kepada permintaan layanan hukum dari masyarakat tersebut, mengingat banyak sekali sektor kegiatan baik pemerintahan maupun sector privat yang sangat dibatasi sebagai kebijakan dari pembatasan skala besar sebagai antisipasi pencegahan penyebaran COVID-19. Berbeda halnya dengan jumlah permohonan permintaan layanan hukum di bidang merek dan indikasi geografis yang justru selama pandemic mengalami peningkatan sangat signifikan, tren peningkatan tersebut tidak terjadi pada pengajuan permohonan layanan hukum di bidang Paten, DTLST, dan RD mengingat khususnya di bidang Paten yang merupakan bidang teknologi yang notabene pemohonnya berasal dari luar negeri dan berbentuk company (lebih bersifat padat modal karena rata-rata industry) jika dibandingkan dengan permohonan merek, dimana pandemic memang sangat berdampak juga pada sector padat modal.

**e. Terwujudnya penanganan dan penyelesaian sengketa HKI yang optimal (diampu oleh Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa KI)**

Memiliki SDM sejumlah 35 orang (termasuk 1 orang Pejabat Eselon II), Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa KI telah mencatatkan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut.

KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	ANGGARAN
Terwujudnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa HKI yang Optimal	Pencegahan Pelanggaran HKI	400 orang	835 orang (208,75%)	Pagu Rp. 1.333.743.000 Realisasi Rp. 848.437.356
	NSPK di Bidang Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	1 NSPK	1 NSPK (100%)	Pagu Rp. 1.994.030.000 Realisasi Rp. 1.369.998.902
	Penanganan Pelanggaran HKI	20 Perkara	111 perkara (555%)	Pagu Rp. 6.244.000 Realisasi Rp. 877.000
	Pengawasan dan Pemantauan di Bidang HKI	20 Laporan	23 laporan (115%)	Pagu Rp. 229.495.000 Realisasi Rp. 228.219.960

Adapun capaian-capaian tersebut berimplikasi pada pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Perjanjian Kinerja Unit Eselon II DJKI yang terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu:

(1) Persentase penanganan aduan pelanggaran HKI;

Capaian pada IKK ini memiliki formulasi penghitungan sebagai berikut:

**“Jumlah aduan pelanggaran HKI yang ditangani/ditindaklanjuti di tahun berjalan (2021) dibagi dengan jumlah aduan pelanggaran HKI yang masuk di tahun berjalan (2021)”**

=====

*Pada tahun 2021 terdapat 111 (seratus sebelas) aduan pelanggaran HKI yang masuk dan ditangani atau ditindaklanjuti dan dari jumlah tersebut semuanya telah dilakukan tindak lanjut/ditangani sehingga formulasi penghitungan capaian output program:*

$$111:111 \times 100\% = 100\%$$

Sehingga dapat dikatakan bahwa capaian atas output program penanganan aduan pelanggaran HKI telah mencapai hasil yang optimal pada tahun 2021 yaitu 100%. Adapun jika dibanding persentase capaian di tahun sebelumnya maka pada tahun 2020 juga sama-sama mencatatkan 100% untuk tindak lanjut atau penanganan atas aduan yang disampaikan, namun secara kumulatif jumlah di tahun 2020 hanya terdapat 30 aduan pelanggaran. Sehingga capaian di tahun 2021 untuk output program di atas secara jumlah kumulatif jauh melebihi capaian di banding tahun 2020. Capaian ini dapat terlaksana tidak terlepas dari kegiatan sosialisasi, edukasi, dan himbaun yang lebih masif terkait pencegahan pelanggaran HKI sehingga dapat meningkatkan awareness masyarakat atas perlunya perlindungan HKI dan mendorong partisipasi masyarakat untuk melaporkan dugaan atas pelanggaran HKI dalam hal terjadi dugaan atau kemungkinan terjadinya pelanggaran atas HKI kepada DJKI.

## **(2) Persentase penyelesaian sengketa HKI secara optimal**

Capaian dari IKK berupa persentase penyelesaian sengketa HKI memiliki 2 (dua) jenis cakupan, yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi (mediasi). Adapun kedua jenis cakupan capaian tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Penyelesaian melalui rangkaian proses litigasi (SP3 dan P21) berjumlah total sebanyak **15 penyelesaian**; dimana 13 nya adalah adanya penyelesaian sengketa HKI dengan dilakukan penghentian perkara sebelum dinaikkan ke persidangan yaitu melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dan 2 perkara dalam status P21 yang berarti berkas penyidikan perkara pelanggaran HKI telah lengkap dan siap dilimpahkan dari kejaksaan kepada pengadilan untuk

selanjutnya naik dalam proses persidangan). Capaian ini melebihi dari capaian di tahun 2020 dimana hanya terdapat 7 kasus yang dikeluarkan SP3 nya sebagai proses dari penyelesaian sengketa dalam rangkaian proses litigasi.

b) Penyelesaian melalui mediasi

Penyelesaian melalui mediasi termasuk pada perkara yang sukses berhasil didamaikan maupun perkara yang menemui keputusan yang *deadlock*/tidak dapat didamaikan melalui mediasi. Adapun proses penyelesaian mediasi yang sudah dalam tahap selesai di tahun 2021 adalah sebanyak **6 perkara** dengan rincian: yang mencatatkan keberhasilan ada 2 perkara, sedangkan 4 perkara tidak berhasil diselesaikan melalui jalur mediasi sehingga selanjutnya ditempuh melalui jalur litigasi. Sedangkan terdapat 10 perkara yang masih dalam proses mediasi. Jadi secara keseluruhan terdapat 16 perkara yang dilakukan mediasi di sepanjang tahun 2021.

### JUMLAH SP3 DAN P21

TAHUN	LAPORAN				STATUS PERKARA		SISA PERKARA
	MERЕК	PATEN	HAK CIPTA	DESAIN INDUSTRI	SP3	P21	TOTAL (yang masih dalam Proses)
2021	20	1	12	0	13	2	16
2020	8	16	6	0	7	0	23

\*(Data Evaluasi Kinerja Semester II DJKI Tahun 2021)

### JUMLAH MEDIASI PERKARA PELANGGARAN KI

TAHUN	PERMINTAAN MEDIASI				STATUS MEDIASI			JUMLAH
	MERЕК	PATEN	HAK CIPTA	DESAIN INDUSTRI	PROSES	BERHASIL	GAGAL	
2021	10	0	6	0	10	2	4	16
2020	1	1	0	1	0	1	2	3

\*(Data Evaluasi Kinerja Semester II DJKI Tahun 2021)

Adapun formulasi penghitungan bagi capaian IKK di atas adalah:

**Jumlah penyelesaian sengketa HKI di tahun berjalan yaitu tahun 2021 melalui SP3,P21, dan mediasi yang selesai dibagi jumlah kasus pelanggaran HKI yang masih berjalan x 100%**

---



---


$$21:39 \times 100\% = 53,85\%$$

Catatan:

- **Penyelesaian sengketa HKI total di 2021= 21** (SPK&P21 sebanyak 15 kasus dan terdapat 6 kasus melalui mediasi);
- Jumlah kasus pelanggaran HKI yang masih berjalan sampai dengan tahun 2021 = melalui proses SP3 dan P21 masih ada total sisa perkara yang masih dalam proses penyelesaian **sebanyak 39**



**kasus perkara yang masih berjalan** (16 perkara yang masuk di 2021 dan sebanyak 23 perkara yang masuk di 2020).

Sehingga capaian di tahun 2021 jika dibandingkan dengan target di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

<b>Target penyelesaian sengketa HKI tahun 2021</b>	<b>Capaian penyelesaian sengketa HKI tahun 2021</b>
<b>60%</b>	<b>53,58%</b>

Pencapaian indikator kinerja tersebut memang belum sepenuhnya mencapai target yang ditentukan, namun belum tercapai secara maksimal capaian di tahun 2021 terkait penyelesaian sengketa HKI yang dilakukan secara optimal juga dipengaruhi dengan adanya kondisi pandemic COVID-19 yang memaksa hampir separuh kedua dari semester II tahun 2021 dilakukan PPKM berdampak pada proses penyelesaian perkara yang sedianya dapat berjalan lebih maksimal menjadi belum optimal, mengingat proses penyelesaian perkara tidaklah sederhana seperti memeriksa berkas perkara saja, namun sangat diperlukan pengamatan langsung bahkan tinjauan ke TKP dan pihak terkait secara langsung yang memang kurang optimal jika hanya melalui tatap muka virtual. Sehingga capaian ini sesungguhnya sangat patut diapresiasi. Terlebih inisiatif dari DJKI dalam memperkenalkan mediasi online juga mulai diintrodusir di tahun 2021.

**f. Terwujudnya Sistem Manajemen Data Informasi dan Pelayanan KI yang berbasis IT yang sistematis, efektif, handal, dan berkelanjutan (diampu oleh Direktorat Teknologi Informasi KI)**

Memiliki SDM sejumlah 29 (dua puluh sembilan) orang (termasuk 1 orang pejabat Eselon II) Direktorat Teknologi Informasi KI telah mencatatkan capaian kinerja berdasarkan sasaran dan output kegiatan Perjanjian Kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut.

<b>No.</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Rincian Output</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
1	Terwujudnya sistem manajemen data informasi dan pelayanan berbasis IT yang sistematis, efektif, handal dan berkelanjutan	NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang sistem dan teknologi informasi KI)	1 NSPK	1 NSPK (100%)	Pagu: 6.746.423.000 Realisasi: 5.743.857.581 (realisasi= 85,14%)
		Sistem dan Teknologi Informasi di bidang KI	1 sistem informasi	1 sistem informasi (100%)	Pagu: 139.244.894.000 Realisasi: 125.266.603.890 (realisasi = 89,96%)

**Capaian rincian output:**

- a. NSPK (1 NSPK), dengan rincian capaian sebagai berikut:**
- Arsitektur Sistem Informasi;

- Arsitektur Sistem Keamanan TI;
  - Analisis Sistem Informasi KI;
  - Kajian Pre-Audit Data Center;
  - Perencanaan Kapasitas TI;
  - Penilaian Maturitas TI Dengan SPBE; serta
  - Pelatihan Teknis Bidang TI.
- b. Sistem dan Teknologi Informasi di bidang KI (1 Sistem) , memiliki capaian yang terdiri dari sebagai berikut:**
- Penyediaan dan pemeliharaan perangkat keras TI, Penyediaan perangkat TIK data center, lisensi hardware TI;
  - Penyediaan Internet Koneksi 1 dan Koneksi 2, Penyediaan langganan metronet, perangkat zoom, perangkat video conference.
  - *Mapping dan Cleansing Database*, Update Data PDKI, Statistik, Manajemen Data, Pembangunan Dashboard Data KI, Integrasi Data dalam rangka Pusat Data Nasional KI Komunal.
  - Pembentukan Satgas Aplikasi, Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi, Pengelolaan akun user, Pengembangan berbasis *workflow engine*, *Development auto-approved Hak Cipta*, Pembangunan e-Ticketing, Pendampingan *Live Chat*.
  - *Update Konten Website*, Video Animasi Tutorial, Optimalisasi.

Adapun capain-capaian tersebut berimplikasi pada pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Perjanjian Kinerja Unit Eselon II DJKI yaitu Peningkatan layanan Teknologi Informasi KI yang aman dan handal, yaitu Persentase pemberian layanan Teknologi Informasi KI yang aman dan handal yang meliputi seluruh kegiatan layanan system informasi, pemeliharaan, pengembangan dan pembangunan sistem teknologi informasi kekayaan intelektual di tahun 2021. Dimana selama tahun 2021 telah dilakukan beberapa langkah strategis seperti:

- (a) Melakukan persiapan atas implementasi atas IT Masterplan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
- Koordinasi internal Direktorat Teknologi Informasi KI;
  - Koordinasi dengan Pusdatin selaku koordinator Pelaksanaan SPBE Kementerian Hukum dan HAM
  - Konsultasi dengan Kemenpan, BSSN, Kominfo terkait Pengampu bidang Teknologi Informasi; serta
  - Konsultasi dengan tenaga ahli bidang Teknologi Informasi.
- (b) Melakukan pemenuhan kebutuhan data statistic, yang meliputi kegiatan:
- Koordinasi dengan bagian PPL DJKI dan Unit Teknis terkait pembuatan template matriks permohonan data statistik yang secara rutin dibutuhkan, telah dilaksanakan pada tanggal di awal bulan berikutnya (dari setelah triwulan sebelumnya berakhir);

- Telah ada aplikasi yang berfungsi sebagai sarana dalam pemenuhan kebutuhan data statistik – terupdate yang mudah diakses oleh seluruh user, yaitu menggunakan aplikasi <https://e-dashboard.dgip.go.id/> dan <https://e-kikanwil.dgip.go.id/>;
- Mengirimkan data permohonan merek, paten dan Desain Industri ke WIPO.

**g. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen KI (diampu oleh Sekretariat DJKI)**

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki tugas dan fungsi sebagai unit Eselon II yang berperan sebagai supporting Unit dimana tugasnya adalah memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jumlah SDM di Sekretariat DJKI berjumlah 495 orang (termasuk satu orang Pejabat Eselon II yaitu Sekretaris DJKI). Untuk pelaksanaan kegiatan di Tahun 2021 Sekretariat mempunyai tugas yaitu Program dukungan Manajemen dan teknis lainnya dengan sasaran kegiatan terwujudnya Sekretariat Ditjen KI yang responsif, efektif dan efisien, seperti tertuang di Perjanjian Kinerja Sekretaris DJKI sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Rincian Output	Target	Capaian	Anggaran (Rp.)
1	Meningkatnya kualitas dukungan manajerial dan teknis DJKI	Layanan Perkantoran informasi KI)	1 layanan	1 layanan (100%)	Pagu: 75.920.146.000 Realisasi: 72.320.367.909 (realisasi= 95,26%)
		Manajemen Keuangan	1 layanan	1 layanan (100%)	Pagu: 139.244.894.000 Realisasi: 125.266.603.890 (realisasi = 89,96%)
		Program dan Anggaran	1 layanan	1 layanan (100%)	Pagu: 9.047.554.000 Realisasi: 8.274.354.740 (realisasi = 91,45%)
		Manajemen BMN	1 Layanan	1 layanan (100%)	Pagu: 126.214.060.000 Realisasi:
		Kerumahtanggaan	1 layanan	1 layanan (100%)	100.835.988.157 (realisasi = 79,89%
		Arsip dan persuratan	1 layanan	1 layanan (100%)	
		Keamanan&ketertiban	1 layanan	1 layanan (100%)	
		Sarana internal	140 unit	140 unit (100%)	Pagu: 59.705.740.000 Realisasi: 39.440.687.409 (realisasi = 66,06%)
		Prasarana internal	3 unit	3 unit (100%)	Pagu: 16.961.727.000 Realisasi: 656.376.040 (realisasi = 3,87%)
		Manajemen SDM	950 orang	950 orang (100%)	Pagu: 22.241.682.000 Realisasi: 20.467.157.425

					(realisasi= 92,02%)
		Sistem&prosedur	1 layanan	1 layanan (100%)	Pagu: 2.022.456.000 Realisasi: 1.454.786.510 (realisasi: 71,93%)
		Reformasi Birokrasi	1 layanan	1 layanan (100%)	Pagu: 3.217.308.000 Realisasi: 2.520.718.840 (realisasi : 78,35%)
		Hubungan masyarakat	1 layanan	1 layanan (100%)	Pagu: 19.408.421.000 Realisasi: 13.371.065.456 (realisasi = 68,89%)
		Keprotokoleran	1 layanan	1 layanan (100%)	
		Monitoring&evalua si kinerja program&kegiatan	4 laporan	4 laporan (100%)	Pagu: 8.768.750.000 Realisasi: 8.189.626.123 (realisasi = 93,39%)

Adapun capaian-capaian tersebut berimplikasi pada pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Perjanjian Kinerja Unit Eselon II DJKI yaitu sebagai berikut.

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Formulasi (output)	Target	Capaian
Terwujudnya Sekretariat DJKI yang responsive, efektif, dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi DJKI	Nilai Indeks	87	95,87 (110,19%)
	Survei Kepuasan Masyarakat atas layanan DJKI	Nilai Indeks	3,02 (skala maksimum 4)	3,39 (112,25%)
	Nilai SAKIP DJKI "Baik"	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja DJKI	77	81,52 (ekuivalen dengan predikat A 'memuaskan,berkinerja tinggi, memimpin perubahan, sangat akuntabel')
	Nilai perencanaan anggaran DJKI berorientasi pada hasil SMART DJA	Nilai SMART DJKI	92	92,29 (100,31%)
	Nilai IKPA DJKI	Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran	98	85,22 (86,96%)

Selain itu Sekretariat juga sebagai supporting unit untuk unit teknis lainnya dalam memberikan dukungan terhadap sistem manajemen dan teknis lainnya di Lingkungan DJKI memiliki capaian pada tahun 2021 sebagai berikut:

- 1) Layanan Dukungan Manajemen eselon I ditargetkan 1 Layanan atau 100% , adapun capaian tersebut meliputi, sebagai berikut:
  - a. Program dan Pelaporan
    - Penyusunan Rencana Strategis DJKI 2020-2024

penyusunan renstra DJKI didasarkan dari turunan Renstra Kementerian Hukum dan HAM dimana tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, untuk mencapai hal tersebut DJKI perlu menyusun perencanaan dimana perencanaan ini untuk menunjukkan hubungan dengan proses penetapan tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, sampai kerangka pendanaan. selama periode 5 (lima) tahun

- melakukan monitoring terhadap anggaran baik di pusat dan di kanwil sehingga anggaran yang digunakan telah sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan
- melaksanakan penyiapan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program, perencanaan anggaran dan perencanaan strategis, di lingkungan DJKI baik Pusat maupun Kantor wilayah

b. Evaluasi dan Pelaporan

kegiatan evaluasi dan pelaporan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan, dimana diharapkan setiap unit dapat bertanggung jawab atas capaian kinerja. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penyusunan Laporan SPIP;
  - Penyusunan Manajemen Risiko per semester;
  - Melakukan Kegiatan Evaluasi Kinerja setahun 2x untuk melihat kendala/permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan/program yang telah ditetapkan sehingga bagaimana cara untuk mengambil langkah-langkah baik untuk permasalahan yang timbul dan solusi untuk kedepannya;
  - Rapat Koordinasi Teknis dengan Kantor Wilayah;
  - Penyusunan LKIP dan Laptah DJKI yang akuntabel dan Transparan;
  - Penyusunan Target Kinerja Pusat dan Kantor Wilayah beserta petunjuk pelaksanaannya;
  - melakukan monitoring terhadap pelaporan aplikasi SMART, e-monev dan E-performance;
  - melakukan kegiatan Survey Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) di 8 Wilayah yaitu : Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Banten, Sulawesi Selatan, Bali dan Kalimantan Barat yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik serta kualitas mutu kinerja. Dengan capaian atas IKM pada tahun 2021 adalah 3,39;
- c. Peraturan Perundang-undangan, Kelembagaan dan reformasi Birokrasi

PKRB menjadi salah satu dukungan Manajemen terkait Peraturan, penataan kelembagaan serta menciptakan tata pemerintahan yang baik dan berwibawa (*good Governance*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Reformasi Birokrasi, pada tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- penyederhanaan Birokrasi DJKI
- Penyusunan Rancangan Undang – Undang Pengganti UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten beserta Naskah Akademik; **Carry Over 2020**
- Pembahasan Peraturan Presiden tentang **Budapest Treaty; Carry Over 2020**
- Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kekayaan Intelektual Komunal; **Carry Over 2020**
- Meningkatkan Pencapaian Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual
- Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
- Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten
- Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi Wajib Paten ;
- Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/atau Musik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual;
- Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat Remdesivir;
- Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat Favipira.

d. Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Pegawai

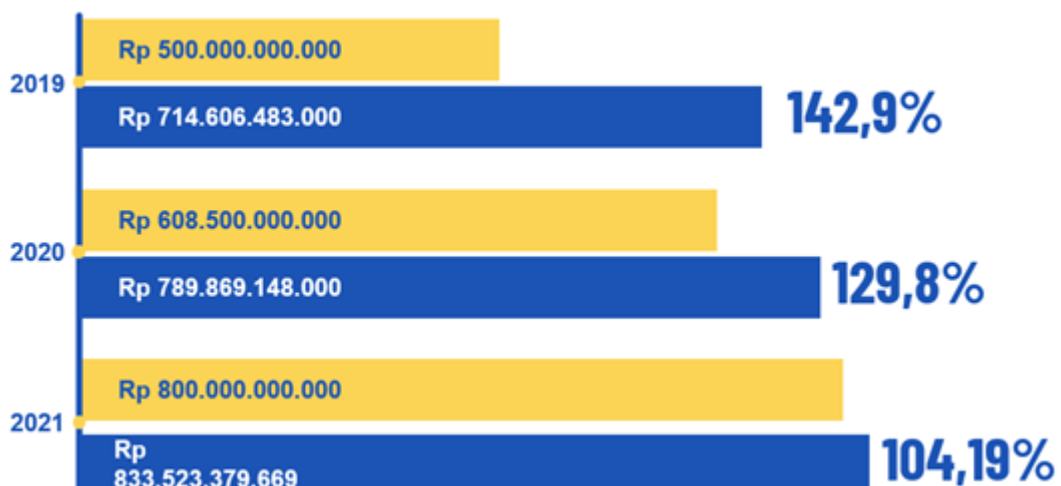
Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja individu pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pada tahun 2020 telah dilaksanakan beberapa kegiatan dukungan manajemen di lingkup kepegawaian sebagai berikut:

- Pelatihan Kepemimpinan TK IV

- Pelatihan Kepemimpinan TK III
- pelatihan Barang dan Jasa
- Pelatihan Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa
- Pelatihan Pelayanan Prima
- pelatihan Pengembangan pemenuhan 40 jam mediasi gelombang II
- Pelatihan Pengembangan pemenuhan 40 jam mediasi gelombang I
- Pelatihan Speak English Training Center
- Public Speaking I
- Public Speaking II
- Pelatihan ABK
- PPNS gelombang I
- PPNS Gelombang II
- Workshop menulis berita
- bimbingan teknis whistle Blowing System
- Penyusunan kurikulum Pemeriksa KI
- Penyusun modul Pemeriksa, paten, Merek dan DI
- Perhitungan angka kredit
- Rekonsiliasi Penyelesaian kenaikan pangkat periode april 2021
- konsinyering validasi dan uji petik analis KI
- Harmonisasi Permenpan Analis KI
- Konsinyering validasi dan uji petik pemeriksa merek
- Konsinyering validasi dan uji petik pemeriksa DI
- Sosialisasi PP 53/2010

e. Pengelolaan PNBP

pengelolaan PNBP tiap tahun selalu mengalami peningkatan jumlah target dari tahun 2019 sampai dengan 2021, selalu melebihi target tiap tahun selalu melebihi dari target yang diusulkan, dilihat dari per tiap tahun, di tahun 2019 dan 2020 pada perencanaan anggaran tahun 2020 telah ada peningkatan izin penggunaan PNBP menjadi 60%, dengan melihat kenaikan target PNBP pertiap tahun sebagai berikut:



## Gambar kenaiikan PNBP DJKI

### f. Tata Usaha & Hubungan Masyarakat

- launching "SIVIKI" layanan konsultasi
- Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara DJKI Kementerian Hukum dan HAM dengan Bareskrim Polri serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Dialog Direktur Teknologi Informasi DJKI dengan CNBC Indonesia
- DJKI menyampaikan pandangan umum Pemerintah Indonesia pada Sidang Umum WIPO ke-62 (kantor pusat WIPO Jenewa)
- DJKI Edukasi Pedagang Tekan Peredaran Barang Palsu
- Menkumham Serahkan 9 Kekayaan Intelektual ke Korpolaairud Polri
- Sosialisasi Perkembangan Performing Art
- DJKI Bersama Bareskrim Polri Persiapkan Perjanjian Kerja Sama Pelindungan dan Pemberdayaan KI
- Melayani informasi contact center masyarakat, melalui call center 152, live chat dan email

### 2). Layanan Internal (Overhead)

Pada tahun 2020 Layanan Internal (Overhead) yang merupakan dukungan terhadap pengembangan infrastruktur dalam meningkatkan pelayanan publik. Pengembangan infrastruktur ini dilakukan pada perbaikan dan pengembangan fasilitas kerja bagi pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana baru juga dilakukan terkait peningkatan infrastruktur sistem teknologi informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, walaupun covid masih melanda Indonesia, berikut layanan Intenal :

- Pembelian Peralatan Kantor berupa Infocus
- Pembelian Peralatan Kantor berupa scanner
- Pembelian Alat Pengolah Data berupa Laptop Pegawai. baik pusat dan kanwil
- Renovasi Lobi Gedung DJKI Jakarta
- Penataan ruang kantor Pegawai
- Penataan Ruang Kantor Djki Sentra Mulia berupa Renovasi Ruang komisi banding dan Staf Ahli IG
- renovasi dan perbaikan gedung KI dan Sentra mulia
- pembelian alat-alat kantor (sarana dan prasarana) kebutuhan pegawai
- vitamin dan susu untuk pegawai dalam masa pandemic
- Pembelian Alat Pengolah Data berupa Laptop Kehumasan
- Perbaikan gedung kearsipan di Tangerang
- persiapan renovasi ruangan loket pelayanan DJKI

### 3) Layanan Perkantoran



Pada tahun 2021 layanan perkantoran merupakan salah satu layanan yang mendukung terhadap kebutuhan operasional kebutuhan kantor dalam pelaksanaan pelayanan baik publik dan internal sehingga kelancaran dalam pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kebutuhan, tahun 2021 DJKI berusaha memberikan fasilitas yang terbaik bagi pegawai, adapun layanan perkantoran sebagai berikut:

- Layanan Kebutuhan Kesehatan bagi Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Poliklinik DJKI
- Pemberian Masker pada bagian Unit kerja masing-masing
- pemberian hand sanitizer kepada bagian masing-masing
- pemberian vitamin untuk seluruh pegawai DJKI
- Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Bangunan di DJKI Jakarta dan DJKI Tangerang
- memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pegawai DJKI dan masyarakat dalam dan sekitar gedung DJKI
- memberikan transportasi antar jemput bagi pegawai DJKI
- layanan kebersihan ruangan dan gedung DJKI
- Layanan persediaan dan keperluan Kantor (ATK, dll)
- pemeliharaan Toilet beserta kebutuhannya
- pemeliharaan Kendaraan Bermotor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
- Layanan Persediaan dan Keperluan Kantor Lainnya
- Pengadaan Pakaian Dinas Khusus bagi seluruh Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

### **3.3 Capaian Target Kinerja**

#### **1) Gerakan Tahun Paten Nasional**

Pelindungan KI merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional ke depan dan berkontribusi secara signifikan dalam perkembangan perekonomian nasional. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah menstimulasi penciptaan inovasi dalam negeri melalui perlindungan paten. Peningkatan pemahaman paten dapat dicapai dengan mendiseminasikan paten kepada lapisan masyarakat terkait, seperti perguruan tinggi, lembaga litabang, dinas dan sekolah menengah yang memiliki kejuruan di bidang terkait teknologi. Diseminasi paten menjadi salah satu cara untuk menelurkan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman paten yang kuat yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan Indonesia berbasis inovasi teknologi.

Guna mendukung dan memaksimalkan hal ini, pemanfaatan informasi paten dan penguatan kerja sama antar elemen, baik dalam aspek substansi pelaksanaan penelitian dan pengembangan, penguatan SDM, maupun dalam pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan *urgent* untuk diimplementasikan. Memahami hal tersebut ditetapkanlah **tahun 2021** sebagai **Tahun Paten Nasional**, dimana targetnya adalah

menciptakan kemandirian paten, yaitu kemandirian dalam menyusun spesifikasi paten yang benar, sesuai ketentuan yang berlaku dan selanjutnya mengerti cara mengajukan permohonan paten.

Dalam rangka menyukseskan tahun 2021 sebagai tahun Paten dan menjawab tantangan peningkatan paten dalam negeri, DJKI menyelenggarakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara luring dikhususkan pada bidang paten di beberapa wilayah di Indonesia dan juga daring. Secara garis besari capaian atas target kinerja berupa Gerakan Tahun Paten memiliki capaian sebagai berikut:

a) **Safari Paten**

Metode pelaksanaan kegiatan Safari Paten tersebut meliputi 3 (tiga) bentuk kegiatan yang terdiri dari: Diseminasi Paten, Drafting Paten, dan Mediasi Paten.



# Dokumentasi Safari Paten



Safari Paten  
Lampung





Selama tahun 2021 telah dilakukan Safari Paten ke 8 wilayah di Indonesia yang terdiri dari: Semarang, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Palembang, Lampung, dan Manado. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut dimulai sejak Maret hingga November 2021. Dengan total jumlah peserta kegiatan sebanyak **1.440 peserta, 960 asistensi** permohonan pendaftaran paten atau ekuivalen dengan pencapaian dari **100% target kinerja** yang ditetapkan.

b) **Webinar Drafting Paten**

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sepanjang tahun 2021, selain mengadakan kegiatan melalui sistem luring/tatap muka secara langsung secara terbatas dan dengan menaati prokes juga telah melakukan kegiatan diseminasi dan pemberdayaan potensi kekayaan intelektual yang dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia secara daring/virtual yaitu melalui webinar. Khususnya mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum tersentuh, belum menerima informasi terkait praktik pendaftaran paten, baik secara umum, maupun paham secara spesifik mengenai praktik penulisan spesifikasi paten (*drafting paten*). Kegiatan secara virtual tersebut salah satunya melalui metode webinar Drafting Paten.



Adapun peserta kegiatan tersebut berhasil merangkul jangkauan sebanyak 850 audiens.

c) **Modul KI Jarak Jauh Bidang Paten**

Modul Kekayaan Intelektual jarak jauh merupakan metode Pembelajaran daring dengan berbasis pada modul kekayaan intelektual yang sudah disusun pada tahun 2019 dan 2020, yang disajikan secara visual, yaitu video penjelasan materi yang dilengkapi dengan ppt yang dapat di-download dalam bentuk pdf dan latihan soal untuk mengukur kemampuan pengguna.



pendaftaran paten: 2.500 dokumen	pendaftaran paten: <b>3.121</b> dokumen (124,84%)	pendaftaran paten: 4.500 dokumen	pendaftaran paten: <b>7.136</b> dokumen (158,57%)	pendaftaran paten: 6.750 dokumen	pendaftaran paten: <b>9.813</b> dokumen (145,37%)	pendaftaran paten: 6.750 dokumen	pendaftaran paten: <b>11.594</b> dokumen (171,76%)
Jumlah penyelesaian backlog: 300 dokumen	Jumlah penyelesaian backlog: <b>481</b> dokumen (160,33%)	Jumlah penyelesaian backlog: 600 dokumen	Jumlah penyelesaian backlog: <b>1.348</b> dokumen (224,66%)	Jumlah penyelesaian backlog: 900 dokumen	Jumlah penyelesaian backlog: <b>1.910</b> dokumen (212,22%)	Jumlah penyelesaian backlog: 900 dokumen	Jumlah penyelesaian backlog: <b>2.196</b> dokumen (244%)

e) jumlah penyelesaian Permohonan Pendaftaran Merek sesuai Peraturan Perundang-Undangan;

Target B03	Capaian B03	Target B06	Capaian B06	Target B09	Capaian B09	Target B12	Capaian B12
Jumlah Penyelesaian permohonan pendaftaran Merek: 15.000 dokumen	Jumlah Penyelesaian permohonan pendaftaran Merek: <b>33.729</b> dokumen (224,86%)	Jumlah Penyelesaian permohonan pendaftaran Merek: 20.000 dokumen	Jumlah Penyelesaian permohonan pendaftaran Merek: <b>27.268</b> dokumen (136,34%)	Target Penyelesaian permohonan pendaftaran merek 20.000 dokumen	Jumlah Penyelesaian permohonan pendaftaran merek: <b>28.399</b> dokumen (141,99%)	Target Penyelesaian permohonan pendaftaran merek 20.000 dokumen	Jumlah Penyelesaian permohonan pendaftaran merek <b>35.049</b> permohonan (175,24%)

f) Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis (IG) sesuai Peraturan Perundang-Undangan;

Target B03	Capaian B03	Target B06	Capaian B06	Target B09	Capaian B09	Target B12	Capaian B12
N/A	N/A	Jumlah Penyelesaian permohonan pendaftaran IG: 2 produk IG	Jumlah Penyelesaian permohonan pendaftaran IG: <b>NIHIL</b> (0%)	Jumlah Penyelesaian permohonan pendaftaran IG: 3 produk IG	Jumlah Penyelesaian permohonan pendaftaran IG: <b>2</b> produk IG (66,66%)	Jumlah Penyelesaian permohonan pendaftaran IG: 3 produk IG	Jumlah Penyelesaian permohonan pendaftaran IG: <b>6</b> produk IG (200%)

g) Jumlah Penyelesaian Permohonan Pencatatan Ciptaan dan Permohonan Pendaftaran Desain Industri (DI) Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Target B03 (Hak Cipta)	Capaian B03 (Hak Cipta)	Target B06 (Hak Cipta)	Capaian B06 (Hak Cipta)	Target B09 (Hak Cipta)	Capaian B09 (Hak Cipta)	Target B12 (Hak Cipta)	Capaian B12 (Hak Cipta)
Jumlah Penyelesaian Pencatatan Ciptaan 9.000	Jumlah Penyelesaian Pencatatan Ciptaan <b>14.373</b> (159,7%)	Jumlah Penyelesaian Pencatatan Ciptaan 9.000	Jumlah Penyelesaian Pencatatan Ciptaan: <b>12.347</b> (137,18%)	Jumlah Penyelesaian Pencatatan Ciptaan 9.000	Jumlah Penyelesaian Pencatatan Ciptaan: <b>18.902</b> (210,02%)	Jumlah Penyelesaian Pencatatan Ciptaan : 10.720	Jumlah Penyelesaian Pencatatan Ciptaan : <b>16.490</b> (153,82%)
Target B03 (DI)	Capaian B03 (DI)	Target B06 (DI)	Capaian B06 (DI)	Target B09 (DI)	Capaian B09 (DI)	Target B12 (DI)	Capaian B12 (DI)
Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Desain Industri 850	Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Desain Industri: <b>651</b> (76,58%)	Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Desain Industri 790	Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Desain Industri: <b>1.200</b> (151,89%)	Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Desain Industri 790	Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Desain Industri: <b>979</b> (123,92%)	Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Desain Industri 790	Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Desain Industri: <b>978</b> (123,79%)

### 3) Ekstensifikasi kerja sama luar negeri dan dalam negeri di bidang KI untuk memaksimalkan kinerja DJKI

Pada capaian target kinerja ini memiliki ukuran keberhasilan berupa "Optimalisasi Perjanjian Kerja Sama di Bidang Kekayaan Intelektual

(Implementasi Perjanjian Kerja sama yang masih berlaku atau pembentukan kerja sama baru) untuk memaksimalkan kinerja DJKI". Adapun realisasi dari ukuran keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut:

Target B03	Capaian B03	Target B06	Capaian B06	Target B09	Capaian B09	Target B12	Capaian B12
Pembahasan rekomendasi optimalisasi Perjanjian Kerja Sama di Bidang Kekayaan Intelektual	Dilakukan pembahasan optimalisasi kerja sama dalam keanggotaan DJKI/Indonesia melalui forum regional internasional: APEC, EPO, ASEAN Working Group IP Cooperation serta forum kerja sama dalam negeri: DJKI dengan PANDI <b>(100%)</b>	Penyusunan rekomendasi optimalisasi Perjanjian Kerja Sama di Bidang Kekayaan Intelektual	Dilakukan penyusunan rekomendasi optimalisasi Perjanjian Kerja Sama di Bidang Kekayaan Intelektual melalui forum kerja sama internasional dan dalam negeri: implementasi kerja sama DJKI dengan Kantor IP Afrika Barat (ARIPO; IP Sharing Experience bagi Sentra KI, Diseminasi KI untuk Pelaku Ekraf, Webinar Series: Think IP, Webinar DKTPo, Workshop KI dan KIK tingkat lanjut <b>(100%)</b>	Pelaksanaan Implementasi Kerja sama Kekayaan Intelektual atau pembentukan kerja sama baru di bidang kekayaan intelektual	Memasifkan Implementasi Kerja sama Kekayaan Intelektual atau pembentukan kerja sama baru di bidang kekayaan intelektual melalui kegiatan: diseminasi KI dan KIK; Konsultasi Teknis bidang Paten dengan Perguruan Tinggi, Litbang, Pelaku Bisnis; Kegiatan bersama ARISEPlus; koordinasi dengan stakeholder Kementerian/Lembaga seperti Kemenparekraf/BEKRAF, BAPPENAS, Kemendikbud, Setkab, LAN, BRIN, KemenkoMarves, KemenkoEkon terkait Pokja Persiapan Stranas Kelompok Kerja KI (RAN KKI) <b>(100%)</b>	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Implementasi Kerja sama Kekayaan Intelektual	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Implementasi Kerja sama Kekayaan Intelektual <b>(100%)</b>

#### 4) Modernisasi sistem penyidikan dan penyelesaian sengketa KI melalui pengembangan skema pencegahan

Pada capaian target kinerja ini terdapat 2 (dua) ukuran keberhasilan utama yaitu: 1) Terbangunnya sistem pengaduan yang handal dengan didukung fasilitas (mediasi online); dan 2) Terwujudnya mediator yang berkualitas. Adapun capaian atas target kinerja dengan ukuran keberhasilan tersebut adalah berupa edukasi dan sosialisasi pencegahan pelanggaran HKI, pemetaan potensi pelanggaran HKI pada 33 provinsi, koordinasi dengan APH (Aparat Penegak Hukum) dan Kanwil Kemenkumham di 33 provinsi terkait pemetaan pelanggaran HKI, dilakukan monev atas pelaksanaan pencegahan pelanggaran HKI. Hal tersebut dilakukan guna mendukung modernisasi sistem penyidikan dan penyelesaian sengketa KI (tidak hanya sekedar menunggu laporan aduan pelanggaran HKI).



## HASIL PENCEGAHAN PELANGGARAN KI



TOTAL ORANG/PIHAK YANG  
TEREDUKASI 272 ORANG  
MELEBIHI DARI 50% TARGET  
PERKIN YAITU 200 ORANG

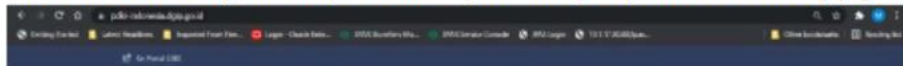
DGIP.GO.ID



### 5) Penelusuran Data Kekayaan Intelektual (PDKI) melalui web PDKI yang *mobile friendly*

Target kinerja kelima yaitu penelusuran data KI melalui aplikasi PDKI memiliki ukuran keberhasilan berupa 'Masyarakat bisa mendapatkan hasil penelusuran data KI yang diperoleh dengan mengakses web PDKI', adapun capaian dari target kinerja tersebut adalah telah tersedianya UAT (Uji Testing Penggunaan Aplikasi) untuk user eksternal DJKI (termasuk masyarakat) yang menggunakan aplikasi PDKI.

Screenshoot PDKI pada tampilan awal aplikasi <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>



DIREKTORAT JENDERAL  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
PANGKALAN DATA KEKAYAAN INTELEKTUAL





## Script Testing Pencarian Data Merek

ptdi-indonesia.djgo.go.id

Go Portal DJKI

**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**  
EKSPLOITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

**PANGKALAN DATA KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Merek:

Adanya Filter

## PENCARIAN DATA MEREK

ptdi-indonesia.djgo.go.id/ivsearch?type=trademark&keysearch=sosro&page=1

Pangkalan Data Kekayaan Intelektual

Merek:

Menampilkan: 1-4 dari 4 hasil

No. Pendaftaran	Key Search	Key Search	Key Search	Key Search
0001087344713	SOSRO	SOSRO	SOSRO	SOSRO
0001088222047	SOSRO	SOSRO	SOSRO	SOSRO
0003001022125	SOSRO	SOSRO	SOSRO	SOSRO
0003000001480	SOSRO	SOSRO	SOSRO	SOSRO

Hasil Pencarian Per Negara

Negara	Jumlah
Indonesia	136

Total Pencarian

Kategori	Jumlah
Patent	149,131
Desain Industri	80,083
Merek	1,453,997
Hak Cipta	280,491
Indikasi Geografis	116

ptdi-indonesia.djgo.go.id/detail/0002070473067?type=trademark&keysearch=sosro

Pangkalan Data Kekayaan Intelektual

Merek:

1. Rincian Pendaftaran

No. Pendaftaran: **000300400401** | Tanggal Pendaftaran: **2019-10-18**

**SOSRO**  
Merek

Detail

NO. PENDAFTARAN	TANGGAL PENDAFTARAN
000300400401	2019-10-18
0003001047004	2019-10-18
0003001047004	2019-10-18
0003001047004	2019-10-18

Publikasi: Substansi A

Terminasi: SOSRO = Susunan dari kata sosro

Kata Kunci: SOSRO, SOSRO, SOSRO

Deskripsi: SOSRO adalah merek untuk minuman kemasan yang diproduksi oleh PT. SOSRO, yang merupakan bagian dari grup perusahaan yang memproduksi minuman kemasan lainnya. Merek ini adalah merek yang sudah terdaftar dan digunakan secara luas oleh PT. SOSRO.

Alamat: SOSRO, Jl. Raya ...

Perwakilan: SOSRO, Jl. Raya ...

Perwakilan: SOSRO, Jl. Raya ...

### Langkah-langkah Script Testing

1. Memilih kategori : Merek
2. Memasukkan keysearch : sosro
3. Menampilkan data yang mengandung unsur keysearch sosro dalam bentuk list.
4. Memilih pencarian yang dibutuhkan dengan klik pada baris judul hasil penelusuran dimaksud.

## Script Testing Pencarian Data Hak Cipta

id-ID: indonesia.djpp.go.id

id-ID: indonesia.djpp.go.id



PANGKALAN DATA KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Cipta Lukisan Abstrak Cari

Adress: 2201



## PENCARIAN DATA HAK CIPTA

id-ID: indonesia.djpp.go.id/search?type=copyright&keyword=Lukisan+Abstrak&page=1

Pangkalan Data Kekayaan Intelektual

Hak Cipta Lukisan Abstrak Cari

Mulai pencarian:  AND  OR  AND NOT  Mengikuti  Tidak Mengikuti  Semua  Baru

- LUKISAN ABSTRAK**
- Lukisan Abstrak**
- Lukisan Abstrak**
- Lukisan Abstrak "KUNCI BILABU"**
- Lukisan Abstrak Dua Orang Pekerja Proyek**
- Rupa Rona yang Berupa Lukisan Abstrak**
- Lukisan Abstrak**

Revisi Pencarian Per Negara

Indonesia	2270
Canada	30
China	8
France	3
United States of America	3

Total Perpendaftaran

Paten	149.131
Salinan Industri	89.083
Model	1.418.587
Hak Cipta	285.481
Salinan Desain	180

id-ID: indonesia.djpp.go.id/detail/20130502264?type=copyright&keyword=Lukisan+abstrak

Pangkalan Data Kekayaan Intelektual

Hak Cipta Lukisan Abstrak Cari

Detail hak cipta

NO. PENDAFTARAN: 20130502264 | 19 JUNI 2013

" LUKISAN ABSTRAK DUA ORANG PEKERJA PROYEK "

Status: **Selesai**

Detail: **NO. PENDAFTARAN: 20130502264 | 19 JUNI 2013**

NO. PENDAFTARAN: 20130502264 | 19 JUNI 2013

NO. PENDAFTARAN: 20130502264 | 19 JUNI 2013

NO. PENDAFTARAN: 20130502264 | 19 JUNI 2013

NO. PENDAFTARAN: 20130502264 | 19 JUNI 2013

NO. PENDAFTARAN: 20130502264 | 19 JUNI 2013

NO. PENDAFTARAN: 20130502264 | 19 JUNI 2013

NO. PENDAFTARAN: 20130502264 | 19 JUNI 2013

NO. PENDAFTARAN: 20130502264 | 19 JUNI 2013

### Langkah-langkah Script Testing

1. Memilih kategori : Hak Cipta
2. Memasukkan keysearch : Lukisan Abstrak
3. Menampilkan data yang mengandung unsur keysearch Lukisan Abstrak dalam bentuk list.
4. Memilih pencarian yang dibutuhkan dengan klik pada baris judul hasil penelusuran dimaksud.





oleh masyarakat serta dilakukannya kegiatan sosialisasi aplikasi e-sertifikat guna meningkatkan cakupan masyarakat yang dapat memanfaatkan aplikasi e-sertifikat (telah tercapai 100%). E-sertifikat merupakan sistem terintegrasi dengan aplikasi IPROLINE Merek yang memberikan kemudahan masyarakat mampu melakukan cetak sertifikat secara mandiri sertifikat dan surat merek, perpanjangan merek, mutasi merek dimana pemohon dapat mendownload surat/sertifikat yang degenerate oleh sistem serta memiliki fungsi untuk mencetak sertifikat merek secara fisik dan digital.

**7) Pembentukan klinik-klinik konsultasi, analisis dan rekomendasi terkait KI;**

**Target kinerja ketujuh yang diemban DJKI di tahun 2021 berupa pembentukan klinik-klinik konsultasi memiliki ukuran keberhasilan berupa**

'Masyarakat dapat melakukan konsultasi, memperoleh analisis dan rekomendasi terkait KI' memiliki capaian kinerja berupa tersusunnya dokumen hasil kajian pembangunan Klinik Kekayaan Intelektual, dengan mengusung tagar "Layanan KI Hadir dan Membangun Masyarakat Berkualitas, Produktif, Berdaya Saing, dan Berbudaya" dengan hasil berupa pemetaan tugas pokok dan fungsi Klinik KI yang terdiri dari 3 (tiga) pokok layanan yang diambil berdasarkan visi-misi Presiden Joko Widodo yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, serta Revolusi Mental dan Kebudayaan (khusus terkait dengan KI Komunal). Adapun masukan dari dokumen kajian tersebut memberikan rekomendasi tindak lanjut atas hal-hal sebagai berikut:

- a) Pada tahun 2022 akan dirintis pembentukan *Mobile IP Clinic* di seluruh kantor wilayah;
- b) Membangun kerja sama lintas Kementerian/Lembaga/Instansi terkait tugas pokok *Mobile IP Clinic*; serta
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi atas *pilot project Mobile IP Clinic* di tahun 2022.

**8) Peningkatan kapasitas SDM DJKI di Unit Pusat dan wilayah melalui implementasi *Corporate University***

**Sedangkan ukuran keberhasilan untuk target kinerja kedelapan ini terdiri dari 2 (dua) ukuran keberhasilan, yaitu:**

- a) ASN Ditjen KI di Unit Pusat memperoleh pendidikan, pelatihan dan kesempatan berkantor di WIPO;

Adapun Capaian dari ukuran keberhasilan ini adalah adanya pembahasaan kerja sama antara DJKI dengan *Queensland University of Tech* yang dilakukan secara daring/*virtual meeting* dengan hasil kesepakatan adalah berupa lingkup kerja sama sebagai berikut: peningkatan perlindungan KI, peningkatan output kinerja DJKI, peningkatan kompetensi pegawai DJKI, peningkatan layanan KI, serta mendukung DJKI menjadi salah satu institusi Kantor KI Kelas Dunia.



Selain itu juga dilakukan koordinasi dengan WIPO (*World Intellectual Property Organization*) secara daring dengan salah satu Senior Program Officer WIPO, **Mr. Ye Min Than** mengenai rencana penempatan pegawai DJKI di WIPO sebagai bagian dari pembahasan mengenai *Draft Country Plan for Technical Cooperation between Indonesia and WIPO*.

**b)** ASN Ditjen KI di Unit Pusat dan Wilayah memperoleh ToT lanjutan tentang KI tingkat lanjut.

Capaian atas ukuran keberhasilan target kinerja ini adalah dilakukannya pelatihan lanjutan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Pusat dan Kantor Wilayah, serta adanya diklat pegawai. Adapun capaian dari target tersebut adalah telah terselenggaranya kegiatan pelatihan-pelatihan sebagai berikut:

- Pelatihan pelayanan prima;
- Pelatihan fungsional analisis kepegawaian;
- Pelatihan dasar CPNS;
- Pelatihan kepemimpinan PKA dan PKP;
- Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Angkatan I dan II;
- Pelatihan fungsional arsiparis;
- Penilaian kompetensi pejabat administrator dan pengawas;
- Webinar terkait KI; serta
- Pelatihan *Public Speaking*.

Adapun hasil dari pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 adalah dapat meningkatkan: kualitas pelayanan publik; integritas pegawai yang bersih dari KKN; output kinerja DJKI; kompetensi pegawai, akuntabilitas pegawai; serta mempererat sinergitas antar instansi pemerintah.



### 3.4 Akuntabilitas Anggaran

#### A. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Layanan Kekayaan Intelektual dan Realisasi Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2021

Dalam teori keuangan negara, PNBP merupakan sektor penerimaan

negara yang terkait dengan layanan masyarakat tertentu yang menjadi tanggung jawab pemerintah yang dikenal dengan istilah *revenue dominial*, yaitu merupakan penerimaan negara yang pada hakekatnya bersumber dari semua milik negara, termasuk di dalamnya kekuasaan atau kewenangan tertentu yang dalam pelaksanaannya dapat menghasilkan penerimaan negara. Penerimaan negara ini dapat berasal dari hasil pemberian fasilitas atau ijin kepada kelompok masyarakat tertentu untuk melakukan kegiatan tertentu. Oleh karena itu, penerimaan jenis ini berada di berbagai Kementerian/Lembaga tergantung pada tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan salah satu Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM yang menghasilkan PNBP melalui layanan hukum di bidang Kekayaan Intelektual.

Dapat dikatakan dari rentang tahun anggaran 2016-2021 terdapat fluktuasi kenaikan dan penurunan dari penerimaan PNBP atas layanan Kekayaan Intelektual. Adapun realisasi penerimaan PNBP atas layanan Kekayaan Intelektual yang diberikan oleh DJKI kepada masyarakat pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 833.523.379.669,00 (delapan ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh Sembilan rupiah) atau sekitar 104,19% dari target PNBP tahun 2021 Rp. 800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah). Berikut perbandingan penerimaan PNBP DJKI dalam periode 2016-2021:

Tahun Anggaran	Target PNBP	Realisasi PNBP	Persentase
2016	Rp. 329.070.000.000,00	Rp. 552.216.633.526,00	167,84%
2017	Rp. 350.000.000.000,00	Rp. 460.439.168.564,00	131,55%
2018	Rp. 461.654.000.000,00	Rp. 498.327.615.005,00	107,94%
2019	Rp. 500.000.000.000,00	Rp. 714.606.483.255, 00	142,92%
2020	Rp. 608.500.000.000,00	Rp. 789.869.148.000,00	129,80%
2021	Rp. 800.000.000.000,00	Rp. 833.523.379.669,00	104,19%

Berdasarkan table penerimaan PNBP di atas, capaian realisasi nominal PNBP pada tahun 2021 jika dibandingkan tahun 2020 mengalami sedikit penurunan mengingat di paruh kedua tahun 2021 pemberlakuan PPKM Level Tinggi/Level Ketat hampir diberlakukan secara penuh dan Pandemi COVID-19 dapat dikatakan mencapai puncak penyebaran dan menelan korban jiwa yang jauh lebih banyak dibanding masa awal penyebaran pandemic di medio

tahun 2020. Sehingga kondisi tersebut sedikit banyak juga membatasi kreativitas para insan creator selama tahun 2021.

Adapun selama tahun 2021 telah terlaksana **penyerapan anggaran 81,79%** dari alokasi DIPA anggaran Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual tahun anggaran 2021 yaitu sejumlah Rp 427.243.346.148,00,00. Persentase penyerapan anggaran tahun anggaran 2021 memang terlihat sedikit menurun dari persentase capaian penyerapan anggaran di tahun 2020 yaitu pada persentase **93,19%** dari alokasi DIPA anggaran program penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di tahun anggaran 2020 sejumlah Rp. 328.912.477.796,00.

Namun dari segi nominal realisasi anggaran lebih besar nominal realisasi anggaran di tahun 2021 yang mencapai sejumlah Rp 427.243.346.148,00,00 dibandingkan nominal realisasi anggaran di tahun 2020 yang mencapai Rp. 328.912.477.796,00. Penurunan persentase penyerapan tersebut tidak terlepas dari adanya kebijakan *refocusing* anggaran terutama untuk mengakomodir bantuan bagi pencegahan dan penanggulangan pandemic COVID-19 sebagai tindak lanjut seluruh Kementerian/Lembaga dalam merespon arahan Presiden Jokowi terkait penggunaan alokasi anggaran di K/L selama masa pandemic COVID-19 berlangsung. Untuk penilaian bagi realisasi anggaran pada tahun anggaran 2021 pada aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan DJKI mencatatkan capaian persentase sebesar 92,29 dan nilai IKPA mencatatkan sebesar 85,22. Sedangkan pada tahun 2020 mencatatkan nilai SMART pada persentase 98,55 dan nilai IKPA pada nilai persentase 94,78.

#### **B. Realisasi Penyerapan Anggaran Program Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2021**

Dengan sasaran strategis berupa **“Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM”** maka pada tahun anggaran 2021 terdapat 4 (empat) program bidang Kekayaan Intelektual yang diampu oleh Kanwil sebagai Perjanjian Kinerja dari masing-masing Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2021. Adapun realisasi dari pagu alokasi anggaran yang diampu Kanwil dalam menyelenggarakan keempat program bidang KI tersebut adalah sebagai berikut:

<b>Program</b>	<b>KRO</b>	<b>Target Tahun 2021</b>	<b>Pagu (Rp.)</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp &amp; %)</b>
<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>  <b>Kegiatan:</b>	Sosialisasi dan Diseminasi KI	Jumlah kegiatan promosi dan diseminasi KI (nominal jumlah target disesuaikan dengan usulan		

Penyelenggaraan KI di Kantor Wilayah		Kanwil masing-masing)	30.485.877.000	29.536.383.391  <b>(96,88%)</b>
		Jumlah orang yang mendapatkan edukasi/himbauan terkait Pencegahan Pelanggaran HKI di wilayah (nominal jumlah target disesuaikan dengan usulan Kanwil masing-masing)		
	Pelayanan public lainnya	Target Pelayanan KI di wilayah (nominal jumlah target disesuaikan dengan usulan Kanwil masing-masing)		
	Pemantauan produk	1 Laporan (pengawasan bidang KI di wilayah dan pendampingan penerimaan aduan pelanggaran)		

Adapun realisasi penyerapan anggaran dari pelaksanaan program bidang Kekayaan Intelektual yang diampu oleh Kanwil Kemenkumham selama tahun anggaran 2021 adalah sebesar 96,88% dari alokasi pagu anggaran.

### **3.5 Prestasi DJKI selama Tahun 2021**

#### **a. Top Digital Implementation 2021**

Tahun 2021 DJKI berhasil meraih Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menutup akhir tahun dengan meraih 2 (dua) penghargaan dalam ajang Top Digital Awards 2021. Dua penghargaan tersebut yaitu Top Digital Implementation 2021 on Ministry #Level Stars 4 dan Top Leader on Digital Implementation 2021.

dimana keberhasilan DJKI merupakan hasil dari kerja keras yang dilakukan oleh seluruh jajarannya dalam mengimplementasikan teknologi digital pada pelayanan publik untuk memberikan kepastian hukum terkait perlindungan kekayaan intelektual (KI) yang mudah, cepat dan murah.

penyerahan penghargaan Top Digital Awards 2021 yang diinisiasi oleh Majalah It Works di Hotel Raffles Jakarta, Selasa, 21 Desember 2021



#### **b. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kekayaan Intelektual**

Kegiatan ini dilakukan melalui survey IKM yang tiap tahun selalu dilaksanakan untuk mengetahui secara teratur setiap tahunnya terhadap layanan bermaksud menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat dalam rangka menilai kinerja pelayanan publiknya. Hasil survei ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan dan peningkatan kualitas mutu kinerja. kegiatan IKM dilakukan melalui riset kualitatif (FGD atau in depth interview). Sedangkan apabila ingin melihat efektifitas layanan para frontliner atau customer service dapat menggunakan mystery shopper. Lebih jauh survei kuantitatif dapat membuat tracking dan indeks kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan untuk program service improvement. Beberapa metode dan desain risetnya relatif sudah memiliki standar baku. Riset kepuasan pelanggan ideal dapat menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. survei IKM dilakukan pada 8 wilayah yaitu : Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Bali, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan setiap tahunnya yang ditentukan berdasarkan range banyaknya permohonan KI dari wilayah tersebut. Survei indeks kepuasan masyarakat dilaksanakan oleh DJKI bersama dengan pihak ke-3 di luar Kementerian Hukum dan HAM yaitu dengan Konsultan Independen berskala Nasional yang biasa melakukan survey atas layanan kepuasan masyarakat dari suatu lembaga pemerintah dan non pemerintah yaitu Katadata Insight Center, berdasarkan PERMEN PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik, semua unit pelayanan instansi pemerintah baik yang langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. hasil survey IKM atas layanan KI dapat digambarkan sebagai berikut:

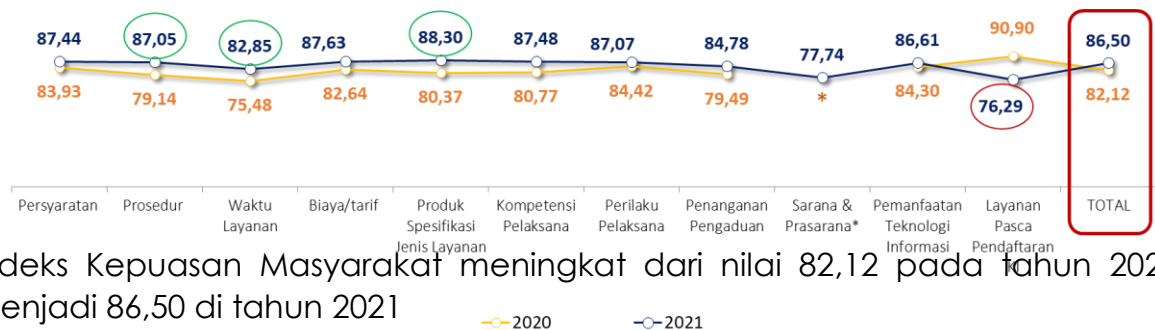
Capaian 2020	Capaian 2021
3,39	3,39

Pendekatan Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN-RB tersebut, ada 9 (sembilan) unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat. Namun untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, pada survei ini menggunakan 11 unsur kepuasan masyarakat, yakni:

- Persyaratan
- Prosedur
- Waktu Pelayanan
- Biaya/Tarif
- Produk spesifikasi jenis pelayanan
- Kompetensi Pelaksana
- Perilaku Pelaksana
- Sarana Layanan
- Penanganan pengaduan, saran dan masukan
- pemanfaatan TI
- layanan Pasca Pendaftaran KI

Survei ini menargetkan 800 responden, namun pada pelaksanaannya berhasil mendapatkan sebanyak **1.089 responden**. Sehingga dengan jumlah responden tersebut, *margin of error* yang diperoleh adalah sebesar  $\pm 2,97\%$  pada interval kepercayaan 95%. Jumlah responden terbanyak yakni Jawa Barat dan Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan jumlah pemohon yang memang lebih banyak pada wilayah tersebut.

Hasil survei indeks kepuasan Masyarakat, pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dapat digambarkan sebagai berikut:

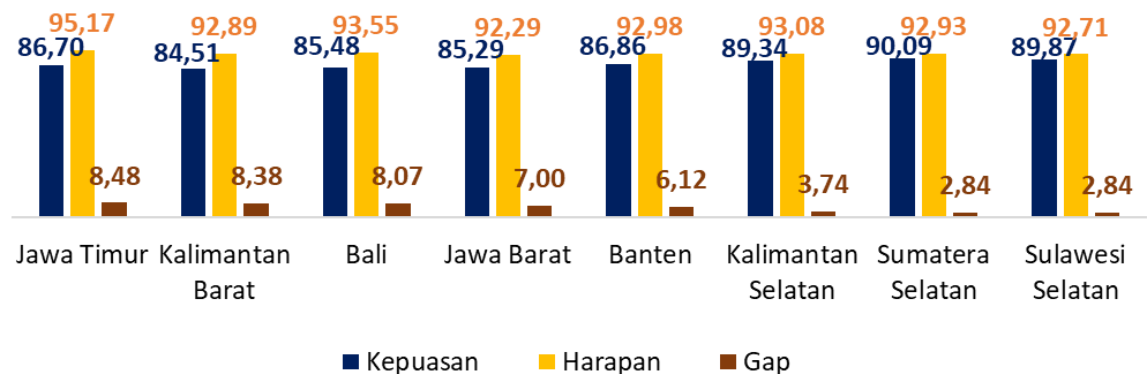


Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat dari nilai 82,12 pada tahun 2020 menjadi 86,50 di tahun 2021

**Peningkatan tertinggi** adalah parameter **prosedur layanan, waktu layanan** dan **produk spesifikasi jenis layanan**. Hanya indeks kepuasan parameter **layanan pasca pendaftaran KI** terlihat cukup menurun dibandingkan tahun sebelumnya

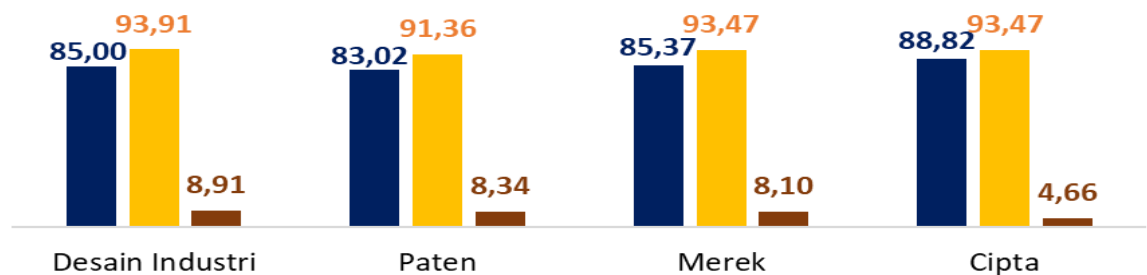
selain itu survei IKM dilakukan untuk melihat antara kepuasan, harapan dan GAP (KESENJANGAN ANTARA PERSEPSI DAN HARAPAN) yang dihasilkan pada setiap pemohon layanan KI, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gap Menurut Provinsi**



hasil analisa dari jenis permohonan, bahwa Posisi 4 teratas provinsi dengan nilai gap tertinggi adalah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bali, dan Jawa Barat, dimana permohonan di wilayah tersebut relatif lebih kritis dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap layanan permohonan KI, dibandingkan pemohon di provinsi lainnya. Sedangkan menurut jenis permohonan

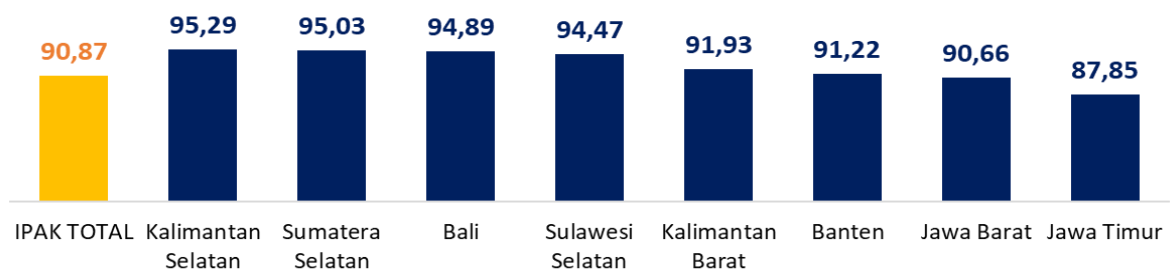
**Gap Menurut Jenis Permohonan**



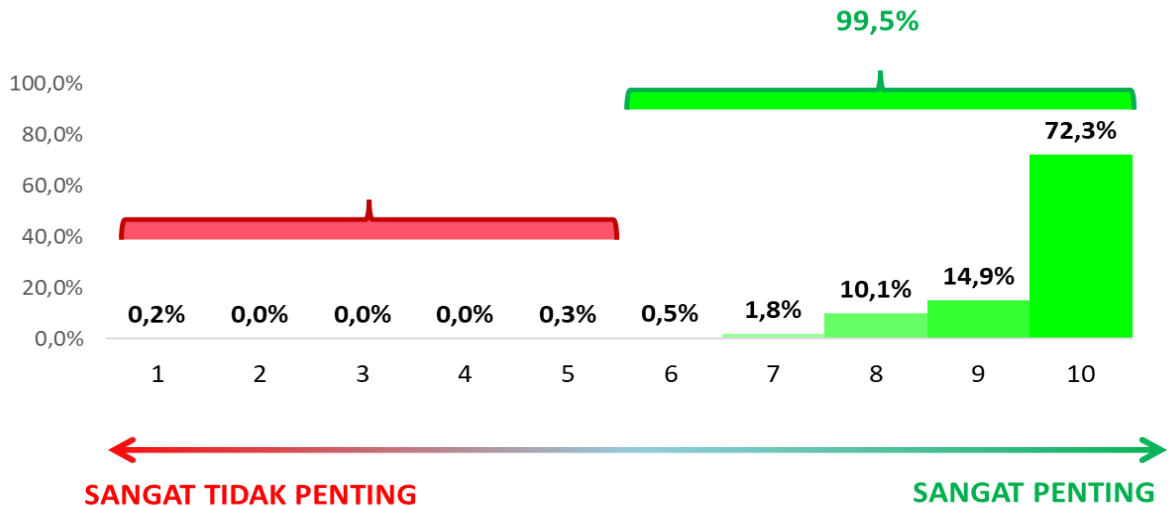
dengan melihat grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa pemohon dengan kategori Desain Industri, Paten, dan Merek memiliki nilai gap tertinggi yakni di atas 8,00. Sementara kategori Cipta nilai gap-nya cukup rendah yakni sebesar 4,66.

selain itu survei IKM juga dilaksanakan untuk melihat IKPA (Indeks Persepsi Anti Korupsi) menurut Provinsi hampir seluruhnya berada dalam kategori *sangat baik*. 4 Provinsi dengan indeks tertinggi berturut-turut adalah Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Bali, dan Sulawesi Selatan,

**IPAK Menurut Provinsi**



dalam survei DJKI juga mendesain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan di mulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. misalnya dalam survei apakah KI dinilai sangat penting dalam pandangan Pemohon



dari hasil survei tersebut bahwa 72,3% **responden memberikan nilai tertinggi yakni 10 atau sangat penting**. Artinya responden dalam hal ini mereka yang sudah mengurus dan mendaftarkan kekayaan intelektualnya ke DJKI, telah memiliki **awareness terhadap KI yang baik**.

hasil dari resume tingkat kepuasan pengguna layanan DJKI tahun 2021 dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1) dalam indeks kepuasan masyarakat

- Indeks Kepuasan Masyarakat Total Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2021 sebesar 3,46 (skala 4) atau 86,50 (skala 100), sehingga masuk dalam kategori BAIK karena berada pada interval 76,61 – 88,30. Jika Dibandingkan dengan survei sebelumnya, IKM mengalami peningkatan yakni dari 82,12 pada tahun 2020 menjadi 86,50 di tahun 2021
- Parameter dengan indeks tertinggi adalah Produk Spesifikasi Jenis Layanan yakni sebesar 3,53 (88,30) dan hampir masuk dalam kategori *sangat baik*. Hampir seluruh parameter lainnya juga berada dalam kategori *baik*. Adapun parameter dengan nilai indeks terendah adalah Layanan Pasca Pendaftaran KI yakni sebesar 3,05 (76,90)

2) kesenjangan harapan dan kualitas layanan

Secara umum, parameter layanan yang memiliki nilai kesenjangan (gap) antara kepuasan dan harapan yang tertinggi adalah parameter Layanan Pasca Pendaftaran KI ,Sementara gap terendah adalah Biaya/Tarif Layanan dan Produk Spesifikasi Jenis Layanan

3) Hampir seluruh responden menyatakan bahwa mengurus dan mendaftarkan kekayaan intelektual bagi pemilik produk/karya/ciptaan

itu penting. Namun responden menilai kesadaran akan kekayaan intelektual di Indonesia masih terbilang rendah. Termasuk kelompok UMKM dan pelaku usaha yang sudah memiliki produk, baru sedikit yang mengetahui tentang pentingnya mendaftarkan HKI

- 4) Di sisi lain, potensi kekayaan intelektual di Indonesia sangat tinggi. Dari sisi UMKM saja tercatat ada 64,1 juta UMKM, namun baru 10.632 yang mengurus merek dagangnya. Dari sektor KI Komunal pun cukup potensial namun menurut hasil in-depth interview dapat dikatakan potensi ini juga belum sepenuhnya tergarap dengan baik
- 5) Sosialisasi dan edukasi menjadi penting untuk dilakukan agar kesadaran pelaku usaha dan masyarakat secara umum terhadap kekayaan intelektual semakin meningkat. Sinergitas antar instansi terkait juga diharapkan terjalin baik, sehingga dapat saling mendukung untuk mewujudkan peningkatan awareness terhadap KI
- 6) Peran pemerintah setempat dan instansi terkait juga terlihat sudah cukup baik. Dari In-Depth Interview diketahui bahwa cukup banyak narasumber yang mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat ketika mendaftarkan kekayaan intelektual

Rekomendasi hasil kegiatan survei sebagai salah satu masukan untuk perbaikan peningkatan pelayanan permohonan kekayaan intelektual yang semakin baik dan berkualitas adalah sebagai berikut:

- 1) Jangka waktu dari tahap proses pengajuan hingga penerbitan dipercepat
- 2) kepastian waktu dan kejelasan atau progress dari permohonan KI
- 3) memperbanyak sosialisasi
- 4) memaksimalkan sistem online
- 5) ketersediaan klinik konsultasi secara rutin
- 6) keringanan biaya atau ketersediaan subsidi biaya

### c. POP HC (PERSETUJUAN OTOMATIS PENCATATAN HAK CIPTA)

dimana tahun 2021 DJKI me-launching aplikasi POP HC dimana POP

mempermudah pendaftaran pencatatan Hak Cipta dalam hitungan menit. POP HC merupakan sistem yang diciptakan untuk mempercepat proses persetujuan hak cipta yang sebelumnya memakan waktu kurang lebih satu hari (one day service) menjadi dalam hitungan menit. Sistem ini diluncurkan bersamaan dengan pencanangan 2022 sebagai Tahun Hak Cipta. sejak di launching pada tanggal 20 Desember 2021 telah berhasil mencatatkan 9110 permohonan





- d. **APLIKASI SIVIKI (LAYANAN KONSULTASI DENGAN VIDEO CONFERENCE)**  
SIVIKI memiliki fitur share screen dan screen record yang memudahkan petugas DJKI dan masyarakat terkait permohonan KI.”



pandemi Covid-19 yang masih melanda Tanah Air mengharuskan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menutup konsultasi secara

tatap muka melalui Customer Service yang ada pada Loker Layanan Terpadu DJKI. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap informasi kekayaan intelektual (KI) terus meningkat setiap tahunnya, Selain Customer Service pada Loker Layanan Terpadu, DJKI juga sebenarnya memiliki saluran lain yang bisa dimanfaatkan oleh para pemohon atau calon pemohon dalam mendapatkan informasi terkait kekayaan intelektual, yaitu melalui Call Center 152, Live Chat pada website DJKI, e-mail, dan media sosial DJKI baik Facebook, Twitter, maupun Instagram, Namun, tak bisa dimungkiri bahwa konsultasi secara langsung melalui Customer Service memiliki kelebihan tersendiri jika dibandingkan melalui saluran lainnya. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait konsultasi secara tatap muka, DJKI sebelumnya telah mencoba membuat pilot project konsultasi melalui aplikasi video conference Zoom, ternyata respon masyarakat sangat mendukung dan sesuai dengan harapan, “SIVIKI memiliki fitur share screen yang tentu akan memudahkan petugas DJKI apabila ingin melakukan demo permohonan kepada masyarakat atau menampilkan dokumen-dokumen tertentu. Kemudian terdapat pula fitur screen record yang memungkinkan masyarakat memohon file rekaman untuk dapat diputar kembali percakapan atau konsultasi yang telah dilakukan dengan petugas DJKI , selain itu Dengan aplikasi SIVIKI, masyarakat tak perlu lagi datang ke Loker Layanan Terpadu DJKI untuk berkonsultasi dengan petugas dan expert yang ada di DJKI

- e. **OPERA (Meningkatkan Kualitas SDM)**

diartikan sebagai organisasi yang terampil mengelola sumber daya manusia (SDM) dalam menciptakan, memperoleh, dan mentransfer pengetahuan serta memodifikasi perilakunya untuk mencerminkan pengetahuan dan wawasan baru. dimana tujuan dari OPERA yaitu terciptanya organisasi pembelajaran (learning organization) di DJKI sebagai organisasi yang mendukung adaptif dan agile untuk

mendukung upaya menjadi *THE BEST IP OFFICE IN THE WORLD* serta program PROGRAM CORPU DAN VISI RB terwujudnya pemerintahan kelas dunia KemenkumHAM. Sistem pembelajaran OPERA dengan sistem Offline (class/discussion room) dan Online (video conference, zoom, etc).

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahun 2021 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, serta pelaksanaan Renstra DJKI 2020- 2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021

Dimana Penetapan indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahap awal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis menuju terwujudnya untuk capaian DJKI. Dalam proses penetapannya, senantiasa terus dilakukan penyempurnaan indikator kinerja yang merefleksikan prioritas DJKI dan kondisi terkini dengan target yang menantang. Dengan harapan, sistem manajemen ini tidak hanya menjadi rutinitas, namun harus mampu menggambarkan dan mendorong reformasi organisasi. Pencapaian kinerja merupakan wujud sinergi seluruh jajaran DJKI dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2021.

Secara ideal kualitas perencanaan yang baik adalah ketika capaian yang dihasilkan atau terealisasi sesuai atau mendekati dengan jumlah yang telah ditargetkan. Jika realisasi atau capaian jauh melebihi dari yang jumlah yang ditargetkan hingga mencapai anomali, dapat dikatakan perencanaan tersebut kurang efektif. Begitu pula jika jumlah realisasi jauh tidak mencapai dari yang ditargetkan pun perencanaan dapat dikatakan proses perencanaan belumlah efektif. Pada tahun 2021 tidak lagi terdapat capaian atau realisasi dengan status anomali. Walaupun masih terdapat output yang belum secara maksimal mencapai sesuai dengan yang ditargetkan, terutama terkait dengan kinerja yang berbasis pada penerimaan aduan pelanggaran hak kekayaan intelektual atau pengajuan upaya hukum dari pemohon Kekayaan Intelektual.

Sepanjang tahun 2021 merupakan tahun yang masih penuh dengan tantangan, dengan adanya Pandemic Covid-19 yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia, sehingga memberikan dampak yang signifikan

pada berbagai aspek, dalam hal ini DJKI melakukan perubahan arah kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah dengan melakukan dengan tetap memantau target-target kinerja DJKI sehingga dalam menghadapi situasi seperti ini DJKI dapat mengambil langkah-langkah terobosan yang cepat dalam merespon kebijakan pemerintah khususnya untuk tetap dapat memberikan pelayanan masyarakat dan sekaligus menyokong profitable melalui pemasukan PNBK dari layanan KI guna menyokong pertahanan ekonomi di masa Pandemi COVID-19, dengan Tagline DJKI *Work From Anywhere, Anytime* selama masa Pandemi COVID-19 berlangsung DJKI melakukan langkah strategis sebagai berikut:

- 1) Penetapan indikator kinerja merupakan salah satu instrumen manajemen dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis menuju terwujudnya visi dan misi DJKI. Untuk itu, penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih terukur, berkualitas, dan memiliki target yang menantang;
- 2) Memastikan bahwa Indikator Kinerja Utama yang tercantum di dalam dokumen Perjanjian Kinerja unit kerja akan dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang tercantum di dalam Rencana Strategis 2020-2024;
- 3) Menerapkan sistem manajemen risiko dalam upaya pencapaian indikator kinerja;
- 4) Menyelaraskan Sasaran Program pada tingkat Eselon II, dan Sasaran Kegiatan pada tingkat Kegiatan, dengan Sasaran Strategis;
- 5) Menyukseskan tahun 2021 sebagai Tahun Paten Nasional walaupun masih berada dalam kondisi Pandemi Covid-19, sebagai upaya DJKI dalam mengawal program pemerintah yaitu Pemulihan Ekonomi Nasional melalui segenap upaya jemput bola seperti Safari Paten guna mendorong peningkatan permohonan KI dari dalam negeri;
- 6) Mengawal pelaksanaan target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di bidang Kekayaan Intelektual secara optimal, dimana secara umum capaian dari target kinerja Kanwil Kemenkumham di bidang Kekayaan Intelektual mencapai nilai kinerja hampir 100% terpenuhi untuk 2 (dua) target kinerja terkait implementasi kerja sama yang dilakukan oleh Kanwil dalam rangka meningkatkan permohonan KI dan terkait penegakkan hukum di bidang KI dengan 3 ukuran keberhasilan dari kedua target kinerja tersebut;
- 7) Melakukan penyelesaian data tunggakan sertifikat permohonan KI;
- 8) Menyusun Rencana Kerja yang ada, dengan memperhatikan output outcome, timeline-nya, dengan rencana penyerapan anggaran dan realisasi hasilnya;
- 9) Melakukan optimalisasi penggunaan Layanan Kekayaan Intelektual secara keseluruhan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi;

10) Melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap pelaksanaan kegiatan.

langkah-langkah tersebut sebagai gambaran akan komitmen kami walaupun covid -19 masih berlangsung. DJKI selalu berupaya memberikan kinerja terbaik sesuai visi kami kepada masyarakat melalui layanan kekayaan intelektual guna menjaga kinerja DJKI agar tetap dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara, selain itu DJKI secara garis besar tetap melakukan komitmen, dukungan dan keterlibatan semua pihak untuk mendapatkan capaian kinerja yang berhasil, walaupun capaian kinerja dinyatakan berhasil tetapi masih terdapat permasalahan utama yang dihadapi oleh DJKI pada tahun 2021, antara lain:

- 1) Diberlakukannya PPKM selama tahun 2021, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal;
- 2) Masih berlangsungnya Pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya refocusing anggaran, hal ini menjadi salah satu penghambat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan;
- 3) Pengembangan aplikasi system online yang masih belum dapat digunakan secara maksimal;
- 4) Masih belum selesainya perubahan peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual dan belum adanya peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual Komunal.

Selanjutnya di tahun mendatang, yaitu Tahun 2022 akan menjadi Tahun Tematik bagi Hak Cipta, maka salah satu agenda besar yang harus dikawal bersama adalah pada RUU Desain Industri yang masuk sebagai Prolegnas Prioritas di tahun 2022 yang akan di bahas di DPR dan diharapkan agar proses pembahasannya dapat berjalan lancar, serta dapat berlanjut dengan pembahasan RUU Paten. Selain itu di tahun 2022 juga terdapat beberapa program unggulan DJKI yang harus kita eksekusi dan sukseskan bersama. Adapun secara singkat dapat kami sampaikan Program Unggulan DJKI Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

- Roving Seminar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Penerimaan Negara Bukan Pajak “Berkeadilan”;
- Persetujuan Otomatis Pelayanan Hak (Hak Cipta) Kekayaan Intelektual (POP-HKI);
- *Mobile Intellectual Property Clinic*;
- *Intellectual Property Marketplace*;
- *Drafting Patent Camp*;
- Penyusunan Peta Potensi Ekonomi Kekayaan Intelektual Komunal;
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Aktif Mendengar untuk Memberi Solusi;
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Aktif Belajar dan Mengajar;

- Sertifikasi Pusat perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual;
- Sertifikasi ISO 9001:2015 (Sertifikasi Manajemen Mutu);
- Sertifikasi ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyusapan);
- Sertifikasi Ahli Penyuluh Anti Korupsi;
- Audit dan Peningkatan Sistem Teknologi Informasi;
- Sinergi dan Kolaborasi Antar Unit dengan Unit Layanan Pengadaan; serta
- Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa.

# LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Freddy Harris  
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selanjutnya disebut pihak pertama

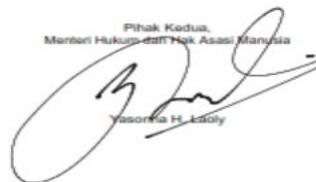
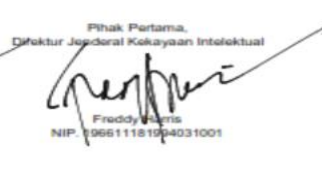
Nama : Yasonna H. Laoly  
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2020

Pihak Kedua, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
 Pihak Pertama, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
 Yasonna H. Laoly  
 Freddy Harris  
 NIP. 06611181994031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,3
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Kekayaan Intelektual	1

No.	Output Program	Indikator Output	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penegakan dan Pelayanan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual	Persentase Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	99
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual	12
		Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100
		Persentase Peningkatan Produk Kekayaan Intelektual dan Komunal yang Dilindungi (Prioritas Nasional)	6
2.	Layanan Manajemen Internal Kementerian Hukum dan HAM	Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Ditjen Kekayaan Intelektual	1

No.	Kegiatan	Anggaran
	<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>Rp. 254.568.954.000,-</b>
1	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	Rp. 4.541.666.000,-
2	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pembertayaan Kekayaan Intelektual	Rp. 22.000.000.000,-
3	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	Rp. 6.445.914.000,-
4	Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Rp. 7.089.670.000,-
5	Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	Rp. 4.005.607.000,-
6	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	Rp. 180.000.000.000,-
7	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 30.485.677.000,-

	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 297.110.514.000,-</b>
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual	Rp. 297.110.514.000,-

Jakarta, November 2020

Pihak kedua,  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pihak Pertama,  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Yasonna H. Laoly

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S  
NIP 19661115 199403 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S  
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, November 2020

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S  
NIP 19661115 199403 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DIREKTUR CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syarifuddin  
Jabatan : Direktur Cipta dan Desain Industri

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Freddy Harris  
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

  
Freddy Harris  
NIP. 196611181994031001

Pihak Pertama,  
Direktur Cipta dan Desain Industri

  
Syarifuddin  
NIP. 197112182002121001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DIREKTUR CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI  
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,15

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,30

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Hak Cipta dan Desain Industri di Seluruh Indonesia	1. Persentase Penyelesaian Pencatatan Hak Cipta	100%
		2. Persentase Penyelesaian Permohonan Desain Industri	100%
		3. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Hak Cipta dan Desain Industri	100%

No.	Kegiatan	Anggaran
	<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 4.005.607.000,-</b>
1.	Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	Rp. 4.005.607.000,-

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

  
Freddy Harris  
NIP. 196611181994031001

Pihak Pertama,  
Direktur Cipta dan Desain Industri

  
Syarifuddin  
NIP. 197112182002121001

**LAMPIRAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KECIATAN  
TINGKAT UNIT ESELON II**

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri  
Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	TARGET
1	2	3	4
1	Terlindunginya Hak Cipta dan Desain Industri di Seluruh Indonesia	Rekomendasi Pelayanan Hukum di Bidang Hak Cipta dan Desain Industri	300 Rekomendasi Kebijakan
		Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Hak Cipta dan Desain Industri	1 NSPK
		Layanan Pencatatan Hak Cipta	39000 layanan
		Layanan Pendaftaran Desain Industri	3640 layanan

Kegiatan	Anggaran
1. Menyelesaikan Perkara di Bidang Hak Cipta dan Desain Industri	Rp. 140.304.000,00
2. Menyusun Bahan Hukum di Bidang Hak Cipta dan Desain Industri	Rp. 1.450.362.000,00
3. Mengelola Lembaga Manajemen Kolektif	Rp. 1.382.940.000,00
4. Menyelenggarakan Layanan Pencatatan Hak Cipta	Rp. 40.020.000,00
5. Menyelenggarakan Layanan Pendaftaran Desain Industri	Rp. 44.590.000,00

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

  
Freddy Harris  
NIP. 196811181994031001

Pihak Pertama,  
Direktur Cipta dan Desain Industri

  
Syarifuddin  
NIP. 197112182002121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DIREKTUR PENYIDIKAN DAN PENYELESAIN SENGKETA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syarifuddin  
Jabatan : Direktur Penyidikan dan Penyelesain Sengketa

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2021

Direktur Cipta dan Desain Industri

  
Syarifuddin  
NIP. 197112182002121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DIREKTUR KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN  
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Daulat Pandapotan Sititonga  
Jabatan : Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Freddy Harris  
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Freddy Harris

NIP. 196611181994031001

Pihak Pertama,  
Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan  
Kekayaan Intelektual

Daulat Pandapotan Sititonga

NIP. 196205281989031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DIREKTUR KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,15

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindungnya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,30

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan potensi kekayaan intelektual mempunyai nilai ekonomis	1. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual 2. Persentase Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Perlindungan KI	12% 50%

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 22.000.000.000,-
1.	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	Rp. 22.000.000.000,-

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Freddy Harris

NIP. 196611181994031001

Pihak Pertama,  
Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan  
Kekayaan Intelektual

Daulat Pandapotan Sititonga

NIP. 196205281989031001

**LAMPIRAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KEGIATAN**  
**TINGKAT UNIT ESELON II**

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI  
Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	TARGET
1	Mewujudkan Potensi Kekayaan Intelektual Mempunyai Nilai Ekonomis	Kerjasama di Bidang Kekayaan Intelektual	11 Kesepakatan
		Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	2500 orang
		Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Kekayaan Intelektual	1 NSPK
		Pengembangan Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal	156 layanan

Kegiatan	Anggaran
1. Membuat Kerjasama Luar Negeri dan Dalam Negeri	Rp. 6.214.132.000,00
2. Mengimplementasikan Kerjasama di Bidang Kekayaan Intelektual	Rp. 4.281.395.000,00
3. Mengembangkan Sistem Kekayaan Intelektual Nasional	Rp. 5.437.927.000,00
4. Membangun Kesadaran Instansi Pemerintah dalam Mendukung Sistem KI	Rp. 767.550.000,00
5. Diseminasi Kekayaan Intelektual	Rp. 4.162.996.000,00
6. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	Rp. 100.000.000,00
7. Pemetaan dan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Integrasi Data Inventarisasi KIK antar	Rp. 592.579.000,00
8. Kementerian/Lembaga pada Pusat Data Kekayaan Intelektual	Rp. 407.421.000,00

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,  
Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan  
Kekayaan Intelektual

  
Freddy Harris  
NIP. 196311181994031001

  
Daulat Pandapotan Silitonga  
NIP. 196205281989031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**DIREKTUR KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN**  
**KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Daulat Pandapotan Silitonga  
Jabatan : Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2021

Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan  
Kekayaan Intelektual

  
Daulat Pandapotan Silitonga  
NIP. 196205281989031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nofi  
Jabatan : Direktur Merek dan Indikasi Geografis

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Freddy Harris  
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Freddy Harris  
NIP. 196611181994031001

Pihak Pertama,  
Direktur Merek dan Indikasi Geografis

Nofi  
NIP. 196903091992031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS  
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,15

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindungnya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,30

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindungi Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia	1. Persentase merek dan indikasi geografis yang dilindungi	12%
		2. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Merek dan Indikasi Geografis	100%

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 6.445.914.000,-
1	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	Rp. 6.445.914.000,-

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Freddy Harris  
NIP. 196611181994031001

Pihak Pertama,  
Direktur Merek dan Indikasi Geografis

Nofi  
NIP. 196903091992031002

**LAMPIRAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KEGIATAN  
TINGKAT UNIT ESELON II**

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Merek dan Indikasi Geografis  
Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	TARGET
1	Terlindungnya Merek dan Indikasi Geografis di Seluruh Indonesia	Rekomendasi Pelayanan Hukum di Bidang Merek dan Indikasi Geografis	510 Rekomendasi Kebijakan
		Fasilitasi Banding Merek	510 Rekomendasi Kebijakan
		Norma, Standar, Prosedur, Kriteria di Bidang Sistem Merek dan Indikasi Geografis	1 NSPK
		Layanan Pendaftaran Merek	62720 layanan
		Layanan Pendaftaran Indikasi Geografis	11 layanan


Kegiatan	Anggaran
1. Menyelesaikan Perkara di Bidang Merek dan Indikasi Geografis	Rp. 672.326.000,00
2. Menyusun Bahan Hukum di Bidang Merek dan Indikasi Geografis	Rp. 1.948.240.000,00
3. Fasilitasi Banding Merek	Rp. 492.244.000,00
4. Operasional Komisi Banding Merek	Rp. 927.976.000,00
5. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Sistem Merek dan Indikasi Geografis	Rp. 510.563.000,00
6. Menyelenggarakan Layanan Pendaftaran Merek	Rp. 512.409.000,00
7. Menyelenggarakan Layanan Pendaftaran Indikasi Geografis	Rp. 1.382.154.000,00

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

  
Freddy Harris  
NIP. 196611181994031001

Pihak Pertama  
Direktur Merek dan Indikasi Geografis

  
Nofri  
NIP. 196903091992031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nofri  
Jabatan : Direktur Merek dan Indikasi Geografis

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2021

Direktur Merek dan Indikasi Geografis

  
Nofri  
NIP. 196903091992031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DIREKTUR PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN  
RAHASIA DAGANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dede Mia Yusanti  
Jabatan : Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Freddy Harris  
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Freddy Harris  
NIP. 196611181994031001

Pihak Pertama,  
Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit  
Terpadu dan Rahasia Dagang



Dede Mia Yusanti  
NIP. 196407051992032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DIREKTUR PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA  
DAGANG DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,15

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,30

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Paten, DTLST dan RD di seluruh Indonesia	1. Persentase Paten, DTLST, dan RD yang dilindungi 2. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Paten, DTLST, dan RD	12% 100%

No.	Kegiatan	Anggaran
	<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 7.089.870.000,-</b>
1	Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Rp. 7.089.870.000,-

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Freddy Harris  
NIP. 196611181994031001

Pihak Pertama,  
Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit  
Terpadu dan Rahasia Dagang



Dede Mia Yusanti  
NIP. 196407051992032001

**LAMPIRAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KEGIATAN  
TINGKAT UNIT ESELON II**

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang

Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	TARGET
1	Terlindungnya Paten, DTLST, dan RD di Seluruh Indonesia	Rekomendasi Pelayanan Hukum di Bidang Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	240 Rekomendasi Kebijakan
		Fasilitasi Banding Paten	25 Rekomendasi Kebijakan
		Layanan Permohonan Paten, DTLST, dan RD	11900 layanan
		Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Sistem Paten, DTLST, dan RD	1 NSPK

Kegiatan	Anggaran
1. Layanan Permohonan Paten	Rp. 3.234.901.000,00
2. Menyelesaikan Perkara di Bidang Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Rp. 453.031.000,00
3. Menyusun Bahan Hukum di Bidang Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Rp. 1.561.080.000,00
4. Menyelenggarakan sidang putusan Banding paten	Rp. 65.260.000,00
5. Operasional komisi banding paten	Rp. 954.024.000,00
6. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Sistem Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	Rp. 821.574.000,00

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

  
Fredy Harris  
NIP. 196611181994031001

Jakarta, Januari 2021  
Direktur Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

  
Dede Mia Yusanti  
NIP. 196407051992032001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DIREKTUR PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN  
RAHASIA DAGANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Dede Mia Yusanti  
Jabatan : Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2021

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

  
Dede Mia Yusanti  
NIP. 196407051992032001





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DIREKTUR PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Edison Sitorus, M.H.  
Jabatan : Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Freddy Harris  
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Freddy Harris  
NIP. 106611181094031001

Pihak Pertama,  
Direktur Penyidikan dan Penyelesaian  
Sengketa



Drs. Edison Sitorus, M.H.  
NIP. 66120397 000001 0 00

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DIREKTUR PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA  
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,15

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindungnya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,30

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa HKI yang Optimal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Persentase Penyelesaian Sengketa HKI secara Optimal	100% 60%

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 4.005.607.000,-
1	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	Rp. 4.005.607.000,-

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Freddy Harris  
NIP. 106611181094031001

Pihak Pertama,  
Direktur Penyidikan dan Penyelesaian  
Sengketa



Drs. Edison Sitorus, M.H.  
NIP. 66120397 000001 0 00

**LAMPIRAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KEGIATAN  
TINGKAT UNIT ESELON II**

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa  
Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa HKI yang Optimal	Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Norma, Standar, Prosedur, Kriteria di Bidang Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Penanganan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Pengawasan dan Pemantauan di Bidang Kekayaan Intelektual	400 Orang 1 NSPK 20 Perkara 20 laporan

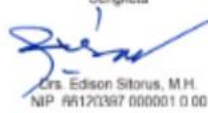
Kegiatan	Anggaran
1. Edukasi Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp. 538.252.000,00
2. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	Rp. 1.564.729.000,00
3. Verifikasi Ketayakan Aduan Pelanggaran HKI	Rp. 540.830.000,00
4. Pelaksanaan Penindakan Aduan Pelanggaran HKI	Rp. 1.214.580.000,00
5. Memantau/Survey Wilayah yang Berpotensi Terjadi Pelanggaran HKI	Rp. 147.216.000,00

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

  
Freddy Harris  
NIP. 1960111701994031001

Pihak Pertama,  
Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

  
Drs. Edison Sitorus, M.H.  
NIP. 66120397 000001 0 00



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DIREKTUR PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini

Nama : Drs. Edison Sitorus, M.H.


Jabatan : Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Pertama,  
Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

  
Drs. Edison Sitorus, M.H.  
NIP. 66120397 000001 0 00



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sucipto  
Jabatan : Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Freddy Harris  
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

  
Freddy Harris  
NIP. 196611181994031001

Pihak Pertama,  
Direktur Teknologi Informasi  
Kekayaan Intelektual

  
Sucipto  
NIP. 197103251999031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,15

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,30

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Sistem Manajemen Data Informasi dan Pelayanan Kekayaan Intelektual Berbasis IT yang Sistematis, Efektif, Handal dan Berkelanjutan	Peningkatan Layanan Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual yang Aman dan Handal	99,00%

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 180.000.000.000,-
1.	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	Rp. 180.000.000.000,-

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

  
Freddy Harris  
NIP. 196611181994031001

Pihak Pertama,  
Direktur Teknologi Informasi  
Kekayaan Intelektual

  
Sucipto  
NIP. 197103251999031001

LAMPIRAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KEGIATAN

TINGKAT UNIT ESELON II

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual  
Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	TARGET
1	Terwujudnya Sistem Manajemen Data Informasi dan Pelayanan Kekayaan Intelektual Berbasis IT yang Sistematis, Efektif, Handal dan Berkelanjutan	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Sistem dan Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual Sistem dan Teknologi Informasi di Bidang Kekayaan Intelektual	1 NSPK 1 Sistem Informasi

Kegiatan

Anggaran

- |   |     |                    |
|---|-----|--------------------|
| 1. Perencanaan dan Evaluasi sistem informasi Manajemen Kekayaan Intelektual                             | Rp. | 9.014.312.000,00   |
| 2. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Sistem dan Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual | Rp. | 388.054.000,00     |
| 3. Layanan Sistem Informasi Manajemen Kekayaan Intelektual  | Rp. | 49.714.400.000,00  |
| 4. Data Center Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual   | Rp. | 119.783.000.000,00 |
| 5. Alih pengetahuan layanan teknologi informasi Kekayaan Intelektual                                    | Rp. | 1.100.234.000,00   |

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

  
Freddy Harris  
NIP. 196611181994031001

Jakarta, Januari 2021

Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

  
Sucipto  
NIP. 197103251999031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sucipto  
Jabatan : Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2021

Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

  
Sucipto  
NIP. 197103251999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Charani Idha Kosmayawati  
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Freddy Harris  
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Freddy Harris  
NIP. 196611181994031001

Pihak Pertama,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Kekayaan Intelektual

Charani Idha Kosmayawati  
NIP. 196110081986112001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	82,0 86,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Kekayaan Intelektual	1

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajerial dan Teknis Ditjen Kekayaan Intelektual	Indeks RB Ditjen Kekayaan Intelektual SKM terhadap Layanan Ditjen Kekayaan Intelektual Nilai SAKIP Ditjen Kekayaan Intelektual "Bak" Nilai perencanaan anggaran DUKI berorientasi pada hasil SMART OJA Nilai IKPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	80 3,30 80 92 78

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 297.116.514.000.-
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual	Rp. 297.110.514.000.-

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Freddy Harris  
NIP. 196611181994031001

Pihak Pertama,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Kekayaan Intelektual

Charani Idha Kosmayawati  
NIP. 196110081986112001

**LAMPIRAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KEGIATAN  
TINGKAT UNIT ESELON II**

Unit Organisasi Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  
Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajerial dan Teknis Dijen Kekayaan Intelektual	Layanan perkantoran Manajemen Keuangan Program dan Anggaran Manajemen BMN Kerumahtanggaan Arsip dan Persuratan Keamanan dan Ketertiban Sarana Internal Prasarana Internal Manajemen SDM Sistem dan Prosedur Reformasi Birokrasi Hubungan Masyarakat Keprotokolieran Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan	1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan 140 Unit 3 Unit 960 Orang 1 layanan 1 layanan 1 Layanan 4 laporan

Kegiatan	Anggaran
1 Penyusunan Rencana Program	Rp 234.870.000,00
2 Penyusunan Rencana Anggaran	Rp 2.145.614.000,00
3 Pelaksanaan Pemertuan dan Evaluasi	Rp 9.000.000.000,00
4 Pengelolaan Keuangan	Rp 8.212.157.000,00
5 Pengelolaan Perbendaharaan	Rp 1.175.084.000,00
6 Pengelolaan Ketatausahaan	Rp 2.500.000.000,00
7 Pengelolaan Kepegawaian	Rp 30.000.000.000,00
8 Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Rp 81.222.092.000,00
9 Pelaksanaan Layanan Urusan Rumah Tangga	Rp 63.263.795.000,00
10 Pelayanan Humas dan Protokol	Rp 20.250.000.000,00
11 Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Rp 6.336.756.000,00
12 Gaji dan Tunjangan	Rp 44.607.075.000,00
13 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 30.163.071.000,00

Jakarta, Januari 2021  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

  
Freda Harris  
NIP. 196311151994031001

  
Chairani Idha K  
NIP. 196110081966112001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chairani idha Koesmaywati  
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2021  
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

  
Chairani Idha Koesmaywati  
NIP. 196110081966112001

**LAMPIRAN RINGKASAN PENYAMPAIAN DATA REALISASI KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN 2021**

**a. Data Realisasi Kinerja**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,3 (indeks)	3,39	102,72%
		<b>Output Program</b>			
		Persentase penyelesaian permohonan KI sesuai dengan peraturan yang berlaku	99%	81,64%	82,46%
		Persentase peningkatan permohonan KI	12%	21,45%	178,75%
		Persentase penanganan aduan pelanggaran HKI	100%	100%	100%
		Persentase peningkatan produk KI dan Komunal yang dilindungi	6%	27,38%	456,33%
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di lingkungan DJKI	Layanan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien di lingkungan DJKI	76,61 (Nilai Indeks Layanan Manajemen Internal di lingkungan DJKI Kemenkumham)	76,61	100%

**b. Data Realisasi Anggaran**

No.	Program/Sasaran/Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang Kekayaan Intelektual	Rp. 178.835.747.000,00	Rp. 159.761.790.284,00	89,33%
	DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI	Rp. 3.563.512.000,00	Rp. 2.986.789.252,00	83,82%

	DIREKTORAT KERJASAMA DAN PKS	Rp. 15.745.104.000,00	Rp. 13.999.790.819,00	88,92%
	DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS	Rp. 4.650.102.000,00	Rp. 3.849.726.555,00	82,79%
	DIREKTORAT PATEN, DTLST DAN RD	Rp. 6.578.773.000,00	Rp. 5.937.590.871,00	90,25%
	DIREKTORAT PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	Rp. 2.306.939.000,00	Rp. 1.977.431.316,00	85,72%
	DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL	Rp. 145.991.317.000,00	Rp. 131.010.461.471,00	89,74%
<b>2.</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>			
	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	<b>Rp. 343.507.844.000,00</b>	<b>Rp. 247.297.321.321,00</b>	<b>71,99%</b>

**c. Hambatan**

- 1) Diberlakukannya PPKM selama tahun 2021, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal terutama pada kegiatan yang memang lebih optimal dilakukan secara luring/tatap muka langsung;
- 2) Masih berlangsungnya Pandemic COVID-19 menyebabkan terjadinya refocusing anggaran, hal ini menjadi salah satu penghambat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan;
- 3) Pengembangan aplikasi system online yang masih belum dapat digunakan secara maksimal;
- 4) Masih belum selesainya perubahan peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual dan belum adanya peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual Komunal.

**d. Upaya Mengatasi Hambatan**

- 1) Melakukan penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja secara kontinyu melalui penetapan indikator kinerja yang lebih terukur, berkualitas, dan memiliki target yang menantang;
- 2) Memastikan bahwa Indikator Kinerja Utama yang tercantum di dalam dokumen Perjanjian Kinerja unit kerja akan dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang tercantum di dalam Rencana Strategis 2020-2024;
- 3) Menerapkan sistem manajemen risiko dalam upaya pencapaian indikator kinerja;
- 4) Menyelaraskan Sasaran Program pada tingkat Eselon II, dan Sasaran Kegiatan pada tingkat Kegiatan, dengan Sasaran Strategis;
- 5) Menyusun Rencana Kerja yang ada, dengan memperhatikan output outcome, timeline-nya, dengan rencana penyerapan anggaran dan realisasi hasilnya;



- 6) Menyukkseskan tahun 2021 sebagai Tahun Paten Nasional walaupun masih berada dalam kondisi Pandemi Covid-19, sebagai upaya DJKI dalam mengawal program pemerintah yaitu Pemulihan Ekonomi Nasional melalui segenap upaya jempot bola seperti Safari Paten guna mendorong peningkatan permohonan KI dari dalam negeri;
- 7) Melakukan optimalisasi penggunaan Layanan Kekayaan Intelektual secara keseluruhan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi;
- 8) Mengawal pelaksanaan target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di bidang Kekayaan Intelektual secara optimal, dimana secara umum capaian dari target kinerja Kanwil Kemenkumham di bidang Kekayaan Intelektual mencapai nilai kinerja hampir 100% terpenuhi untuk 2 (dua) target kinerja terkait implementasi kerja sama yang dilakukan oleh Kanwil dalam rangka meningkatkan permohonan KI dan terkait penegakkan hukum di bidang KI dengan 3 ukuran keberhasilan dari kedua target kinerja tersebut;
- 9) Melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap pelaksanaan kegiatan.

#### **e. Rencana ke Depan**

Selanjutnya di tahun mendatang, yaitu Tahun 2022 akan menjadi Tahun Tematik bagi Hak Cipta, maka salah satu agenda besar yang harus dikawal bersama adalah pada RUU Desain Industri yang masuk sebagai Prolegnas Prioritas di tahun 2022 yang akan di bahas di DPR dan diharapkan agar proses pembahasannya dapat berjalan lancar, serta dapat berlanjut dengan pembahasan RUU Paten. Selain itu di tahun 2022 juga terdapat beberapa program unggulan DJKI yang harus kita eksekusi dan sukseskan bersama. Adapun secara singkat dapat kami sampaikan Program Unggulan DJKI Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

- Roving Seminar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Penerimaan Negara Bukan Pajak “Berkeadilan”;
- Persetujuan Otomatis Pelayanan Hak (Hak Cipta) Kekayaan Intelektual (POP-HKI);
- *Mobile Intellectual Property Clinic*;
- *Intellectual Property Marketplace*;
- *Drafting Patent Camp*;
- Penyusunan Peta Potensi Ekonomi Kekayaan Intelektual Komunal;
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Aktif Mendengar untuk Memberi Solusi;
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Aktif Belajar dan Mengajar;
- Sertifikasi Pusat perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual;
- Sertifikasi ISO 9001:2015 (Sertifikasi Manajemen Mutu);
- Sertifikasi ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan);
- Sertifikasi Ahli Penyuluh Anti Korupsi;
- Audit dan Peningkatan Sistem Teknologi Informasi;
- Sinergi dan Kolaborasi Antar Unit dengan Unit Layanan Pengadaan; serta
- Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa.



DGIP.GO.ID